



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2025**



**Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Kudus
Tahun 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 dengan baik.

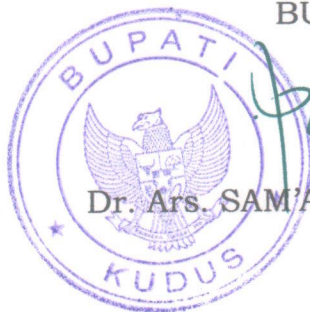
Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional bagi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

LPPD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan hasil kinerja Kepala Daerah yang disajikan secara terukur, dalam bentuk capaian Indikator Kinerja *Outcome* sebagai hasil penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan daerah meliputi urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang. LPPD juga memuat capaian kinerja makro pembangunan daerah, capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan. Selain itu disampaikan pula permohonan maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus senantiasa berkomitmen dan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kudus, **25** Maret 2026

BUPATI KUDUS



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Jumlah Penduduk	4
d. Jumlah Kecamatan	7
e. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah .	10
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	14
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	25
a. permasalahan strategis pemerintah daerah	25
b. visi dan misi kepala daerah	33
c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah .	36
d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	44
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	67
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	75
2.1 Capaian Kinerja Makro	75
2.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	75
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan	76
2.2.2. Indidkator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan emerintahan	83
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	84
a. target kinerja dalam perjanjian kinerja	85
b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	86
c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	87
d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	88
e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.....	89
f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	149
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	166
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	167
4.1 Urusan Pendidikan	167
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasa	167
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	167
4.1.3 Realisasi	167

4.1.4 Alokasi Anggaran	170
4.1.5 Dukungan Personil	171
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	171
4.2 Urusan Kesehatan	172
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	187
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	191
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	196
4.6 Urusan Sosial	206
4.7 Program dan Kegiatan	213
BAB V PENUTUP	223

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna, dan R-LPPD kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, serta Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

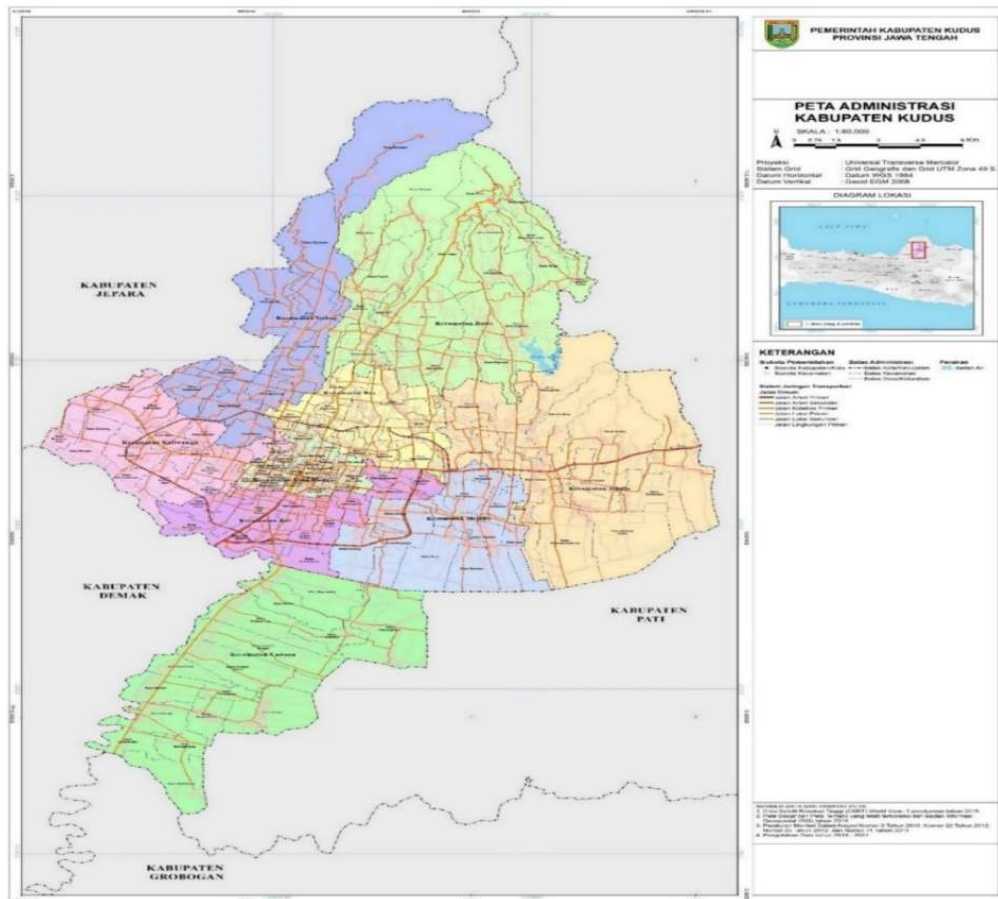
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 13).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 1);

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 425,15 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus



Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
Sebelah Timur : Kabupaten Pati
Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Berdasarkan gambar 1.1 di atas secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada $7^{\circ}1'13''$ dan $7^{\circ}22'57''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}45'30''$ dan $110^{\circ}58'37''$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km.

Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perwilayahan, Kabupaten Kudus termasuk dalam Wanarakuti yang berpusat di Perkotaan Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal Provinsi dan Nasional. Wilayah Kabupaten Kudus keseluruhannya merupakan daratan tanpa adanya wilayah pesisir, hanya sedikit di wilayah utara merupakan wilayah perbukitan Gunung Muria.

c. Jumlah Penduduk

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kudus Tahun 2021-2025

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079
2023	436.585	49,99	436.846	50,01	873.431
2024	438.626	49,97	439.195	50,03	877.821
2025	441.132	49,95	442.062	50,05	883.194

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kudus cenderung stabil dari tahun ke tahun. Adapun perbandingan komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebanyak 438.626 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 439.195 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2025 jumlah penduduk sebanyak 883.194 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 441.132 orang atau sekitar 49,95% dan perempuan sebanyak 442.062 orang atau 50,05%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat dibanding laki-laki.

Komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kudus Tahun 2025

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	72.308	67.809	140.117
11-20	70.789	66.498	137.287
21-30	68.407	65.982	134.389
31-40	66.848	64.947	131.795
41-50	67.072	68.302	135.374
51-60	51.101	56.222	107.323
61-70	31.920	35.043	66.963
> 70	12.687	17.259	29.946
Jumlah	441.132	442.062	883.194

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan tabel 1.2, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Secara lebih jelas tegambarkan dalam grafik piramida penduduk di bawah ini.

Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Per-usia Perjenis Kelamin Kabupaten Kudus
Tahun 2025



Berdasarkan grafik 1.1, diketahui bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Kudus berbentuk piramida segi lima yang menunjukkan surplus pada usia balita sampai dengan usia 50 tahun. Bentuk piramida penduduk yang terbalik mengindikasikan terjadinya pola Aging Population pada

suatu daerah yang dapat berdampak pada Dependency Ratio (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia ≤ 10 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 140.117 jiwa terdiri perempuan 67.809 dan laki-laki 72.308 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 11-20 tahun sebesar 137.287 jiwa terdiri dari perempuan 66.498 dan laki-laki 70.789.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio*
di Kabupaten Kudus Tahun 2025

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40
2023	201.713	614.458	57.260	873.431	42,15
2024	186.406	621.783	69.632	877.821	41,18
2025	197.687	619.534	65.973	883.194	42,56

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2025 sebesar 42,56. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 sebesar 41,18. Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun).

Distribusi penduduk tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas, sebagaimana terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2021-2025

Tingkat pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
Tidak/Belum Sekolah	225.946	235.344	242.423	246.338	246.706
Belum Tamat SD/ Sederajat	62.373	59.661	57.637	55.276	53.627
Tamat SD/ sederajat	229.125	219.953	214.236	208.611	204.656
SLTP/ sederajat	144.005	140.876	139.680	139.283	140.790
SLTA/ sederajat	157.921	161.995	167.016	173.288	179.965
Akademi / Sarjana	47.835	50.250	52.439	55.025	57.450
Jumlah Penduduk	867.205	868.079	873.431	877.821	883.194

Sumber : DKB semester 2 Tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 246.706 penduduk. Jumlah penduduk yang SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang SLTP/ Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/ Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2025 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/ Sarjana mengalami peningkatan 2.425 orang atau naik 4,41 % dibandingkan tahun 2024.

d. Jumlah kecamatan

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan yang terbagi 123 desa dan 9 kelurahan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1	Kec. Kaliwungu	1	Desa Bakalan Krapyak
		2	Desa Prambatan Kidul
		3	Desa Prambatan Lor
		4	Desa Garung Kidul
		5	Desa Setrokalangan
		6	Desa Banget
		7	Desa Blimbing Kidul
		8	Desa Sidorekso
		9	Desa Gamong
		10	Desa Kedungdowo
		11	Desa Garung Lor
		12	Desa Karangampel
		13	Desa Mijen

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		14	Desa Kaliwungu
		15	Desa Papringan
2	Kec. Kota	16	Kelurahan Purwosari
		17	Desa Janggalan
		18	Desa Demangan
		19	Kelurahan Sunggingan
		20	Kelurahan Panjunan
		21	Kelurahan Wergu Kulon
		22	Kelurahan Wergu Wetan
		23	Kelurahan Mlati Kidul
		24	Kelurahan Mlatinorowito
		25	Desa Mlati Lor
		26	Desa Nganguk
		27	Desa Kramat
		28	Desa Demaan
		29	Desa Langgardalem
		30	Desa Kauman
		31	Desa Damaran
		32	Kelurahan Kerjasan
		33	Kelurahan Kajeksan
		34	Desa Krandon
		35	Desa Singocandi
		36	Desa Glantengan
		37	Desa Kaliputu
		38	Desa Barongan
		39	Desa Burikan
		40	Desa Rendeng
3	Kec. Jati	41	Desa Jetiskapuan
		42	Desa Tanjungkarang
		43	Desa Jati Wetan
		44	Desa Pasuruhan Kidul
		45	Desa Pasuruhan Lor
		46	Desa Ploso
		47	Desa Jati Kulon
		48	Desa Getaspejaten
		49	Desa Loram Kulon
		50	Desa Loram Wetan
		51	Desa Jepangakis
		52	Desa Megawon
		53	Desa Ngembal Kulon
		54	Desa Tumpangkrasak
4	Kec. Undaan	55	Desa Wonosoco
		56	Desa Lambangan
		57	Desa Kalirejo
		58	Desa Medini
		59	Desa Sambung

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		60	Desa Glagahwaru
		61	Desa Kutuk
		62	Desa Undaan Kidul
		63	Desa Undaan Tengah
		64	Desa Karangrowo
		65	Desa Larikrejo
		66	Desa Undaan Lor
		67	Desa Wates
		68	Desa Ngemplak
		69	Desa Terangmas
		70	Desa Berugenjang
5	Kec. Mejobo	71	Desa Gulang
		72	Desa Jepang
		73	Desa Payaman
		74	Desa Kirig
		75	Desa Temulus
		76	Desa Kesambi
		77	Desa Jojo
		78	Desa Hadiwarno
		79	Desa Mejobo
		80	Desa Golantepus
		81	Desa Tenggeles
6	Kec. Jekulo	82	Desa Sadang
		83	Ds. Bulungcangkring
		84	Desa Bulung Kulon
		85	Desa Sidomulyo
		86	Desa Gondoharum
		87	Desa Terban
		88	Desa Pladen
		89	Desa Klaling
		90	Desa Jekulo
		91	Desa Hadipolo
		92	Desa Honggosoco
		93	Desa Tanjungrejo
7	Kec. Bae	94	Desa Dersalam
		95	Desa Ngembalrejo
		96	Desa Karangbener
		97	Desa Gondangmanis
		98	Desa Pedawang
		99	Desa Bacin
		100	Desa Panjang
		101	Desa Peganjaran
		102	Desa Purworejo
		103	Desa Bae

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
8	Kec. Gebog	104	Desa Gribig
		105	Desa Klumpit
		106	Desa Getasrabi
		107	Desa Padurenan
		108	Desa Karangmalang
		109	Desa Besito
		110	Desa Jurang
		111	Desa Gondosari
		112	Desa Kedungsari
		113	Desa Menawan
		114	Desa Rahtawu
9	Kec. Dawe	115	Desa Samirejo
		116	Desa Cendono
		117	Desa Margorejo
		118	Desa Rejosari
		119	Desa Kandangmas
		120	Desa Glagah Kulon
		121	Desa Tergo
		122	Desa Cranggang
		123	Desa Lau
		124	Desa Piji
		125	Desa Puyoh
		126	Desa Soco
		127	Desa Ternadi
		128	Desa Kajar
		129	Desa Kuwukan
		130	Desa Dukuhwaringi
		131	Desa Japan
		132	Desa Colo

Sumber : Perda Nomor 1 Tahun 2015, diolah.

- e. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, ada 33 Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, sebagaimana tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6
Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat Daerah	
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
6	Dinas Kesehatan	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
11	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Dinas Perdagangan	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14	Dinas Perhubungan	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
17	Dinas Pertanian dan Pangan	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
19	Satuan Polisi Pamong Praja	
20	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
25	Kecamatan Kota	
26	Kecamatan Jati	
27	Kecamatan Undaan	
28	Kecamatan Mejobo	
29	Kecamatan Jekulo	
30	Kecamatan Kaliwungu	
31	Kecamatan Dawe	
32	Kecamatan Gebog	
33	Kecamatan Bae	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2024

Untuk Jumlah Pegawai per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Kudus sebanyak 6.866, naik dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2024 sebesar 6.543

orang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian rasio antara Aparatur Sipil Negara dan jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebesar 0,78 persen.

Adapun penyebaran Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.7 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara di setiap Perangkat Daerah.

Tabel 1.7
Rincian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	18	28	52
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan Umum	11	6	7	24
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Trantibum Linmas	14	6	6	26
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	20	16	34	70
5	Badan Perenc. Pemb. Penelitian & Pengemb. Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	6	28	7	41
		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	1	4	1	6
6	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	17	54	72	143
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	3	7	6	16
		Urusan Perpustakaan	3	8	3	14
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	4	3	12	19
		Urusan Pariwisata	5	6	13	24
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	15	8	29
10	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	8	767	105	880
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	5	15	4	24
		Urusan Statistik	0	2	3	5
		Urusan Persandian	0	2	3	5
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	20	48	78
		Urusan P3ertanahan	0	0	0	0
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan bidang PMD	14	7	11	32
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Penanaman Modal	4	14	8	26
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pendidikan	9	3714	90	3813
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga	2	13	85	100
16	Dinas Perdagangan	Urusan Perdagangan	7	10	86	103

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
17	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	11	10	54	75
18	Dinas Pertanian dan Pangan	Urusan Pertanian	8	46	7	61
		Urusan Pangan	2	3	7	12
		Urusan Perikanan	1	2	7	10
		Urusan Kehutanan	0	0	0	0
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	3	9	39	51
		Urusan Lingkungan Hidup	3	10	71	84
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Urusan Sosial	5	7	7	19
		Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	4	6	12
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	1	2	6	9
21	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan Tenaga Kerja	7	23	4	34
		Urusan Perindustrian	2	3	5	10
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2	4	8
		Urusan Transmigrasi	0	0	0	0
22	Inspektorat	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	7	46	9	62
23	RSUD dr. Loekmono Hadi	Urusan Kesehatan	12	427	87	526
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Trantibum Linmas	11	28	45	84
25	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	8	7	18	33
26	Kecamatan Bae	Urusan Pemerintahan Umum	6	0	10	16
27	Kecamatan Dawe	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	10	19
28	Kecamatan Gebog	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	12	21
29	Kecamatan Jati	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	11	20
30	Kecamatan Jekulo	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	12	21
31	Kecamatan Kaliwungu	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	7	15
32	Kecamatan Kota Kudus	Urusan Pemerintahan Umum	47	0	45	92
33	Kecamatan Mejobo	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	15	24
34	Kecamatan Undaan	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	11	18
JUMLAH			353	5.364	1.149	6.866

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kudus Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 1.8. berikut ini.

Tabel 1.8
Realisasi Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.433.918.766.766	2.479.424.243.099	101,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	692.080.401.298	726.639.905.022	104,99
Pajak Daerah	326.426.341.000	328.609.585.472	100,67
Retribusi Daerah	331.308.950.326	363.003.118.493	109,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.831.519.000	12.240.871.700	113,01
Lain-lain PAD yang Sah	23.513.590.972	22.786.329.357	96,91
PENDAPATAN TRANSFER	1.741.838.365.468	1.752.784.338.077	100,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.623.516.788.468	1.628.517.667.010	100,31
Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.321.577.000	124.266.671.067	105,02
JUMLAH PENDAPATAN	2.433.918.766.766	2.479.424.243.099	101,87
BELANJA DAERAH	2.642.648.461.418	2.455.719.781.542	92,93
BELANJA OPERASI	1.937.801.679.418	1.797.794.489.922	92,77
Belanja Pegawai	939.767.378.304	879.351.623.456	93,57
Belanja Barang dan Jasa	902.431.946.050	827.625.334.082	91,71
Belanja Hibah	93.412.972.464	89.102.448.046	95,39
Belanja Bantuan Sosial	2.189.382.600	1.715.084.338	78,34
BELANJA MODAL	377.126.189.828	353.741.992.524	93,8
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.064.065.678	101.831.349.676	93,37
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.324.216.123	104.201.211.547	91,95
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.871.234.117	142.893.153.536	97,29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.516.673.910	4.520.289.050	100,08
Belanja Modal Aset Lainnya	3.350.000.000	295.988.715	8,84
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.918.256.336	2.226.835.000	28,12
Belanja Tidak Terduga	7.918.256.336	2.226.835.000	28,12
BELANJA TRANSFER	319.802.335.836	301.956.464.096	94,42
Belanja Bagi Hasil	35.897.302.000	35.897.302.000	100
Belanja Bantuan Keuangan	283.905.033.836	266.059.162.096	93,71
SURPLUS/DEFISIT	-208.729.694.652	23.704.461.557	-11,36
PEMBIAYAAN DAERAH	208.729.694.652	208.729.694.652	100
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.729.694.652	208.729.694.652	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	208.729.694.652	208.729.694.652	100
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.729.694.652	208.729.694.652	100
PEMBIAYAAN NETTO	208.729.694.652	208.729.694.652	100
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	232.434.156.209	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2026)

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan dapat dilihat sebagaimana tabel 1.8. berikut ini

Tabel 1.9
Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah TA 2025

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1.624.530.580.407	1.528.791.489.308	94,11
	1.	Pendidikan	608.148.161.630	581.061.897.836	95,55
	2	Kesehatan	706.361.558.221	652.270.072.964	92,34
	3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.837.834.078	174.724.853.807	96,62
	4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.565.634.340	30.278.425.792	92,98
	5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.650.747.600	19.805.931.489	91,48
	6.	Sosial	74.966.644.538	70.650.307.420	94,24
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		203.436.219.505	190.992.372.706	93,88
	7.	Tenaga Kerja	13.747.109.400	12.613.013.263	91,75
	8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	730.051.700	596.143.116	81,66
	9.	Pangan	1.355.492.900	1.315.798.120	97,07
	10.	Pertanahan	621.841.000	414.657.100	66,68
	11.	Lingkungan Hidup	16.496.961.325	14.469.539.386	87,71
	12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.321.068.400	7.909.004.832	95,05
	13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.083.260.184	15.297.859.990	95,12
	14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.002.730.300	7.813.597.447	86,79
	15.	Perhubungan	65.832.212.168	64.121.302.339	97,40
	16.	Komunikasi dan Informatika	17.425.746.300	16.843.552.851	96,66
	17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1.411.136.500	1.327.528.830	94,08
	18.	Penanaman Modal	6.679.014.100	5.948.893.154	89,07
	19.	Kepemudaan dan Olahraga	8.850.703.364	8.199.574.662	92,64
	20.	Statistik	64.931.000	22.349.000	34,42
	21.	Persandian	78.445.000	61.281.879	78,12
	22.	Kebudayaan	18.702.087.729	17.331.325.525	92,67
	23.	Perpustakaan	17.850.581.335	16.548.921.103	92,71
	24.	Kearsipan	182.846.800	158.030.109	86,43
C	Urusan Pemerintahan Pilihan		60.255.344.935	54.978.268.631	91,24
	25.	Kelautan dan Perikanan	182.237.000	164.040.450	90,01
	26.	Pariwisata	7.970.655.961	7.757.935.957	97,33
	27.	Pertanian	22.989.501.046	21.238.535.147	92,38
	28.	Kehutanan	14.897.000	14.485.250	97,24
	39.	Perdagangan	28.067.519.928	24.828.995.404	88,46
	30.	Perindustrian	1.030.534.000	974.276.423	94,54
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		258.338.601.777	234.093.589.367	90,62
	31.	Sekretariat Daerah	166.734.396.028	155.869.309.755	93,48
	32.	Sekretariat DPRD	91.604.205.749	78.224.279.612	85,39

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		397.678.276.886	365.642.811.035	91,94
	33.	Perencanaan	12.173.205.134	11.332.862.849	93,10
	34.	Keuangan	369.738.952.072	340.255.498.795	92,03
	35.	Kepegawaian	13.348.508.180	11.863.346.779	88,87
	36.	Pendidikan dan Pelatihan	1.950.627.700	1.750.728.574	89,75
	37.	Penelitian dan Pengembangan	466.983.800	440.374.038	94,30
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		23.804.953.000	12.639.039.664	53,09
	40.	Inspektorat Daerah	23.804.953.000	12.639.039.664	53,09
G	Unsur Kewilayahan		61.357.007.608	56.325.651.327	91,80
	41.	Kecamatan	61.357.007.608	56.325.651.327	91,80
H	Unsur Pemerintahan Umum		13.247.477.300	12.256.559.504	92,52
	42.	Kesatuan Bangsa dan Politik	13.247.477.300	12.256.559.504	92,52
		JUMLAH BELANJA	2.642.648.461.418	2.455.719.781.542	92,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2026)

Sedangkat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program menurut Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.10
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		1.624.530.580.407	1.528.791.489.308
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		608.148.161.630	581.061.897.836
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	457.141.622.742	436.459.287.674
	Program Pengelolaan Pendidikan	150.391.138.988	144.067.509.787
	Program Pengembangan Kurikulum	120.000.000	93.348.000
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	124.999.900	74.080.275
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	370.400.000	367.672.100
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		706.361.558.221	652.270.072.964
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	452.145.815.470	417.415.729.924
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	251.261.583.751	232.116.640.577

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	897.359.300	827.246.720
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	533.078.000	473.626.693
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.523.721.700	1.436.829.050
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		180.837.834.078	174.724.853.807
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.997.996.000	16.017.196.894
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	16.736.365.938	16.133.965.766
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	604.320.000	594.329.500
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.503.370.900	2.481.981.721
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	43.492.820.350	42.345.213.595
	Program Penataan Bangunan Gedung	2.061.274.400	1.961.425.755
	Program Penyelenggaraan Jalan	97.949.640.590	94.714.145.796
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	28.516.500	25.263.800
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	463.529.400	451.330.980
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		32.565.634.340	30.278.425.792
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.859.713.100	25.882.216.548
	Program Pengembangan Perumahan	513.345.900	484.129.047
	Program Kawasan Permukiman	797.896.600	565.463.760
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.394.678.740	3.346.616.437
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		21.650.747.600	19.805.931.489
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.124.024.600	16.787.376.421
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.218.482.300	883.727.767
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.016.203.800	999.181.442
	Program Penanggulangan Bencana	1.292.036.900	1.135.645.859

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		74.966.644.538	70.650.307.420
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.188.039.588	6.879.995.503
	Program Pemberdayaan Sosial	419.907.300	344.635.636
	Program Rehabilitasi Sosial	1.899.507.900	1.613.400.008
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	64.155.509.150	61.573.699.139
	Program Penanganan Bencana	278.447.400	219.589.534
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25.233.200	18.987.600
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		203.436.219.505	190.992.372.706
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		13.747.109.400	12.613.013.263
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.960.210.400	9.060.846.188
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	18.319.500	12.763.427
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.419.831.000	3.225.609.348
	Program Penempatan Tenaga Kerja	272.260.500	249.026.000
	Program Hubungan Industrial	76.488.000	64.768.300
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		730.051.700	596.143.116
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	608.476.700	512.249.706
	Program Perlindungan Perempuan	17.955.600	10.092.200
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	4.441.000	3.771.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	53.373.400	40.829.800
	Program Perlindungan Khusus Anak	45.805.000	29.200.410
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		1.355.492.900	1.315.798.120
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79.554.000	77.039.540
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	219.035.000	209.979.000
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	929.093.800	902.985.880
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	87.660.700	85.980.400

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.149.400	39.813.300
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		621.841.000	414.657.100
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	68.169.000	7.101.000
	Program Penatagunaan Tanah	553.672.000	407.556.100
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		16.496.961.325	14.469.539.386
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	204.632.500	196.949.080
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	302.441.800	290.739.100
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	975.863.000	415.718.587
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.888.200	2.799.300
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	10.012.000	9.971.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	244.804.500	230.816.928
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	117.061.500	115.987.080
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.532.000	10.525.250
	Program Pengelolaan Persampahan	14.628.725.825	13.196.033.061
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.321.068.400	7.909.004.832
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.436.875.300	6.160.727.851
	Program Pendaftaran Penduduk	820.978.100	794.587.051
	Program Pencatatan Sipil	373.068.200	367.978.700
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	690.146.800	585.711.230
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		16.083.260.184	15.297.859.990
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.315.734.000	5.890.872.422
	Program Penataan Desa	4.709.748.000	4.570.768.935

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	55.742.000	53.985.498
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.293.770.084	4.171.530.355
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	708.266.100	610.702.780
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		9.002.730.300	7.813.597.447
	Program Pengendalian Penduduk	340.271.900	223.194.252
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.089.734.400	3.275.910.887
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.572.724.000	4.314.492.308
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		65.832.212.168	64.121.302.339
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.159.129.425	14.455.198.412
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	50.673.082.743	49.666.103.927
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika		17.425.746.300	16.843.552.851
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.239.414.500	8.898.676.663
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.375.658.000	7.189.399.115
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	810.673.800	755.477.073
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		1.411.136.500	1.327.528.830
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.020.000	25.845.361
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	70.000.000	69.737.765
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	269.000.000	243.282.364
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	634.490.300	599.387.145
	Program Pengembangan UMKM	408.626.200	389.276.195
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		6.679.014.100	5.948.893.154
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.060.741.200	5.392.993.377
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	117.360.600	104.360.190
	Program Promosi Penanaman Modal	152.177.000	147.233.100
	Program Pelayanan Penanaman Modal	185.233.800	156.316.238

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	84.381.700	72.297.499
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	79.119.800	75.692.750
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		8.850.703.364	8.199.574.662
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	590.486.000	407.008.450
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.160.217.364	7.692.566.212
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	100.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		64.931.000	22.349.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	64.931.000	22.349.000
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		78.445.000	61.281.879
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	78.445.000	61.281.879
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		18.702.087.729	17.331.325.525
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.877.470.938	10.629.194.465
	Program Pengembangan Kebudayaan	2.715.182.290	2.665.579.190
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	536.615.600	506.227.638
	Program Pengelolaan Permuseuman	3.484.269.901	3.446.716.332
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	88.549.000	83.607.900
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		17.850.581.335	16.548.921.103
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.339.624.500	4.837.091.026
	Program Pembinaan Perpustakaan	12.510.956.835	11.711.830.077
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		182.846.800	158.030.109
	Program Pengelolaan Arsip	171.063.000	150.525.109
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	11.783.800	7.505.000
Urusan Pemerintahan Pilihan		60.255.344.935	54.978.268.631
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		182.237.000	164.040.450
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	37.556.800	35.897.100
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	107.318.900	93.090.000
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	37.361.300	35.053.350

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		7.970.655.961	7.757.935.957
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.786.588.061	5.605.457.641
	Program Pemasaran Pariwisata	1.739.067.900	1.708.681.416
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	375.000.000	375.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70.000.000	68.796.900
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		22.989.501.046	21.238.535.147
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.897.597.046	14.476.094.453
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.806.043.000	3.570.453.977
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.139.932.100	2.104.445.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	205.991.100	187.521.658
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	200.514.800	197.147.300
	Program Penyuluhan Pertanian	739.423.000	702.872.759
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		14.897.000	14.485.250
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	14.897.000	14.485.250
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		28.067.519.928	24.828.995.404
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.022.198.628	20.213.679.937
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4.376.000	4.212.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.020.961.000	3.637.720.975
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	132.089.800	111.515.528
	Program Pengembangan Ekspor	150.597.600	139.008.200
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	35.563.200	29.927.873
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	701.733.700	692.930.891
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		1.030.534.000	974.276.423
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.025.178.000	969.065.373

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	2.570.000	2.554.750
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2.786.000	2.656.300
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		258.338.601.777	234.093.589.367
Sekretariat Daerah		166.734.396.028	155.869.309.755
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	332.965.179.656	311.324.267.820
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	230.928.801.800	218.968.366.242
	Program Perekonomian dan Pembangunan	230.928.801.800	218.968.366.242
Sekretariat DPRD		91.604.205.749	78.224.279.612
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.763.600.469	51.343.323.513
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	36.840.605.280	26.880.956.099
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		397.678.276.886	365.642.811.035
Perencanaan		12.173.205.134	11.332.862.849
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.357.408.490	9.042.914.678
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.043.323.544	1.638.448.948
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	772.473.100	651.499.223
Keuangan		369.738.952.072	340.255.498.795
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.732.535.900	25.433.307.268
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	329.690.332.672	305.715.246.964
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.145.596.000	7.330.174.256
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.170.487.500	1.776.770.307
Kepegawaian		13.348.508.180	11.863.346.779
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.625.486.500	8.811.715.801
	Program Kepegawaian Daerah	3.723.021.680	3.051.630.978
Pendidikan Dan Pelatihan		1.950.627.700	1.750.728.574
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.950.627.700	1.750.728.574
	Penelitian dan Pengembangan	466.983.800	440.374.038
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	466.983.800	440.374.038
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	466.983.800	440.374.038
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		23.804.953.000	12.639.039.664

Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.747.122.950	11.771.828.814
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	598.037.450	308.273.790
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.459.792.600	558.937.060
Unsur Kewilayahan		61.357.007.608	56.325.651.327
Kecamatan		61.357.007.608	56.325.651.327
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.165.958.822	44.145.081.712
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	534.532.180	467.494.082
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.426.705.583	8.695.994.920
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.480.851.615	1.401.103.070
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.198.142.900	1.116.996.244
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	550.816.508	498.981.299
Unsur Pemerintahan Umum		13.247.477.300	12.256.559.504
Kesatuan Bangsa dan Politik		13.247.477.300	12.256.559.504
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.730.701.600	4.155.510.847
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.324.019.900	3.135.366.699
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.281.040.400	3.186.522.100
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	630.649.100	559.544.180
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	496.823.800	470.354.334
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	784.242.500	749.261.344
	Jumlah	2.642.648.461.418	2.455.719.781.542

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Kudus yaitu :

1. *Penurunan kondisi lingkungan hidup*

Penurunan kondisi lingkungan hidup terjadi sebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat sehingga terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan menurunnya luas lahan resapan, menurunnya kemampuan lahan dalam menyerap dan menyediakan air, menurunnya produksi hasil pertanian, serta meningkatnya ancaman bencana dan perubahan iklim. Penurunan kondisi lingkungan hidup juga terjadi pada kualitas air, udara, dan tanah sebagai dampak dari aktivitas domestik dan industri yang menghasilkan limbah cair dan limbah padat (sampah), dan akibat kegiatan transportasi dan industri yang menimbulkan polusi udara yang penanganannya belum optimal baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah daerah.

2. *Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia*

Belum optimalnya sumber daya manusia ditinjau dari segi non fisik dan fisik. Ditinjau dari segi non fisik, daya saing SDM di Kabupaten Kudus belum optimal sebab belum terpenuhinya angka partisipasi wajib belajar 12 tahun sebesar 100%, masih adanya satuan pendidikan dengan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar, dan budaya membaca yang masih tergolong rendah. Dampaknya, kualitas tenaga kerja menjadi belum optimal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualitas hasil pekerjaan. Ke depannya, era dimana teknologi akan dominan mewarnai seluruh kegiatan, akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penguasaan teknologi digital akan menjadi tantangan, sementara indeks masyarakat digital pilar ketrampilan digital di Kabupaten Kudus baru sebesar 60,85. Dari segi fisik (kesehatan), upaya masyarakat dalam menjaga kesehatan pribadi belum optimal disebabkan daya hidup yang tidak sehat, pola asuh yang kurang tepat, dan ketidakmampuan pemenuhan gizi yang menyebabkan masih adanya stunting di Kabupaten Kudus.

Dari segi kepemudaan, indeks pembangunan pemuda belum optimal (58,33). Keterlibatan pemuda baik dalam pembangunan secara umum, pembangunan perekonomian melalui wirausaha, organisasi kepemudaan, dan peningkatan prestasi olahraga masih perlu ditingkatkan.

Dari segi jaminan sosial, perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta pelayanan bagi kelompok rentan, miskin dan penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan.

3. *Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi*

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten yang baru mencapai 2,19%, masih adanya pengangguran (3,19%) pada tahun 2024, masih adanya kemiskinan sebesar 7,23% dan kemiskinan Ekstrem sebesar 0,40% sementara angka ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif semakin meningkat.

Secara umum, kualitas tenaga kerja ditentukan oleh kualitas pendidikan. Dengan belum optimalnya kualitas pendidikan, maka kualitas tenaga kerja turut menjadi belum optimal. Selain itu, potensi tenaga kerja ke depannya didominasi oleh tenaga kerja wanita, namun secara pendidikan, kualitas pendidikan tenaga kerja wanita juga belum optimal sehingga kualitas hasil pekerjaan menjadi belum optimal

4. *Belum optimalnya penyediaan infrastruktur*

Terdapat banyak jenis infrastruktur yang perlu disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah kegiatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik yang berupa jaringan maupun sarana. Penyediaan infrastruktur memiliki keterbatasan utama pada penganggaran sehingga penyediaannya perlu memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam hal keuangan. Dari segi penyediaan infrastruktur dasar, masih diperlukan perhatian terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya baik dalam infrastruktur secara fisik, SDM pengelola, maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pelayanan.

Pada tahun 2024, masih adanya jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (8,6% panjang jalan) dan masih adanya jembatan kondisi rusak (9,62% panjang jembatan) dapat menurunkan aksesibilitas masyarakat ke suatu wilayah, masih adanya daerah irigasi dalam kondisi rusak ringan dan sedang (9,57% luas DI) dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan padi, masih adanya saluran drainase rusak (34,83% panjang saluran drainase) dapat meningkatkan kerawanan genangan dan banjir. Selain itu, belum terpenuhinya 100% air minum layak dan aman, masih adanya rumah tidak layak huni (3,44%), dan masih adanya permukiman kumuh (30,46 Ha) juga merupakan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur.

5. *Belum optimalnya tata kelola pemerintahan*

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan beberapa penyebabnya adalah kualitas perencanaan pembangunan yang masih kurang, pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, dan kualitas SDM yang masih kurang. Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan kurangnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi dalam sistem tata kelola pemerintahan, selain itu inovasi juga menjadi belum optimal.

ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, dirumuskan isu strategis Jangka Menengah Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. *Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan*

Perkembangan ekonomi global memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Kudus. Sebagai daerah dengan tingkat net ekspor PDRB di atas 52 persen, dimana sebagian besar produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Kudus merupakan produk alokasi pemasaran di luar negeri, maka tingkat pengaruh yang terjadi pada ekonomi global secara umum sangat berdampak pada aktivitas ekonomi domestik Kabupaten Kudus. Salah satu sektor yang memiliki *linkage* global adalah produk industri hasil tembakau yang telah menembus pasar global, adanya kesepakatan negara-negara untuk menyusun regulasi membatasi konsumsi rokok sangat berpengaruh terhadap permintaan produk rokok yang diproduksi di Kabupaten Kudus. Selain itu adanya perkembangan alih teknologi dari era industri 4.0 ke era industri 5.0 yang mengusung teknologi yang menggantikan peran manusia sepenuhnya menjadi kekhawatiran dunia usaha terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu kemiskinan juga masih menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Kudus. Peningkatan jumlah penduduk miskin membuktikan bahwa penduduk miskin merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi goncangan ekonomi, terlebih penduduk yang tergolong dalam kelompok sangat miskin. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berpotensi meningkatkan kesenjangan antar penduduk miskin dan membuat upaya penurunan kemiskinan menjadi lebih sulit terwujud. Upaya menurunkan kemiskinan dapat dilakukan dengan membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam

pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin antara lain kebutuhan akan jaminan pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Hingga tahun 2022, masih terdapat penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan serta perumahan yang layak. Lebih lanjut, upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin terhambat oleh ketersediaan data kemiskinan yang valid dan terbaru. Oleh karena perbaikan dan pembaruan data kemiskinan perlu menjadi agenda yang terus dilaksanakan. Kemiskinan merupakan isu multidimensional dimana penyelesaiannya membutuhkan sinergi berbagai sektor dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Sebenarnya, perangkat daerah terkait telah melaksanakan program dan kegiatan pengurangan kemiskinan, namun bersifat parsial dan belum saling terintegrasi. Hal tersebut utamanya disebabkan Kabupaten Kudus belum memiliki peta jalan penurunan kemiskinan untuk memberikan arah dan pedoman dalam upaya penurunan kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah juga belum dapat mengoptimalkan peran swasta dan masyarakat dalam upaya penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan secara integratif membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karenanya, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan membantu pembiayaan kegiatan penurunan kemiskinan melalui CSR. Selanjutnya, upaya penurunan kemiskinan yang paling efektif sebenarnya adalah meningkatkan kapasitas penduduk miskin. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran desa sebagai pranata pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Berbagai isu terkini yang terjadi pada level nasional maupun lokal provinsi memberikan andil dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Kudus. Sebagaimana pada isu strategis global, pembaharuan regulasi terkait konsumsi produk hasil tembakau juga dirasakan sangat signifikan bagi perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Kudus. Selain itu, isu deindustrialisasi dini pada sektor industri pengolahan pada skala nasional juga turut dirasakan di Kabupaten Kudus yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya tingkat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kudus. Isu strategis lokal daerah Kabupaten Kudus yang menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Kudus antara lain:

- a. Kabupaten Kudus memasuki fase ekonomi *upper-middle income trap* yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita tergolong menengah tinggi, kesenjangan pendapatan masyarakat sedang, dan masih terdapat angka kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem di daerah.
- b. Transformasi sektor ekonomi masih terjadi secara perlahan dimana terdapat perubahan kontribusi atau distribusi lapangan usaha dari sektor industri pengolahan ke sektor lainnya. Sektor Perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor jasa memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, namun kontribusi terhadap PDRB masih rendah, sehingga perlu akselerasi keberpihakan dalam bentuk kebijakan, investasi, dan infrastruktur dari semua *stakeholder* untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi.
- c. Komposisi tenaga kerja dilihat dari tingkat pendidikannya masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD dan SMP, sedangkan komposisi tingkat pengangguran justru didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap pada dunia kerja adalah tenaga kerja kualitas rendah. Selain itu, distribusi tenaga kerja pada sektor pertanian juga semakin rendah.

2. *Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya*

Transformasi ini adalah adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan nilai-nilai yang terus berkembang. Upaya terintegrasi dalam pembangunan bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), nilai-nilai moral, kesehatan, sosial dan budaya, kekondusifan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai transformasi SDM, sosial dan budaya. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul dengan akhlak mulia dan budaya khas Kudus yang maju dalam berbagai tingkatan peradaban yang sedang dan akan dilalui, merupakan suatu tantangan yang melibatkan sejumlah permasalahan. Sumber Daya Manusia yang unggul merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah. Di tengah kondisi perekonomian yang semakin terkoneksi dengan perekonomian internasional, kemandirian dan SDM yang unggul harus semakin ditingkatkan. Dengan kemandirian dan keunggulan tersebut, maka dampak gejolak eksternal dapat diminimalisasi dan dinamikanya dapat dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pada peningkatan sumberdaya manusia yang unggul

akan membutuhkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, IPTEK dan pendukung lainnya. Sementara fokus pada masyarakat yang berbudaya maju dalam peradaban membutuhkan akses dan kualitas pendukung di bidang pelayanan sosial, kebudayaan, serta penguatan kohesivitas sosial dan menjaga kekondusifan wilayah. Perkembangan IPTEK yang sangat pesat telah berpengaruh pada struktur tatanan global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mengikuti dan terlibat dalam suatu tatanan global khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kualitas SDM yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global. Persaingan di era globalisasi yang semakin kompetitif menuntut SDM untuk terus menerus mampu mengembangkan diri, beradaptasi dan responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Globalisasi berpengaruh terhadap perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat di berbagai bidang. Hal ini dipacu dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat, sehingga interaksi informasi bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi maupun dalam melakukan transaksi. Salah satu kelemahan dalam peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kudus adalah rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. Penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata hanya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dari 8 tahun. Kondisi inilah yang selanjutnya menyebabkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kudus relatif rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja selanjutnya berdampak terhadap rendahnya pendapatan yang dapat dilihat dari tingkat pengeluaran yang rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan patut menjadi prioritas pembangunan selama dua puluh tahun mendatang. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dapat berhasil apabila diantaranya pemerintah dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus selama beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan, namun jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun masih relatif tinggi. Kondisi ini selanjutnya dapat menghambat peningkatan kualitas manusia karena dapat meningkatkan kesenjangan gender.

Kesenjangan gender dapat ditemukan di berbagai bidang, namun kesenjangan terbesar terjadi di bidang ekonomi. Secara ekonomi, pengeluaran perkapita perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki. Oleh karenanya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Upaya ini dapat diantaranya dapat dicapai dengan meningkatkan peran perempuan dan kedudukan peran dalam politik dan kepemimpinan. Selain kesenjangan gender, kesenjangan kualitas manusia juga ditemukan pada sebagian wilayah. Kualitas manusia yang relatif lebih rendah seringkali ditemukan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi atau ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang terbatas.

Upaya peningkatan ketahanan budaya khas Kudus masih menemui permasalahan seperti belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) juga belum optimal. Dalam rangka menuju masyarakat yang maju budayanya dalam peradaban harus tercipta lingkungan yang dinamis, inklusif dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap warisan budaya sambil tetap terbuka terhadap perkembangan baru dan perubahan yang positif. komitmen pemerintah bersama stakeholder terkait diperlukan dalam rangka menciptakan pondasi yang kokoh untuk pembangunan masyarakat yang maju secara budaya, didukung oleh SDM yang unggul dan berakhlak.

3. Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa

Selaras, konsisten dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten sekitar, upaya untuk mengubah citra pelayanan publik Pemerintah Daerah dari yang semula tercitrakan antara lain lambat, berbelit, tidak inklusif, biaya mahal dan tradisional. Cara reformasi tidak akan cukup jika digunakan untuk pembangunan 20 tahun ke depan.

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah tingkat Kabupaten maupun desa untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola mengandung makna melakukan perubahan menjadi hal yang baru dan lebih baik dengan hasil optimal/mencapai ultimate. Ruang lingkup tata kelola meliputi regulasi/kebijakan publik, kelembagaan, proses bisnis, manajemen talenta, meritokrasi

dan integritas, manajemen ASN dan perangkat desa, pelayanan dasar masyarakat, digitalisasi pelayanan publik (terutama pajak, retribusi, dan informasi harga pasar), relasi pemerintah dan masyarakat sipil termasuk dengan partai politik. Bagaimana pengelolaan kolaboratif, berintegritas dan adaptif atas ruang lingkup tersebut mampu mencapai kesejahteraan masyarakat Kudus untuk Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan.

Tata kelola desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan transformasi tata kelola karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. *Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman*

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui hendaknya dikelola seoptimal mungkin secara terencana dengan baik sehingga dari waktu ke waktu semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak dieksploitasi habis-habisan hanya demi kepentingan generasi sekarang.

Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dimanfaatkan dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan. Pola pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus tercermin dalam tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

Akibat pemanasan global, memicu terjadinya perubahan iklim. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan suatu upaya untuk mengantisipasi dampak risiko bencana dari perubahan iklim, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berupa permukiman, air minum dan

sanitasi yang layak dan aman berbasis ekologi yang akan meningkatkan daya tahan terhadap setiap perubahan lingkungan, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya air, infrastruktur dasar permukiman dan konservasi lingkungan hidup. Penataan ruang dalam pembangunan wilayah dilakukan untuk mengatasi dampak yang akan berkontribusi pada peningkatan pemanasan iklim mikro. Pembangunan yang seimbang antara pembangunan lingkungan fisik dan pelestarian lingkungan dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

b. Visi, Misi Kepala Daerah

VISI

Mempedomani sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 tahap 1, yaitu periode 2025-2029 yang terdiri dari 6 sasaran pokok yaitu terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak, meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan maka ditetapkan Visi **“Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa”**.

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut: **Sejahtera**. Sejahtera berarti keadaan atau kondisi yang mengarah pada kualitas hidup dalam suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang baik terpenuhi kebutuhan fisik, sosial ekonomi dan spiritualnya, sehat, bahagia dan berdaya. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.

Harmoni. Adalah keadaan atau kondisi di mana berbagai unsur atau elemen saling bekerja sama dengan seimbang dan selaras, sehingga tercipta kesatuan yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Harmoni dalam konteks masyarakat, adalah segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar individu, kelompok, maupun dengan lingkungan sekitar, berjalan dengan seimbang dan penuh kedamaian yang termanifestasikan menjadi pribadi dengan toleransi tinggi, empati, peduli dan gotong royong sehingga tercipta suasana kondusif untuk pertumbuhan dankesejahteraan bersama.

Taqwa. Adalah keadaan atau kondisi di mana ajaran agama dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di berbagai aspek kehidupan, menjaga akhlak, taat beribadah, santun, berbudi pekerti luhur sehingga menjadi tauladan, menghormati sesama dan menjaga keharmonisan. Manusia yang bertaqwa akan menjalankan tatakelola dengan baik di setiap tingkatan mulai dari individu sebagai pribadi sampai dengan kelompok sebagai unsur masyarakat, swasta maupun pemerintah.

MISI

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi terumus dalam misi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*

Ekonomi yang tumbuh baik didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata serta peran UMKM dan ekonomi kreatif. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan ketahanan pangan, dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kompeten, tingkat investasi yang terjaga, kecukupan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang didukung oleh potensi lokal dan kondusifitas yang stabil. Meningkatkan peran petani, PKL, santri dan generasi muda sebagai penggerak perekonomian.

2. *Mandiri Kesehatan dan Berdikari.*

Layanan kesehatan yang prima dan inklusif untuk seluruh masyarakat

termasuk difabel dan lansia, dengan ketersediaan tenaga kesehatan dengan rasio baik serta tersedianya peralatan medis dan saranaprasarana kesehatan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesehatan ibu dan anak menjadi komitmen Bupati periode 2025-2030. Perlindungan sosial yang adaptif melalui *Universal Health Coverage* (UHC) dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja/tenaga rentan. Pembangunan rumah sakit baru untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

3. *Pendidikan berkarakter, kearifan budaya*

Upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul, makadiperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk karakter dan menanamkan kearifan budaya. Pembangunan pendidikan didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan yang merata melalui peningkatan: nol anak putus sekolah, kesempatan belajar 13 Tahun, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menengah, pemberdayaan pondok pesantren, beasiswa untuk anak berprestasi tidak mampu, kesejahteraan guru madin dan guru swasta, serta pelestarian dan pengembangan budaya serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

4. *Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI*

Masyarakat Kudus diharapkan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam setiap sendi kehidupannya. Masyarakat yang memiliki keimanan kuat, beribadah dengan rutin, memiliki toleransi yang tinggi dan gotong royong serta menekankan pentingnya hidup bersama yang harmonis dalam kerangka NKRI sesuai nilai moral dan etika agama. Untuk mewujudkan ini maka menjadi komitmen Bupati untuk memberikan bantuan token/pulsa untuk tempat-tempat ibadah, kolaborasi yang baik dengan BAZNAS, melakukan pemerhatian tempat ibadah dan mendukung FKUB serta lintas agama.

5. *Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup*

Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, berupa peningkatan kualitas infrastruktur publik melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan akses dan konektivitas wilayah, infrastruktur digital, serta prasarana pertanian sebagai penunjang produktivitas. Program unggulan seperti Sapu Bersih (Saber) Jalan Berlubang, perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan prasarana pertanian, perwujudan penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang ditunjang sistem transportasi massal berbasis aglomerasi yang terpadu dan berkelanjutan, menjadi bagian integral dari penguatan infrastruktur wilayah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dilakukan

dengan mendorong cakupan rumah layak huni yang lebih luas, pengurangan kawasan kumuh, serta pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman baik di desa maupun kota. Penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak, aman serta berkelanjutan menjadi prioritas guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Kualitas lingkungan hidup memastikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat melalui konservasi alam, ketersediaan air, lahan dan udara yang berkualitas, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang mengimplementasikan teknologi modern dan berkelanjutan, serta mitigasi terhadap risiko bencana atas dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

6. *Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif*

Kinerja yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan harus dikelola secara baik sehingga mampu mengadaptasi perubahan lingkungan yang cepat secara profesional. Pengelolaan itu meliputi penggunaan sumber daya yang dimiliki secara jujur, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang modern serta digitalisasi.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Untuk mendorong percepatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu diterjemahkan dalam prioritas program akan menjadi akselerator perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Program prioritas pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2025–2029 :

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan Pendidikan.
 - c) Program Pengembangan Kurikulum.
 - d) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
 - e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - d) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
 - e) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - f) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - h) Program Penataan Bangunan Gedung.
 - i) Program Penyelenggaraan Jalan.
 - j) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengembangan Perumahan
 - c) Program Kawasan Permukiman.
 - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - c) Program Penanggulangan Bencana.
 - d) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- 6) Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pemberdayaan Sosial.
 - c) Program Rehabilitasi Sosial.
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - e) Program Penanganan Bencana.
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - c) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - d) Program Penempatan Tenaga Kerja.
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Program Perlindungan Perempuan.
 - c) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
 - d) Program Perlindungan Khusus Anak.
 - e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
 - 3) Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - 4) Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Program Penatagunaan Tanah.
 - 5) Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

- b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- i) Program Pengelolaan Persampahan.
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - c) Program pelayanan pencatatan sipil.
 - d) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Penataan Desa.
 - c) Program Peningkatan Kerja Sama Desa.
 - d) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - e) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Program Pengendalian Penduduk.
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
 - c) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- 9) Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 10) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat DPRD
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - c) Program Aplikasi Informatika.
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kecamatan
 - a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
 - b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
 - c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - d) Program Pengembangan UMKM.
- 12) Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - c) Program Promosi Penanaman Modal.
 - d) Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - f) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
 - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 14) Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 15) Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

- 16) Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengembangan Kebudayaan.
 - c) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - d) Program Pengelolaan Permuseuman.
 - 17) Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Program Pembinaan Perpustakaan.
 - 18) Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - a) Program Pengelolaan Arsip.
 - b) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
3. Urusan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 2) Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
 - b) Program Pema/saran Pariwisata.
 - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
 - 3) Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
 - e) Program Penyuluhan Pertanian.
 - 4) Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 5) Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - c) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - d) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
 - e) Program Pengembangan Ekspor.
 - f) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
 - g) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 6) Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota.
 - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
 - d) Program Hubungan Industrial.
- 7) Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
(Kegiatan Transmigrasi di RKPD 2025 tidak ada)

4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- 3) Kepegawaian, dilaksanakan oleh BKPSDM.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Kepegawaian Daerah.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh BKPSDM.
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5) Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 6) Sekretariat Daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan.
5. Unsur Pengawasan
 - 1) Inspektorat, dilaksanakan oleh Inspektorat.
 - a) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
6. Unsur Kewilayahan
 - 1) Kecamatan, dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
 - c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
 - e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
7. Unsur Pemerintahan Umum
 - 1) Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

- c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 - d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - e) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
 - f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja Perangkat Daerah)
- Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Pendidikan
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - b) Program Pengelolaan Pendidikan, dilaksanakan:
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
 - c) Program Pengembangan Kurikulum,
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- d) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
- 2) Kesehatan
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman :
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman

Tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga

- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Setra Makanan Jajanan
- e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/ Kota
 - e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - f) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - g) Program Penataan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - h) Program Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program pengembangan perumahan
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- c) Program Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
- d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c) Program Penanggulangan Bencana
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- d) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- 6) Sosial
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Pemberdayaan Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - e) Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Tenaga kerja
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Perencanaan Tenaga Kerja
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - c) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga
Kerja
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit
Kompetensi
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - d) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan Antar kerja di Daerah Kab/ Kota
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di
Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
 - b) Program Perlindungan Perempuan
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
- c) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- d) Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota
- e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 3) Pangan
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pertanahan
 - a) Program Penatagunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu
Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Lingkungan Hidup
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
(KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)
Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/
atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat
Daerah Kab/ Kota
 - h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota
 - i) Program Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Sampah

- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Pendaftaran Penduduk
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - c) Program Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil
 - d) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Penataan Desa
Penyelenggaraan Penataan Desa
 - c) Program Peningkatan Kerjasama Desa
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - d) Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- e) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Program Pengendalian Penduduk
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/ Kota
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota
 - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 9) Perhubungan.
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota

10) Komunikasi dan Informatika

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c) Program Aplikasi Informatika
 - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota

- c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - d) Program Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- 12) Penanaman Modal
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota
 - c) Program Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
 - d) Program Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
 - f) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota

13) Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

14) Statistik

- a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota

15) Persandian

- a) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

16) Kebudayaan

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Pengembangan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota
 - d) Program Pengelolaan Permuseuman
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- 17) Perpustakaan
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Pembinaan Perpustakaan
 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 18) Kearsipan
- a) Program Pengelolaan Arsip
 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota
 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota

- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - b) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
- Urusan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan
 - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - 2) Pariwisata
 - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- 3) Pertanian
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kab/Kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota
 - e) Program Penyuluhan Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 4) Kehutanan
 - Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kab/Kota
- 5) Perdagangan
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- c) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- d) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota
- e) Program Pengembangan Ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- f) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- g) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 6) Perindustrian
 - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
 - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

d) Program Hubungan Industrial

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota

➤ fungsi penunjang urusan pemerintahan

1) Perencanaan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 2) Keuangan
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3) Kepegawaian
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Kepegawaian Daerah
 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 4) Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 5) Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

 - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 6) Sekretariat Daerah
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - c) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Unsur Pengawasan
 - 1) Inspektorat
 - a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi
- Unsur Kewilayahan
 - 1) Kecamatan
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
 - Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Unsur Pemerintahan Umum
- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

- Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
- d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang substansinya merupakan pelayanan dasar minimal yang harus diberikan oleh Pemerintah kepada warga masyarakat. Urusan dimaksud meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketertarikan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sangatlah penting untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga memberikan jaminan kepada

masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dasar yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar, serta menyediakan alokasi anggaran yang mencukupi untuk penerapannya.

Guna percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kudus memacu pelaksanaannya dengan menyusun Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus, membentuk Tim melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/40/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus, dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 100.1.6/201/2025 tentang Target Jumlah warga Negara dan Mutu Mnimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025. Dengan dibentuknya Tim dan penyusunan Target Jumlah warga Negara dan Mutu Mnimal Layanan, dimaksudkan untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam berkoordinasi dan konsolidasi internal guna penyelenggaraan pelayanan dasar yang lebih baik dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemenuhan SPM di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan secara optimal dan terkoordinir berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan landasan dalam penyelenggaraan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029.
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 130/40/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.
14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 100.1.6/201/2025 tentang Target Jumlah warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025.

c. Kebijakan umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat peraturan

perundang-undangan yang berlaku. SPM menjadi tolok ukur penyelenggaraan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penerapan SPM merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki komitmen yang serius agar setiap warga dapat memperoleh jaminan kualitas dari hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

d. Arah Kebijakan Penerapan SPM

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menuangkan rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar pelayanan Minimal Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029.

Langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menegaskan komitmen untuk segera melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

- Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus dengan menegaskan komitmennya terhadap penerapan SPM sebagai prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Integrasi dalam Perencanaan dan Penganggaran. Pengintegrasian rencana penerapan dan pencapaian SPM pada masing-masing bidang ke dalam dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD) dengan melibatkan TAPD.
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dengan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan SPM secara optimal.

- Monitoring dan Evaluasi Berkala. Pelaksanaan SPM dievaluasi secara berkala melalui sistem pelaporan kinerja berbasis indikator SPM dan dilakukan pelaporan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan.
- Kolaborasi dan Sinergi Antar LembagaPenerapan SPM dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, melalui pendekatan kolaboratif.
- Penguatan Sistem Informasi SPM Pemerintah Kabupaten Kudus akan mengembangkan sistem informasi yang mendukung pelaporan, monitoring, dan pengambilan keputusan dalam penerapan SPM.
- Menyusun Keputusan Bupati Kudus.tentang Target Layanan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 Kabupaten Kudus.

Fokus terkait pencapaian SPM tahun 2025 didasarkan pada penyelesaian permasalahan pokok bidang pelayanan dasar, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Arah Kebijakan Standar Pelayanan Minimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Urusan Wajib Bidang Pendidikan		
Masih rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas	Pemenuhan layanan mutu pendidikan belum dilaksanakan secara maksimal	Masih Ada sekitar 26,50% Sekolah yang belum terakreditasi A
		Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan belum sesuai standar penyelenggaraan yang dipersyaratkan
		Masih ada sekitar 4 % Tenaga Pendidikan non Kependidikan belum layak
		Masih Relatif kurangnya capaian atas kualitas hasil belajar ditandai dengan masih relatif rendahnya angka literasi numerasi masyarakat pada kisaran 1,68
	Pelayananan memperluas akses Pendidikan telah dilakukan tetapi belum optimal	Masih terdapat sarpras pendidikan dalam kondisi tidak baik sekitar 5 %
		Masih terdapat 5 % satuan pendidikan yang sarprasnya belum memenuhi standar
Urusan Wajib Bidang Kesehatan		
Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita	Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah
		Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar
		Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap
		Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i>
	Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular	Masih rendahnya Penemuan kasus TBC
		Masih tingginya prevalensi HIV
		Masih tingginya kasus DBD
		Belum optimalnya skrining kesehatan pada usia produktif, lansia, penderita diabetes melitus deteksi , hipertensi, dan ODGJ
	Belum optimalnya upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan	Belum optimalnya pelaksanaan Germas
	Belum optimalnya mutu layanan kesehatan	Belum optimalnya akreditasi RS
		belum semua klinik memperoleh akreditasi
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan
		Kurangnya kuantitas tenaga kesehatan pelayanan
		Kurangnya kualitas tenaga kesehatan pelayanan
Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum		
Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
		Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
		Belum terbangunnya system drainase pada daerah genangan air
	Belum optimalnya akses air minum masyarakat	Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi
	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang	Belum lengkapnya dokumen regulasi rencana tata ruang	Belum selesainya penyusunan regulasi rencana tata ruang
Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat		
Belum optimalnya Pemenuhan permukiman layak huni	Masih adanya rumah tidak layak huni	Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin
		Sulitnya masyarakat dalam

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	pemenuhan rumah layak huni
		Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
		Masih adanya permukiman kumuh
		Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah
		Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi
		Masih adanya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten
		Masih adanya rumah yang belum memliki akses air minum
Urusan Wajib Bidang Trantibum Linmas		
Belum optimalnya Penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penanganan aktivitas pertambangan
		Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penanganan aktivitas pertambangan
		Belum maksimalnya harmonisasi peran antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung penanganan ketertiban umum
	Rendahnya Tingkat reaksi layanan pemadam kebakaran	Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai
		Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih
		Terbatasnya jumlah pos damkar
		Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana	Belum optimalnya Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
		Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
		Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pd masyarakat
		Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat
Urusan Wajib Bidang Sosial		
belum optimalnya penanganan PPKS	Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan
	Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial	Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
	Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,21	77,94	0,94
2	Angka Kemiskinan	7,23	6,59	-8,85
3	Angka Pengangguran	3,19	3,23	1,25
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,83	0,98	-65,37
5	Pendapatan Per Kapita	145.620,190	148.383,75	1,90
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,324	0,299	-7,72

Sumber data : BPS Kabupaten Kudus

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	98,70 %	Disdikpora	
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,69 %	Disdikpora	
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	71,90 %	Disdikpora	
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	75,09 %	Disdikpora	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	80,87 %	Disdikpora	
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,03 %	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	3,73 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/ kota	90,59 %	Dinas PUPR	
		Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	92,90 %	Dinas PUPR	
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kab/kota	98,61 %	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,87 %	Dinas PUPR	
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	100,00 %	Dinas PUPR	
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	- %	Dinas PUPR	Tidak ada pantai
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100,00 %	Dinas PUPR	
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100,00 %	Dinas PUPR	
		Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	Dinas PUPR	
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan	100 %	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00 %	Dinas PKPLH	
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	103,53 %	Dinas PKPLH	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	61,10 %	Dinas PKPLH	
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100,00 %	Dinas PKPLH	
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100,00 %	BPBD	
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100,00 %	Satpol PP	
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100,00 %	Satpol PP	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00 %	BPBD	
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00 %	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,67 %	Satpol PP	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 .%	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	92,27 %	Dinsos P3AP2KB	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	90,24 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100,00 %	Disnaker Perinkop UKM	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00 %	Dinsos P3AP2KB	
9	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kab/ Kota	72,96 %	Dispartan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	80,56 %	Dinas PUPR	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	90,42 %	Dinas PUPR	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	16,67 %	Dinas PUPR	
11	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan	86,67 %	Dinas PKPLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota			
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	62,16 %	Dinas PKPLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,99 %	Dinas Dukcapil	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	87,72 %	Dinas Dukcapil	
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100,00 %	Dinas Dukcapil	
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99,40 %	Dinas Dukcapil	
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00 %	Dinas Dukcapil	
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00 %	Dinas Dukcapil	
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00 %	Dinas Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	- %	Dinas PMD	Tidak ada desa tertinggal
		Persentase peningkatan status desa mandiri	100,00 %	Dinas PMD	
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100,00 %	Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	91,90 %	Dinsos P3AP2KB	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	69,15 %	Dinsos P3AP2KB	
		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmetneed)	29,89 %	Dinsos P3AP2KB	
15	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,71	Dishub	
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,56	Dishub	
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0 %	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang	100,00 %	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	84,21 %	Dinas Kominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00 %	Dinas Kominfo	
17	Koperasi dan UKM	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	-12,79 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100,00 %	Disnaker Perinkop UKM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	16,05 %	Dinas BMPTSP	
		Realisasi total terhadap target investasi	165,24 %	Dinas BMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100,00 %	Disdikpora	
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	79,82 %	Disdikpora	
		Persentase atlet yang berasal dari kab/ kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	3,71 %	Disdikpora	
		Persentase jumlah atlet berprestasi	100,00 %	Disdikpora	
20	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	92,31 %	Dinas Kominfo	
21	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemda	74,84 %	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	99,59 %	Disbudpar	
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	10,38	Disbudpar	
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	57,59	Dinas Arpus	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	24,65	Dinas Arpus	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah	25,70 %	Dinas Arpus	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan pertanggungjawaban nasional			
25	Kelautan Perikanan	Persentase Produksi perikanan tangkap dan budidaya Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	100,00 % 31,74	Dispertan Pangan Dispertan Pangan	
26	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0,35 %	Disbudpar	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-42,62 %	Disbudpar	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-14,04 %	Disbudpar	
27	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	10,21 %	Dispertan Pangan	
		Peningkatan produksi hortikultura	39,03 %	Dispertan Pangan	
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	2,58 %	Dispertan Pangan	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	91,91 %	Dispertan Pangan	
28	Kehutanan		Tidak Perlu Diisi		
29	ESDM		0,00 %		
30	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	93,20 %	Dinas Perdagangan	
31	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kab/kota	99,25 %	Disnaker Perinkop UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kab/kota			
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	7,63 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di ka/ kota	0,66 %	Disnaker Perinkop UKM	
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	50,02 %	Disnaker Perinkop UKM	
32	Transmigrasi				

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
 Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100 %	Bapperida	
2	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	28,88 %	BPPKAD	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	29,31 %	BPPKAD	
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	62,25 %	BPPKAD	
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	39,18 %	BPPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Kelembagaan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55,77 %	BKPSDM	
4	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100 %	Bapperida	
5	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	Inspektorat	
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5,00	Inspektorat	
		Manajemen risiko Indeks	4,00	Inspektorat	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	95,99 %	Inspektorat	
6	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Bagian PBJ	
		Pemanfaatan sistem pengadaan	24,36	Bagian PBJ	
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	22,50	Bagian PBJ	
7	Hubungan dg Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat waktu	BPPKAD	24 Desember 2024
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	100,00 %	Setwan	
8	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	97,01	Bagian Organisasi	Penilaian Tahun 2024

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 2.4
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
dalam Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,65-77,22 Indeks
2.	Indeks Pendidikan	11,60 Indeks
3.	Angka Stunting	13,5 Persen
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6834 Indeks
5.	Angka Kemiskinan	6,76 Persen
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	10 Persen
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,13 Persen
8.	Pendapatan perkapita	142,97 Juta Rp
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,94-6,31 Persen
10.	Realisasi Investasi	1114 Milyar Rp
11.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7750 Indeks
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	89,92 Indeks
13.	Persentase Desa Mandiri	23 Persen
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	100 Indeks
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,633 Indeks
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	71,9 Indeks
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	69 Indeks
19.	Nilai SAKIP	71,8 Nilai
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,35 Indeks

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Adapun perbandingan capaian Indikator kinerja utama dengan target perjanjian kinerja diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,65-77,22 Indeks	77,94 Indeks	100,93
2.	Indeks Pendidikan	11,60 Indeks	11,50 Indeks	99,14
3.	Angka Stunting	13,5 Persen	13,20 Persen	102,2
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6834 Indeks	0,8231 Indeks	120,51
5.	Angka Kemiskinan	6,76 Persen	6,59 Persen	102,58
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	10 Persen	11,70 Persen	117
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,13 Persen	3,23 Persen	96,90
8.	Pendapatan Perkapita	142,97 Juta Rp.	NA	NA
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,94-6,31 Persen	NA	NA
10.	Realisasi Investasi	1114 Milyar Rp	1652 Milyar Rp	148,29
11.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7750 Indeks	NA	NA
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	89,92 Indeks	93,03 Indeks	103,46
13.	Persentase Desa Mandiri	23 Persen	63 Persen	273,91
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	100 Indeks	69,14	144,63
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka	0 Angka	100
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,633 Indeks	68,08 Indeks	120,21
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	71,9 Indeks	88,31* Indeks	122,81
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	69 Indeks	85,52 Indeks	123,94
19.	Nilai SAKIP	71,8 Nilai	74,07 Nilai	103,16
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,35 Indeks	4,08 Indeks	93,79

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya

Tabel 2.7

Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun						Perubahan (%) (N-(N-1))/N-1*100%
		2024			2025			
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,32-76,78 Indeks	77,21 Indeks	100,56	76,65-77,22 Indeks	77,94 Indeks	100,93	0,95
2.	Indeks Pendidikan	11,53 Indeks	11,32 Indeks	98,18	11,60 Indeks	11,50 Indeks	99,14	1,59
3.	Angka Stunting	14 Persen	3,77 Persen	371,07	13,5 Persen	13,20 Persen	102,2	-250,13
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6832 Indeks	0,7569 Indeks	110,79	0,6834 Indeks	0,8231 Indeks	120,51	8,75
5.	Angka Kemiskinan	6,96 Persen	7,23 Persen	96,12	6,76 Persen	6,59 Persen	102,58	8,85
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	8 Persen	3,42 Persen	42,75	10 Persen	11,70 Persen	117	242,11
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19 Persen	3,19 Persen	100	3,13 Persen	3,23 Persen	96,90	-1,25
8.	Pendapatan perkapita	139,78 Juta Rp	133,88 Juta Rp	95,78	142,97 Juta Rp	NA	NA	10,83
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,70-6,19 Persen	4,82 Persen	84,56	5,94-6,31 Persen	NA	NA	NA
10.	Realisasi Investasi	1108 Milyar Rp	1423,9 Milyar Rp	128,51	1114 Milyar Rp	1652 Milyar Rp	148,29	16,02
11.	Indeks Desa Membangun	0,7700 indeks	0,8135 Indeks	105,65	0,7750 Indeks	NA	NA	NA
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	89,09 Indeks	92,07 Indeks	103,34	89,92 Indeks	93,03 Indeks	103,46	1,04
13.	Persentase Desa Mandiri	22 persen	51,21 Persen	232,77	23 Persen	63 Persen	273,91	17,67
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	101 indeks	79,75 Indeks	126,65	100 Indeks	69,14	144,63	13,30
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka	0 Angka	100	0 Angka	0 Angka	100	0,00
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,997 Indeks	60,80 Indeks	117,81	56,633 Indeks	68,08 Indeks	120,21	11,97
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70 Indeks	83,16 Indeks	118,80	71,9 Indeks	88,31* Indeks	122,81	6,19
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	68 Indeks	85,53	125.76	69 Indeks	85,52 Indeks	123,94	-0,01

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun						Perubahan (%) (N-(N-1))/N-1*100%
		2024			2025			
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
19.	Nilai SAKIP	71,3 Nilai	73,20 Nilai	102,66	71,8 Nilai	74,07 Nilai	103,16	1,19
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25 Indeks	4,61 Indeks	108,47	4,35 Indeks	4,08	93,79	-11,50

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 memakai Indikator Kinerja Utama sesuai RPD Tahun 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 000.8.6.3/8/2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Rencana Pembangunan Daerah

Tabel 2.8
 Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Rencana Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,65-77,22 indeks	77,94 indeks	100	76,97-77,48 indeks	100,59
2.	Indeks Pendidikan	11,60 indeks	11,50 indeks	99,14	11,68 indeks	98,46
3.	Angka Stunting	13,5 persen	13,20 persen	102,2	13 persen	101,54
4.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6834 indeks	0,8231 indeks	120,51	0,6836 indeks	120,41
5.	Angka Kemiskinan	6,76 persen	6,59 persen	102,58	6,56 persen	99,54
6.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(yang mandiri	10 persen	11,70 persen	117	12 persen	97,50
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,13 persen	3,23 persen	96,90	3,08 persen	95,36
8.	Pendapatan perkapita	142,97 Juta Rp.	148,38 Juta Rp	103,78	146,16 Juta Rp.	101,52
9.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	5,94-6,31 persen	NA	NA	6,13-6,44 persen	NA
10.	Realisasi Investasi	1114 Milyar Rp.	1652 Milyar Rp.	148,29	1109 Milyar Rp.	148,96
11.	Indeks Desa Membangun	0,7750 indeks	NA	NA	0,7800 indeks	NA
12.	Indeks Pembangunan Kecamatan	89,92 Indeks	93,03 Indeks	103,46	90,59 Indeks	102,69

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
13.	Persentase Desa Mandiri	23 persen	63 persen	273,91	24 persen	262,50
14.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	100 indeks	69,14 indeks	144,63	99 indeks	143,19
15.	Angka Konflik Sosial	0 Angka	0 Angka	100	0 Angka	100
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,633 indeks	68,08 indeks	120,21	57,270 Indeks	118,88
17.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	71,9 indeks	88,31* indeks	122,81	73 Indeks	120,97
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	69 indeks	85,52 indeks	123.94	70 Indeks	122,17
19.	Nilai SAKIP	71,8 nilai	74,07 nilai	103,16	72,20 Nilai	102,59
20.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,35 indeks	4,08	93,79	4,45 Indeks	91,69

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Realisasi tujuan meningkatnya daya saing Sumber Daya Manuasia (SDM) dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Formula Penghitungan Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manuasia (SDM)

No	Tujuan	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manuasia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata geometrik dari Indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manuasi (SDM) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026(%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,56	76,32-76,78 indeks	77,94 indeks	100,93	76,97-77,48 indeks	100,59
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	100,56			100,93		100,59

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, BPS, dan Bapperida Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan meningkatnya daya saing Sumber Daya Manuasi (SDM) Tahun 2025

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 100,93% Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,37 dari capaian rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 100,56 %

2. Analisis Hasil (kinerja) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus pada tahun 2025 mencapai 77,94, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 77,21. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kudus berada pada kategori pembangunan manusia “tinggi” dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah .

Peningkatan IPM Kabupaten Kudus tahun 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh komponen pembentuknya, meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2025 mencapai 77,21 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 77,07 tahun. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

Pada dimensi pengetahuan, kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus menunjukkan hasil yang positif. Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2025 mencapai 13,49 tahun, meningkat dari 13,28 tahun pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah di Kabupaten Kudus memiliki peluang yang semakin besar untuk mengenyam pendidikan hingga setara jenjang pendidikan menengah atas. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,35 tahun pada tahun 2024 menjadi 9,51 tahun pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan penduduk dewasa secara berkelanjutan.

Pada dimensi standar hidup layak, yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, Kabupaten Kudus pada tahun 2025 mencapai Rp12.842 ribu per kapita per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar

Rp12.533 ribu. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat serta kontribusi positif sektor ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk .

Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Kudus tahun 2025 mencerminkan hasil dari sinergi kebijakan lintas sektor dalam pembangunan manusia. Peningkatan pada seluruh komponen IPM menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kudus diharapkan terus memperkuat intervensi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat guna menjaga keberlanjutan peningkatan IPM serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kudus secara optimal.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan adalah 100,93% atau Sangat Tinggi

2. *SDM yang unggul dan berbudaya*

Realisasi sasaran SDM yang unggul dan berbudaya dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Formula Penghitungan SDM Unggul dan Berbudaya

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	SDM yang unggul dan berbudaya	Indeks Pendidikan	(Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) + Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dibagi 2
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Rata-rata dari nilai tujuh variabel indeks kelompok indikator (sub indeks) atau Jumlah total nilai tujuh variabel indeks kelompok indikator (sub indeks) dibagi 7
		Angka Stunting	Jumlah balita dengan kategori stunting (pendek dan sangat pendek) dari hasil pengukuran tinggi badan per umur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah balita yang diukur pada wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.12
 Capaian Kinerja Sasaran SDM yang unggul dan berbudaya
 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026(%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pendidikan	98,18	11,53 indeks	11,50 indeks	99,74	11,68 indeks	98,46
2.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	110,79	0,6832 indeks	0,8231 indeks	120,48	0,6836 indeks	120,41
3.	Angka Stunting	371,07	13,5 persen	13,20 persen	102,27	13 persen	98,49
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	193,35			107,50		105,79

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, BPS, Dinas Pendidikan, DKK dan Bapperida Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran SDM yang unggul dan berbudaya tahun 2025

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 107,50% Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 85,85 dari capaian rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 193,35%

- a. Analisis Hasil (kinerja) Indeks Pendidikan

Angka capaian kinerja IKU Indeks Pendidikan tahun 2025 sebesar 99,74%.

Formulasi Perhitungan Indek Pendidikan adalah :

$$\frac{(\text{Rata-rata Lama Sekolah (RLS)} + \text{Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)})}{2}$$

$$\frac{9,51 + 13,49}{2} = 11,50$$

Indeks pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,49 tahun. Angka ini meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun 2024 sebesar 13,28

Berikut ini adalah beberapa data terkait Indeks pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 :

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2025 adalah 9,51 tahun (setara kelas 9)
- Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 adalah 13,49 tahun

**PENGHARGAAN YANG DI PEROLEH DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS 2025**

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
1.	NARENDRA SHEVA AHMAD PRATAMA	Tenis Meja Tunggal Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SD/MI/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
2.	KHEIREEN ALYAAH PRIAWAN	Tenis Meja Tunggal Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SD/MI/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
3.	ABQARY RAYYAN NARESWARA	Anggar Floret Beregu Putra	Perak Juara 2 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
4.	MUHAMMAD GERY AGNAR TIMUR	Anggar Floret Beregu Putra	Perak Juara 2 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
5.	ARSYA DWI SOFYAN	Anggar Floret Beregu Putra	Perak Juara 2 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
6.	ARSYA DWI SOFYAN	Anggar Floret Individu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
7.	DAZACKA ARAMALEZ RIDLO AL WIYATNA	Anggar Floret Individu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
8.	FAREL ANTONY	Anggar Floret Individu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
9.	MUHAMMAD GERY AGNAR TIMUR	Anggar Floret Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
10.	DAZACKA ARAMALEZ RIDLO AL WIYATNA	Anggar Floret Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
11.	CINTYA INGGITA PINASTHIKA	Gulat Bebas 54 Kg Putri	Perak Juara 2 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
12.	MUHAMMAD RIZKI HANDRIYATM OKO	Gulat Bebas 50 Kg Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
13.	NISA ULFIYAH	Gulat Bebas 42 Kg Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
14.	RAHMA ELENA RINJANI	Pencak Silat Kelas G (48 - 51 Kg) Putri	Emas Juara 1 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
15.	MAULIDIA FIKY ROSYADA	Pencak Silat Kelas C (36 - 39 Kg) Putri	Perak Juara 2 POPDA SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
16.	ADIZA MEISYA SALSABILLA	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
17.	ATTAYA PUTRI NURAFIANTY	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
18.	DANEA BRENDA SUSANTO	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
19.	FEBYOLA SWEET SANDAY FIVE VE	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
20.	FIDELA ISNA LATHIFAH	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
21.	INTAN APRILIA KARTIKA SARI	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
22.	JESSICA MEDINA SANTOSA	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
23.	JIHAN PUTRI AMELLIA	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
24.	MARIA ANABELLE CHRISTIANDI	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
25.	NANDYA SYTA AZZAHRA	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
26.	NAZNIN AQILA NAJYA	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
27.	TSAZKIYA HASNA RAHMAWATI	Bola Basket Beregu Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
28.	ADITYA YUSRO SAPUTRO	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
29.	BAYU SAPUTRA	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
30.	BIMA EZZRA RAHARDIAN	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
31.	DIMAS BAYU IKHSAN NUR	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
32.	HABIB HASAN AL AMPRI	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
33.	HAFIDZ WARDHANA	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
34.	HAIDAR HAQI HARYANTO	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
35.	MIFTAHUL OCTAVIAN	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
36.	MUHAMAD FAHMI ABI BASTIAN	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
37.	MUHAMMAD ALDILA IBNU ZAKARIYA	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
38.	MUHAMMAD RRIZQI BAIHAQI MULYAWAN	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
39.	NABIL IRFAN FAUZI	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
40.	WAHYU PUTRA PRATAMA	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
41.	YUSUF BACHTIAR	Bola Basket Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
42.	NAZWAN ABDILLAH	Bulutangkis Tunggal Putra	Emas Juara 1 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
43.	WULAN SEPTIANA	Judo kelas 44 - 48 Kg Putri	Perak Juara 2 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
44.	NABILA PUTRI PRASTYO	Judo kelas -44 Kg Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
45.	ZAHRA TALITA SYIFA	Menembak 33m Multirange 3 Position Putri	Perak Juara 2 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
46.	MUHAMMAD MUHTADAL ANAM	Panjat Tebing Speed Klasik Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
47.	REYNO ANDIKA	Pencak Silat Kelas A (39 - 43 Kg) Putra	Perak Juara 2 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
48.	BHANURASMI GALUH MAHESWARI	Pencak Silat Kelas B (43 - 47 Kg) Putri	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
49.	ALEXANDRE AKBAR HAQIKI	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
50.	ANDHIKA RIZQI SETYAWAN	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
51.	ANDREAN KISWARI	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
52.	ANUGERAH TALENTA GERRARDO PUTRA	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
53.	ARIF BIMA PRASTYO	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
54.	ARKA ZINEDINE JENAR AMORA	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
55.	BAGAS REZKYFIANTO	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
56.	DAMAR HASAN NAWAWI	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
57.	GHUFRAN ALGAZALY SYAHPUTRA CONORAS	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
58.	HAFIZ ANDHIKA PRATAMA	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
59.	ILHAM RAMADHANI SAPUTRA	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
60.	KELANG ARYASUTA ASMORO	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/ MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
61.	Kabupaten Kudus	Lomba Seni Macapat Islami Putri	Juara 2	
62.	Kabupaten Kudus	Lomba Cabang Cerita Islmi Putra	Juara 1	
61.	MOHAMMAD ALFA FAUZI	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
62.	MUHAMAD SEPTIAN DIKA PRATAMA	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
63.	RIYAN HERI SUSANTO	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
64.	SABASTIAN BIMA PERMANA	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
65.	SATRIA DWI ABIMANYU	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
66.	ZAIDAAN RO'UF HERMAWAN	Sepak Bola Beregu Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
67.	DEFIA MARCELLIA INDRIANI	Tinju Kelas - 51 Kg Putri	Perak Juara 2 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
68.	FAISAL RIZKI	Tinju Kelas 51 - 54 Kg Putra	Perunggu Juara 3 POPDA SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2025 Tingkat Jawa Tengah	
69.	KEYSHA ANGGUN NADYA LAKSITA	Bidang Seni Budaya	Juara 2 Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	
70.	GRISALDA JETH JAN'MA GAYATRI	Vokal	Juara 3 Lomba Solo Vocal - Jambore Pemuda Jawa Tengah	
71.	GRISALDA JETH JAN'MA GAYATRI	Vocal Song	Juara 1 Lomba Vocal Song Kegiatan Lomba Seleksi Jambore Pemuda Daerah Tingkat Kabupaten Kudus	
72.	RANIA SALWA RAFSANJANI	Tari Kreasi	Juara 1 Lomba Tari Kreasi Kegiatan Lomba Seleksi Jambore Pemuda Daerah Tingkat Kabupaten Kudus	
73.	RESPATI MANIK KUSUMA	Poster	Juara 1 Lomba Poster Kegiatan Lomba Seleksi Jambore Pemuda Daerah Tingkat Kabupaten Kudus	
74.	MUHAMMAD ULIL ALBAB	Pidato Bahasa Jawa	Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Jawa Kegiatan Lomba Seleksi Jambore Pemuda Daerah Tingkat Kabupaten Kudus	
75.	MUHAMMAD ZIKRI ROBBY PAMEKAS	Lomba Pidato Bahasa Inggris	Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris Kegiatan Lomba Seleksi Jambore Pemuda Daerah Tingkat Kabupaten Kudus	

NO	NAMA PESERTA	CABOR	MEDALI/ JUARA	DOKUMENTASI
76.	AFIFNA RISFA ANASTASYA	1 Lomba Kaligrafi	Juara 1 Lomba Kaligrafi Kegiatan Lomba Seleksi Jambore Pemuda Daerah Tingkat Kabupaten Kudus	
77.	MIFTAH FARID, S.Pd	Apresiasi GTK Transformatif - Kategori Guru TK	Juara 1 Apresiasi GTK Transformatif - Kategori Guru TK	
78.	Hilfa Millati Azka, S.Pd.,M.Pd.,Gr	Apresiasi GTK Dedikatif Tingkat Nasional - Kategori	Juara 3 Apresiasi GTK Dedikatif Tingkat Nasional - Kategori Kepala TK	
79.	Hilfa Millati Azka, S.Pd.,M.Pd.,Gr	Apresiasi GTK	Juara 1 Apresiasi GTK tahun 2025 Provinsi Jawa tengah	
80.	ERVI ROSMAYANTI, S.Pd., M.Pd	Apresiasi GTK	Juara 3 Apresiasi GTK Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah - Kategori Pengawas Sekolah Dikdas Dedikatif	

b. Analisis Hasil (kinerja) Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) :

Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2025 sebesar 120,27%.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. IPKM disusun berdasarkan 30 indikator yang terkelompok dalam tujuh subindeks, yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Realisasi IPKM Kabupaten Kudus menunjukkan tren peningkatan yang

positif. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menunjukkan nilai IPKM tahun 2024 sebesar 0,7569 dan meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 0,8231. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya pada tingkat layanan dasar melalui Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Capaian IPKM yang relatif tinggi juga menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus secara umum.

Meskipun secara umum capaian IPKM di Kabupaten Kudus telah berada pada kategori baik dan cenderung meningkat, ke depan tetap perlu adanya kebijakan pembangunan kesehatan yang mengarah pada penguatan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan merata, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku hidup sehat. Selain itu, diperlukan penguatan program kesehatan reproduksi yang terintegrasi dan berbasis siklus hidup, guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Analisis Hasil (kinerja) Angka Stunting :

Angka capaian kinerja IKU Angka Stunting tahun 2025 sebesar 102,27%

Angka stunting merupakan salah satu indikator kunci pembangunan kesehatan yang mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok balita yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain asupan gizi yang tidak optimal, pola asuh, akses layanan kesehatan, sanitasi lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi. Penentuan target angka stunting di Kabupaten Kudus mengacu pada hasil survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada akhir tahun 2024 (dipublikasikan pada pertengahan tahun 2025) menunjukkan angka stunting di Kabupaten Kudus sebesar 13,2%, angka tersebut melampaui target dengan capaian sebesar 102,2% dan menurun jika dibandingkan dibandingkan hasil survei sebelumnya (15,7%). Sedangkan data e-PPGM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) menunjukkan angka stunting tahun 2025 sebesar 3,7%,

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 (4,03%). e-PPGM merupakan pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik yang dapat merekam data balita dan hasil penimbangan, terutama di posyandu serta mengolah hasil input data tersebut menjadi status gizi. Penurunan angka stunting mengindikasikan efektivitas pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Meskipun demikian tetap memerlukan penguatan upaya pencegahan dan penanganan secara konsisten dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat.

Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kudus didukung adanya penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas layanan, antara lain: pendampingan kasus stunting dengan dokter spesialis di rumah sakit di Kabupaten Kudus, dukungan lintas sektor dan swasta melalui pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) tinggi protein, serta implementasi inovasi daerah Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) dan Kedai Balita Si Cantik yang memperkuat intervensi spesifik dan sensitif secara berkelanjutan melalui edukasi, pendampingan gizi, dan pemenuhan kebutuhan pangan balita.

Faktor yang mendorong tercapainya angka prevalensi stunting antara lain :

- 1). Adanya kolaborasi yang melibatkan dokter spesialis di 7 Rumah Sakit (RSI Sunan Kudus, RS Kumala Siwi, RS Sarkies 'Aisyiyah, RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus, RS Mardi Rahayu, RS 'Aisyiyah, serta RSU Nurussyifa);
- 2). Adanya bantuan dan CSR dari Pihak Swasta dan OPD lainnya berupa pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Tinggi Protein;
- 3). Pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus)) bagi balita stunting.

Selain itu juga ada 2 inovasi yang dilakukan untuk percepatan penurunan kasus stunting, yaitu :

- 1). Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) yang meliputi Pelayanan “Kelas CANTIK” di semua Puskesmas setiap minggunya, pendampingan penanganan masalah gizi dan tumbuh kembang, dan kampanye perubahan perilaku;
- 2). Kedai Balita Si Cantik, yaitu berupa penyediaan makanan bergizi bagi balita.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 107,50% atau **Sangat Tinggi**

3. *Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat*

Realisasi Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Formula Penghitungan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No.	Tujuan	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Perbandingan antara rata-rata dari perhitungan garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita dan jumlah penduduk

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		202	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Kemiskinan	96,12	6,76 persen	6,59 persen	102,58	6,56 persen	99,54
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	96,12			102,58		99,54

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, Bapperida Kabupaten Kudus Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan meningkatnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat tahun 2025
Capaian kinerja rata-rata tujuan sebesar 102,58% Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,46% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 96,12 %
2. Analisis hasil (kinerja) Angka Keniskinan.
Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan Tahun 2025 sebesar 102,58%.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kemiskinan Kabupaten Kudus pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **sangat positif dan progresif**. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, **persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus tercatat sebesar 6,59 persen**, mengalami penurunan **0,64 persen poin**

dibandingkan tahun 2024 yang sebesar **7,23 persen**. Penurunan ini melanjutkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten sejak tahun 2021.

Sejalan dengan penurunan persentase, **jumlah penduduk miskin** di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 tercatat sebanyak **60,37 ribu orang**, berkurang **5,32 ribu orang** dibandingkan tahun 2024 dan **4,79 ribu orang** dibandingkan tahun 2023. Capaian ini menjadikan Kabupaten Kudus sebagai **kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah di wilayah eks-Karesidenan Pati**, serta termasuk kelompok kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan **lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (9,48 persen) dan nasional (8,47 persen)**.

Perbaikan kondisi kemiskinan juga tercermin dari indikator kualitas kemiskinan. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)** menurun dari **1,02 pada tahun 2024 menjadi 0,77 pada tahun 2025**, sementara **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)** turun dari **0,24 menjadi 0,15** pada periode yang sama. Penurunan kedua indikator ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin kecil, sehingga kemiskinan yang ada cenderung tidak semakin parah .

Di tengah capaian tersebut, **Garis Kemiskinan Kabupaten Kudus** pada tahun 2025 tercatat mengalami kenaikan menjadi **Rp576.195 per kapita per bulan**, meningkat dari **Rp550.075** pada tahun sebelumnya. Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat akibat dinamika harga. Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan di tengah kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa **daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat Kudus relatif terjaga** .

Keberhasilan penurunan kemiskinan di Kabupaten Kudus tidak terlepas dari berbagai **kebijakan dan program pengentasan kemiskinan** yang berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan. Program tersebut antara lain meliputi bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu, beasiswa pendidikan, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, BLT DBHCHT bagi buruh rokok, bantuan perumahan tidak layak huni, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, intervensi gizi bagi balita stunting, subsidi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah, serta dukungan terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian IKU kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2025 mencerminkan **efektivitas kebijakan pembangunan sosial-ekonomi daerah**. Penurunan signifikan tingkat, kedalaman, dan keparahan kemiskinan menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah ke depan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 102,58% atau **Sangat Tinggi**

4. *Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya*

Realisasi Sasaran meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.15
Formula Penghitungan Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Mandiri	Jumlah PPKS Mandiri dibagi Jumlah PPKS ditahun yang sama dikali 100 %

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mandiri	42,75	10 persen	11,70 persen	117	12 persen	97,50
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	42,75			117		97,50

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, BPS, Dinas Sosial P3A P2 KB Kabupaten Kudus Tahun 20245

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya tahun 2025
Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 117% Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 74,25% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 42,75 %
- 2. Analisis hasil (kinerja) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya :

Angka capaian kinerja IKU meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya tahun 2025 sebesar 117%.

PPKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial RI yang diberikan kepada Keluarga miskin atau rentan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial PKH ada beberapa tahapan salah satunya graduasi. Graduasi adalah tahapan di mana berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, baik karena sudah tidak ada komponen maupun karena ada perbaikan kondisi sosial ekonomi.

Jumlah PPKS yang tergraduasi setelah
mendapat bantuan sosial

Formula Perhitungan : ----- x 100

Jumlah PPKS yang mendapat bantuan Sosial

Tabel 2.17
Data Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tergraduasi Tahun 2021-2025

Indokator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PPKS (PKH) yang tergraduasi	2.282	962	452	805	3028
Jumlah KPM (PKH)	19.835	24.734	21.843	23.550	25.873
Persentase	11,50	3,90	2,07	3,40	11,70

Sumber data : Dinas Sosial P3A P2 KB Kabupaten Kudus Tahun 2025

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 117% atau **Sangat Tinggi**

5. *Menurunnya Pengangguran*

Realisasi Sasaran menurunnya pengangguran dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sbb :

Tabel 2.18

Formula Penghitungan menurunnya pengangguran

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2025

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya pengangguran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	100	3,13 persen	3,23 persen	96,90	3,08 persen	95,36
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	100			96,90		95,36

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, BPS, Dinas Naker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran menurunnya pengangguran tahun 2025

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 96,90%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4,64% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 100 %

2. Analisis hasil (kinerja) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 sebesar 96,90%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus pada tahun 2025 tercatat sebesar **3,23 persen**. Angka ini mengalami kenaikan tipis sebesar **0,04 persen poin** dibandingkan tahun 2024 yang sebesar **3,19 persen**, namun masih menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yang mencapai **3,25 persen** . Secara umum, TPT Kabupaten Kudus tergolong **rendah** dan berada di bawah **TPT Provinsi Jawa Tengah (4,66 persen)** maupun

TPT nasional (4,85 persen), yang mencerminkan relatif baiknya daya serap pasar kerja di daerah.

Capaian TPT tersebut terjadi di tengah meningkatnya dinamika ketenagakerjaan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus mencapai **694,46 ribu orang**, meningkat **8,33 ribu orang** dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** juga meningkat menjadi **75,72 persen**, naik **0,19 persen poin** dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya partisipasi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yang secara alami turut menambah tekanan terhadap pasar kerja.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk bekerja pada tahun 2025 mencapai **508,81 ribu orang**, bertambah **7,10 ribu orang** dibandingkan tahun 2024. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor **pertanian** dan **jasa-jasa**, sementara sektor **manufaktur** mengalami penurunan kontribusi tenaga kerja. Struktur ketenagakerjaan Kabupaten Kudus masih didominasi oleh sektor manufaktur dan jasa, yang masing-masing menyerap sekitar **44 persen** tenaga kerja, mencerminkan karakteristik perekonomian daerah yang berbasis industri dan jasa .

Dilihat dari karakteristik pengangguran, TPT tahun 2025 lebih tinggi pada **laki-laki (4,40 persen)** dibandingkan **perempuan (1,78 persen)**. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, TPT tertinggi masih terdapat pada angkatan kerja berpendidikan **perguruan tinggi (4,24 persen)**, meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, yang perlu direspons melalui penguatan link and match pendidikan dan dunia usaha serta industri.

Secara keseluruhan, capaian TPT Kabupaten Kudus tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ketenagakerjaan masih berada pada jalur yang relatif stabil dan terkendali. Meskipun terjadi kenaikan tipis TPT dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan dinamika struktural sektor usaha. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu terus memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan sektor-sektor produktif agar penurunan TPT dapat terus dijaga dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kudus secara berkelanjutan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 96,90 % atau **Sangat Tinggi**

6. Transformasi ekonomi yang berdaya saing.

Realisasi Tujuan Transformasi ekonomi yang berdaya saing dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.20
Formula Penghitungan Transformasi ekonomi yang berdaya saing

No	Tujuan	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	PDRB Perkapita	Produk Domestik Regional Broto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB dibagi Jumlah Penduduk

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Tujuan Transformasi ekonomi yang berdaya saing Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendapatan perkapita	95,78	142,97 Juta Rp.	NA	NA	146,16 Juta Rp.	NA
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	84,56		NA	NA		NA

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2014-2026, Bappeda Tahun 2024 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan tahun 2025
- Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 103,78%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 95,78%
2. Analisis hasil (kinerja) Pendapatan perkapita
- Pada indikator Pendapatan per Kapita, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar Rp148,38 juta, melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp142,97 juta. Dengan demikian, indikator ini dinilai tercapai dengan tingkat capaian 100 persen. Tingginya pendapatan per kapita tersebut mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 103,78 % atau **Sangat Tinggi**.

7. *Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau (IHT).*

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Formula Penghitungan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	$\frac{((\text{PDRB tanpa IHT Tahun } n - \text{PDRB tanpa IHT Tahun } n-1))}{\text{PDRB Tanpa IHT Tahun } n-1} \times 100\%$

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembakau Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	84,56	5,94-6,31 persen	NA	NA	6,13-6,44 persen	NA
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	84,56		NA	NA		NA

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2014-2026, Bapperida Tahun 2025 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2025
- Untuk Realisasi Tahun 2025 Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau Kabupaten Kudus belum rilis dari BPS.
2. Analisis hasil (kinerja(Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau :
- Adapun untuk indikator Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau, hingga saat ini data realisasi belum dirilis oleh instansi statistik terkait, sehingga capaian indikator tersebut belum dapat dilakukan evaluasi. Indikator ini tetap menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat kinerja

pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih mencerminkan dinamika sektor ekonomi selain industri hasil tembakau Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah belum rilis dari BPS.

8. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Realisasi Sasaran Terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Formula Penghitungan Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif	Realisasi Investasi	Jumlah modal dibagi investasi oleh penanam m//odal atau pelaku usaha yang ada di wilayah tertentu pada internal waktu tertentu

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Realisasi Investasi	128,52	1114 Milyar Rp	1652 Milyar Rp	148,29	1109 Milyar Rp	148,96
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	128,52			148,29		148,96

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2014-2026 dan DPMPSTSP Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2025
- Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 148,29%. Angka tersebut meningkat sebesar 19,77% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 128,52%.
2. Analisis hasil (kinerja) Realisasi Investasi :
- Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP Tahun 2025 untuk mencapai tujuan terciptanya iklim investasi yang kondusif sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 adalah Realisasi Investasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 1.114 Milyar dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2025 sebesar 1.652 Milyar (148,29%).
- Pada tahun 2024 dilakukan perubahan target indikator kinerja realisasi investasi karena pada triwulan III Tahun

2024 realisasi investasi telah mencapai 1.162 Milyar yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Target Kinerja.

Berdasarkan Berita Acara Perubahan Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 000.7.2.2/01908.1/2024 tanggal 12 Desember 2024 bahwa Indikator Realisasi Investasi mengalami perubahan besaran target menjadi 1.220 Milyar pada tahun 2025 dan 1.281 Milyar di tahun 2026. Dengan besaran target yg baru maka prosentase capaian IKU tahun 2025 sebesar 135,4%.

Untuk mencapai target indikator kinerja utama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 37 sub kegiatan. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian target realisasi investasi antara lain Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Seluruh Program telah terlaksana dengan capaian kinerja >90% (predikat kinerja “Sangat Tinggi”).

Faktor Pendukung pencapaian target IKU antara lain:

1. Pelayanan pendampingan perizinan dan konsultasi OSS dan Non OSS di Gerai MPP, pelayanan pendampingan perizinan dan konsultasi OSS (Panglima BOSS) di CFD, fasilitasi NIB berdasarkan permintaan dari Desa/Kecamatan/dinas dalam even tertentu, pendampingan NIB untuk KDMP dan layanan jemput bola kelompok marjinal berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan Bimtek OSS dan LKPM, serta FGD penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha telah terlaksana sesuai rencana.
3. Semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku usaha tentang kewajiban penanaman modal yang harus dipenuhi.
4. Koordinasi intensif dengan OPD pemegang hak akses perizinan dan pengawasan melalui rapat evaluasi triwulanan berjalan dengan baik.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 148,29% atau **Sangat Tinggi**.

9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Realisasi Sasaran Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.26
Formula Perhitungan Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi dari KemenPAN RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024		2025			
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	119,18	71,9 Indeks	88,31* Indeks	122,81 Indeks	73	120,97
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	119,18			122,81		120,97

Sumber data :RPD Kabupaten Kudus 224-2026, Bagian Organisasi Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2025
- Untuk Realisasi Tahun 2025 untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kudus hasil sementara Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB sebesar 88,31 Indeks.
2. Analisis hasil (kinerja) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) :
- Hasil Sementara Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 dari KemenPAN RB adalah :
- RB General Awal

77,1
- Koefisien

0
- RB General

77,1
- Total Bobot RB General

100
- Bobot RB General Penyesuaian

100
- RB General Penyesuaian

77,1
- RB Tematik

11,21
- Indeks RB

88,31
- Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 122,81% atau Sangat Tinggi.

10. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah

Realisasi Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.28
Formula Perhitungan Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai hasil evaluasi dari KemenPAN RB
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks untuk kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang terdiri dari 6 Dimensi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3. Transparasi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini BPK atas LKPD
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai hasil evaluasi dari KemenPAN RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Pemerintah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SAKIP	102,66	71,8 Nilai	74,07 Nilai	103,16	72,20 Nilai	102,59
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	125,76	69 Indeks	85,52 indeks	123,94	70 Indeks	122,19
3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	108,47	4,35 Indeks	4,08 Indeks	93,79	4,45 Indeks	91,69
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	112,30			106,96		105,49

Sumber data :RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, Bagian Organisasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2025
Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 106,96%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 5,34% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 112,30%.
2. Analisis hasil (kinerja) Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Pemerintah :
 - a. Angka capaian kinerja IKU Nilai SAKIP tahun 2025 dari KemenPAN RB adalah 74,07 Nilai
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan nilai 74,07 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025 dari KemenPAN RB adalah:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dengan catatan sebagai berikut :
 - a) Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyampaikan Matriks Tindak Lanjut pada bulan Maret dan sebagian rekomendasi sudah ditindaklanjuti.
 - b) Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun RPJMD periode 2025–2029 dengan kualitas yang lebih baik, berorientasi hasil, serta dilengkapi dengan indikator yang memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound (SMART) dan prinsip kecukupan. Namun demikian, perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) pada tingkat Perangkat Daerah (PD) masih dalam proses penyusunan dan belum disampaikan melalui laman esr.menpan.go.id, sehingga keselarasan dan kualitas perencanaan pada tingkat PD belum dapat dinilai.
 - c) Identifikasi crosscutting kinerja lintas sektor belum terpetakan dengan baik sehingga pola kolaborasi dengan stakeholder apa saja yang terlibat dalam mendukung kinerja lintas sektor belum terlihat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis.
 - d) Penjenjangan kinerja yang disusun di level Pemda dan PD belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF). Penjenjangan kinerja pada PD juga belum menggambarkan pola cross cutting kinerja antar unit kerja.

Rekomendasi :

1. Mendorong percepatan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD melalui laman esr.menpan.go.id, sehingga keselarasan dan kualitas perencanaan kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dapat dinilai dan digunakan sebagai dasar pengendalian serta evaluasi kinerja.
 2. Melakukan identifikasi potensi crosscutting kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kabupaten Kudus. Sehingga dapat tergambar bagaimana hubungan kinerja antar lintas PD maupun dengan stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
 3. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan CSF untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dengan catatan sebagai berikut :
- a) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah yang disampaikan melalui laman esr.menpan.go.id belum diselaraskan dengan RPJMD periode 2025–2029 yang telah disusun. Kondisi tersebut menyebabkan dokumen IKU belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan yang jelas dan andal dalam melakukan pengukuran kinerja.
 - b) Mekanisme pengukuran kinerja dengan mengaitkan kinerja organisasi dan individu belum saling terkait, sehingga penerapan pemberian reward and punishment berbasis kinerja belum dapat terimplementasi dengan baik.
 - c) Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara memadai untuk melakukan penyesuaian strategi, program, maupun intervensi. Proses monitoring cenderung berhenti pada pelaporan capaian tanpa diikuti dengan revisi arah kebijakan atau perbaikan langkah aksi, sehingga pembelajaran dari kinerja tidak diterjemahkan menjadi perubahan strategi yang diperlukan.

Rekomendasi :

1. Melakukan penyelarasan dokumen IKU Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah dengan RPJMD yang telah ditetapkan, sehingga IKU dapat berfungsi sebagai acuan pengukuran kinerja yang konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.
 2. Mendorong penerapan pengukuran kinerja organisasi secara berkala dan dikaitkan dengan pengukuran kinerja individu. Sehingga penerapan pemberian reward and punishment berbasis kinerja.
 3. Instansi agar mendorong penggunaan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi strategi dan program. Setiap capaian yang tidak sesuai target harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian kebijakan, reposisi program, atau perubahan intervensi agar perbaikan kinerja dapat terjadi secara nyata.
3. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dengan catatan sebagai berikut :
- a) Kualitas LPPD butuh ditingkatkan, khususnya pada aspek analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Realisasi indikator kinerja yang jauh melampaui maupun jauh di bawah target belum seluruhnya dilengkapi dengan analisis yang komprehensif, sehingga belum mampu menjelaskan faktor penyebab kinerja tidak tercapai secara memadai. Selain itu, LPPD belum menyajikan tingkat efektivitas dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci.
 - b) Kualitas laporan kinerja pada level Perangkat Daerah masih bervariasi baik secara format maupun kualitas substansi, khususnya pada kedalaman aspek analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan kecukupan upaya atau solusi alternatif untuk perencanaan tahun mendatang.

Rekomendasi :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah dengan menjelaskan detail analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara komprehensif, terutama pada indikator dengan deviasi realisasi yang signifikan terhadap target, sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan kinerja.
2. Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja Pemda dan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014, khususnya upaya strategi ke depan dalam mencapai

target, serta tingkat efektivitas dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga laporan kinerja dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang akan diterjemahkan pada rencana aksi tahun berikutnya.

3. Maka dari itu, perlunya peningkatan pemahaman dalam penyusunan laporan kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah, sehingga mampu menyajikan laporan kinerja dengan kualitas seragam yang dapat menjelaskan secara rinci ketercapaian kinerja pada tahun bersangkutan serta memberikan informasi dalam upaya perbaikan kinerja mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya kesenjangan kualitas antara laporan kinerja tingkat Pemda dengan laporan kinerja tingkat Perangkat Daerah.
4. Nilai Komponen Evaluasi Internal dengan catatan sebagai berikut :
 1. Evaluasi Internal AKIP telah dilakukan pada seluruh unit kerja, dan sudah dilakukan pemantauan atas tindak lanjut dari hasil evaluasi, namun masih terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
 - a. Kualitas catatan dan rekomendasi pada evaluasi internal AKIP masih perlu ditingkatkan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memuat rekomendasi yang memadai dan belum secara langsung menysasar akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. Masih terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diberikan dengan catatan hasil evaluasi, dimana nilai yang disampaikan belum sepenuhnya didukung oleh uraian catatan dan rekomendasi yang memadai;
 - b. Hasil LHEI belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh Perangkat Daerah.
 2. Pelaksanaan evaluasi internal belum didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang memadai untuk mempermudah proses evaluasi, mendukung pengambilan keputusan, serta memantau dan mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, belum terdapat kebijakan reward dan punishment yang dikaitkan dengan hasil evaluasi internal, sehingga belum optimal dalam mendorong perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rekomendasi :

1. Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyusun rekomendasi yang lebih spesifik, terarah, dan menysasar langsung akar permasalahan Perangkat Daerah dan pemberian nilai hasil evaluasi perlu didukung oleh catatan dan rekomendasi yang selaras dan memadai agar mencerminkan kondisi implementasi yang sebenarnya serta memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
 2. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada, yakni Aplikasi e-planning dalam pelaksanaan evaluasi internal untuk mendukung proses evaluasi, pengambilan keputusan, serta pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan, serta menetapkan kebijakan reward dan punishment berbasis hasil evaluasi internal guna mendorong peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 123,94%

Angka tersebut dipeoleh dari 6 dimensi penilaian yaitu :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan skor : 13,97
- Pengalokasian anggaran belanja dalam ABBD dengan skor : 20
- Transparansi pengelolaan Keuangan daerah dengan skor : 15
- Penyerapan anggaran dengan skor : 15
- Kondisi keuangan daerah dengan skor : 6,55
- Opini BPK atas LKPD dengan skor : 15.

Faktor Pendukung : Mempedomani regulasi dan komitmen OPD terkait untuk melaksanakan input di system IPKD

Faktor Penghambat : Realisasi masing-masing dimensi tidak tercapai

- c. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 sebesar 93,79%

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2025 didapatkan dari hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB terhadap unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kudus. Adapun yang menjadi lokus pemantauan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan nilai 4,08 Kategori A- dengan predikat Sangat Baik. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Dan Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 106,96% atau **Sangat tinggi**

11. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat

Realisasi Sasaran Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.30
Formula Penghitungan Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	$1/3(IKS \times IKE \times IKL)$; IKS = Indeks Sosial, IKE = Indeks Ekonomi, IKL= Indeks Lingkungan

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/ 8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Desa Membangun	105,65	0,7750 indeks	NA	NA	0,7800 indeks	NA
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	105,65		NA	NA		NA

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, Dinas PMD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2025

Capaian kinerja Indeks Desa Membangun hanya sampai tahun 2024 selanjutnya diganti dengan Indeks Desa sehingga tidak dapat menghitung persentase capaian kinerja karena indikator yang digunakan berbeda

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, pengukuran Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan Masyarakat tidak lagi menggunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) namun diubah dengan Indeks Desa (ID)

ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa. Penyusunan ID didapatkan dari 6 dimensi yang dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

Formulasi Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD
= 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% +
7,87% +12,60%
= 100,00%

- Keterangan:
ID = Indeks Desa
DLD = Dimensi Layanan Dasar
DS = Dimensi Sosial
DE = Dimensi Ekonomi
DL = Dimensi Lingkungan
DA = Dimensi Aksesibilitas
DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1.	Indeks Desa	499,45	512,5	102,61%	

Sumber data : Dinas PMD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Capaian indikator pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target ID sebesar 499,45, realisasi yang dicapai mencapai 512,5, atau melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator telah berjalan dengan baik dan efektif.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja yang dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, adanya komitmen pimpinan dan aparatur dalam menerapkan tata kelola

organisasi dan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil turut mendorong optimalisasi capaian indikator.

Capaian yang melampaui target ini menjadi dasar yang positif bagi perangkat daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan kinerja secara berkelanjutan, guna mempertahankan serta meningkatkan capaian indikator pada periode berikutnya.

Faktor Pendorong :

Capaian indikator dengan realisasi 512,5 yang melampaui target 499,45 didukung oleh beberapa faktor pendorong utama. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menerapkan manajemen kinerja dan tata kelola organisasi secara konsisten menjadi faktor kunci dalam peningkatan capaian indikator. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang semakin selaras dan terintegrasi turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai indikator.

Selain itu, adanya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, baik secara internal maupun dari instansi pembina, mendorong perbaikan kualitas pelaksanaan program dan pemenuhan indikator penilaian. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan asistensi teknis, serta perbaikan kualitas dokumen dan bukti dukung, turut memperkuat capaian indikator hingga melampaui target yang ditetapkan.

Faktor Penghambat :

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam menjaga dan meningkatkan capaian pada periode berikutnya. Konsistensi penerapan manajemen kinerja dan tata kelola organisasi di seluruh unit kerja belum sepenuhnya merata. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi pendukung kinerja masih memerlukan optimalisasi agar proses pengendalian dan pelaporan kinerja dapat berjalan lebih efektif.

Perubahan kebijakan dan dinamika organisasi, termasuk penyesuaian regulasi serta rotasi pegawai, berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kualitas implementasi sistem dan pemenuhan indikator penilaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan berkelanjutan agar capaian indikator dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten

12. Menguatnya keberdayaan masyarakat di Perdesaan dan Perkotaan

Realisasi Sasaran menguatnya keberdayaan masyarakat di Perdesaan dan Perkotaan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.32
Formula perhitungan Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Kudus dikali 100
		Indeks Pembangunan Kecamatan	$(\Sigma \% IKM \text{ Kec} + \Sigma \% \text{Adm Desa} + \Sigma \% \text{Kelembagaan Desa} + \Sigma \% \text{Pemb.Masyarakat Desa})/4$

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/ 8/ 2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Desa Mandiri	232,77	23 persen	63 persen	273,91	24 persen	262,50
2.	Indeks Pembangunan Kecamatan	103,34	89,92 Indeks	92,07 Indeks	103,34	90,59 Indeks	101,63
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	168,06			188,63		182,07

Sumber data : RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, Dinas PMD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2025
- Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 188,63%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,57% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 168,06%
2. Analisis hasil (kinerja) Menguatnya keberdayaan masyarakat di Perdesaan dan Perkotaan :
- a. Angka capaian kinerja IKU Peningkatan Desa Mandiri tahun 2025 sebesar 273,91%
- Capaian Persentase Desa Mandiri pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi lebih dari 100%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Peningkatan jumlah Desa Mandiri didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain optimalisasi pendampingan desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, serta pemanfaatan Dana Desa yang semakin tepat sasaran. Selain itu, sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping desa, dan pemangku kepentingan lainnya turut mempercepat peningkatan status desa.

Capaian yang melebihi target ini juga menunjukkan meningkatnya kemandirian desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam indikator penilaian status desa. Dengan demikian, keberhasilan ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong keberlanjutan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Faktor Pendorong :

1. Pendampingan desa yang intensif dan berkelanjutan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa sesuai indikator penilaian desa mandiri.
2. Pemanfaatan Dana Desa yang lebih tepat sasaran, terutama untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, penguatan BUMDes, dan peningkatan pelayanan dasar, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan status desa.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, termasuk administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, mempercepat pemenuhan indikator Desa Mandiri.
4. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping desa, dan stakeholder terkait mempercepat penyelesaian permasalahan desa serta mendukung capaian indikator kemandirian desa.
5. Munculnya inovasi desa serta pengembangan potensi lokal di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan meningkatkan ketahanan dan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat :

1. Masih terdapat perbedaan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan antar desa, sehingga tidak semua desa dapat berkembang secara merata menuju status Desa Mandiri.
2. Keterbatasan sarana prasarana, akses teknologi informasi, dan dukungan pembiayaan non-Dana Desa di beberapa desa menjadi kendala dalam mempertahankan dan meningkatkan status desa.
3. Penyesuaian regulasi serta perubahan indikator penilaian desa memerlukan adaptasi cepat dari pemerintah desa, yang pada sebagian desa masih memerlukan waktu dan pendampingan tambahan.
4. Tidak semua desa mampu menjaga keberlanjutan program pemberdayaan dan inovasi akibat keterbatasan kapasitas manajerial dan regenerasi pengelola desa

- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Kecamatan sebesar 103,34%

Formulasi penghitungan Indeks Pembangunan Kecamatan adalah rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Kota Kudus Tahun 2024-2026.

Ada 4 indikator kinerja yang menjadi komponen penghitungan Indeks Pembangunan Kecamatan, antara lain :

1. Persentase Administrasi Desa yang sesuai standar
2. Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik
3. pembangunan masyarakat desa yang berkualitas
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Indeks Pembangunan Kecamatan tahun 2025 yaitu 89,92 dengan capaian 93,03 atau 103,45% dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU Kecamatan Kota Kudus termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari indikator kinerja sasaran yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Kecamatan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas mempunyai realisasi tertinggi yaitu 100% atau 112,36% dari target yang ditetapkan. Formulasi Persentase pembangunan masyarakat desa yaitu rata-rata Persentase dukungan SPM bidang Trantib dan kebencanaan yang tertangani dan persentase konflik yang tertangani.

- 2. Realisasi Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik mencapai 110,9% dari target 89% dengan nilai 98,7%.
- 3. Persentase Administrasi Desa yang sesuai standar tercapai 81%, lebih tinggi 1% dari target yang ditetapkan yaitu 80%.
- 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kota Kudus pada triwulan IV tahun 2025 mencapai 92,4 dari target sebesar 92,7. Target tidak tercapai, meskipun selisihnya sangat kecil (0,3% di bawah target), perlu sedikit perhatian lebih untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 188,63% atau Sangat Tinggi.

13. *Meningkatnya kekondusifan wilayah*

Realisasi Sasaran Meningkatnya kekondusifan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.34
Formula Perhitungan Sasaran Meningkatnya kekondusifan wilayah

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan kekondusifan wilayah	Angka Konflik Sosial	Konflik sosial yang diselesaikan dibagi dengan konflik sosial yang terindikasi
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas. $RISIKO\ BENCANA = (HAZARDS\ VULNERABILITY) / CAPACITY$

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2025

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kekondusifan wilayah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Konflik Sosial	100	0 Angka	0 Angka	100	0 Angka	100
2.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	126,65	100 indeks	69,14 indeks	144,63	99 indeks	143,19
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	113,33			122,32		121,60

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2025
- Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 122,32%. Angka tersebut menurun sebesar 8,99 dibandingkan capaian rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 113,33%.
2. Analisis hasil (kinerja) Meningkatnya kekondusifan wilayah
- Angka capaian kinerja IKU Angka Konflik Sosial sebesar 100%
- Angka konflik sosial dihitung dari 3 (tiga) potensi konflik yang dipetakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus yaitu:
- Potensi gangguan keamanan dsri kelompok radikal;

- Potensi konflik SARA,dan

- Potensi konflik sosial
- Baik pada tahun 2024 maupun tahun 2025 keseluruhan potensi dapat ditangani, sehinggatidak berkembang menjadi konflik, jadi untuk tahun 2025 untuk Angka Konflik Sosial dapat sesuai target

POTENSI KONFLIK YANG TERTANGANI DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025

No.	Uraian	Penanganan
1	Pasca penangkapan terduga teroris atas nama Sdr. Bahrul Ulum pada Hari Senin tanggal 04 November 2024 di Jl.Lingkar Utara Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus oleh Tim Densus 88 Mabes Polri.	a Bahwa penggalangan, pencegahan dan penanggulangan terduga teroris membutuhkan suatu Kerjasama secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah juga perlu adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat, karena dengan melibatkan masyarakat penggalangan, pencegahan penanggulangan dan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan teroris dapat dengan mudah dicegah. Hal itu telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi "Bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang

No.	Uraian	Penanganan
		sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara”. Yang berarti warga Negara Indonesia diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan Negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri; b Diharapkan juga adanya perhatian dari pemerintah Kab. Kudus (Forkopimda) berupa santunan/ biaya hidup selama terduga teroris menjalankan proses hukum kepada keluarga terduga teroris.
2.	Pada hari Jum’at, 03 Januari 2025 Mediasi Tentang Permasalahan Pengolahan Limbah Accu/ Aki yang Ditolak Warga Desa Temulus RT. 01/05 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus	a Telah dilaksanakan giat musyawarah penyelesaian pengolahan limbah accu yang ada di Desa Temulus RT. 01/05 Mejobo Kudus; b Melakukan monitoring, kegiatan berjalan aman dan tertib.
3.	Pada hari Rabu, 8 Januari 2025 Kegiatan Audensi Poktan Sidodadi Petani Warga Dukuh Tompe Tentang Pembagian Bantuan Fuso Di Aula Balai Desa.Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	a Telah dilaksanakan kegiatan audensi Kelompok Tani sidodadi petani warga Dukuh Tompe / RW 1 Desa Gondoharum tentang pembagian bantuan Fuso ke Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kudus di ikuti sekitar 50 orang b Melakukan monitoring, kegiatan berjalan aman dan tertib
4.	Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 pukul 10.30 WIB dengan titik kumpul Ruko kios Kuliner UMKM (Lapangan Sepak Bola	Melakukan monitoring, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
	Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah berangkat DPC Grib Jaya Kabupaten Kudus ke Kabupaten Blora dengan pimpinan Eko Saputro alias Mentek (Ketua DPD Grib Jaya Kab. Kudus yang diikuti 70 orang	
5.	Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 07.00 s.d 11.30 WIB di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah dilaksanakan kegiatan aksi unjukrasa terkait dengan keberadaan dan kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah milik Pemerintah Kabupaten Kudus oleh Forum Komunikasi Ketua RW se Desa Tanjungrejo dengan Korlap Abdul Pardi dan seluruh ketua RW se Desa Tanjungrejo yang diikuti 300 orang	Melakukan monitoring, kegiatan berjalan aman dan tertib
6.	Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pukul 20.10 s.d. 21.40 WIB di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Audiensi Pengurus JIK (Jurnalis Independen Kudus) Periode 2024 - 2029 dengan Pj. Bupati Kudus terkait rencana untuk melaksanakan turun ke jalan	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
7.	Pada hari Jumat, 14 Februari 2025 pukul 10.30 WIB di Dinas Perinkop Naker telah dilaksanakan Audiensi Ormas ABPP Riyanto, Bersama Ormas PKN terkait Program SIHT saat ini belum terselesaikan	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
8.	Pada hari Jum'at, 14 Februari 2025 pukul 09.00 s.d 10.30 WIB telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terkait Penyaluran LPG 3 Kg di Aula Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
9.	Pada hari Minggu, 16 Februari 2025 pukul 22.00 s.d 23.00 WIB telah dilaksanakan Rapat Rencana Kegiatan Save Palestina dengan agenda Kegiatan di Balai Jagong adalah orasi bersama dengan ustadz Bahtiar dan panitia, setelah itu konvoi dimulai dari Balai Jagong ke selatan arah Loram terus ke barat Museum Kretek, lanjut ke barat PLN, belok kanan ke arah Tugu A.Yani depan DPRD sambil membawa kotak amal dana untuk Palestina, lanjut ke utara Hyper Mart lanjut ke Alun-alun ke kiri utk lewat Toko Kuning lanjut jalan A.Yani lanjut ke gang 4 , belok kiri lurus sampai SMP 2 Kudus, belok kanan sampai pentol, selanjutnya ke kanan lurus finish di Balai Jagong	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
10.	Pada hari Senin, 17 Februari 2025 pukul 09.50 s/d 12.00 WIB telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Checking Akhir Pelaksanaan Festival Dandangan Tahun 1446 H/ 2025 M	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
11.	Pada hari Selasa, 4 Maret 2025 pukul 14.30 s.d 16.55 WIB telah dilaksanakan Monitoring Aksi Damai Oleh Kawali Kabupaten Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
	Terkait Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Mie Gacoan Kudus	
12.	Pada hari Rabu, 5 Maret 2025 pukul 09.30 s.d 15.15 WIB telah dilaksanakan Monitoring Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah Dalam Rangka Rangkaian Selapanan Gubernur di Wilayah Kabupaten Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
13.	Pada hari ini Jum'at, Tanggal 7 Maret 2025, tempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi fasilitasi permasalahan pencatatan pernikahan exs napiter	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
14.	Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 pukul 10.50 s.d 12.40 WIB di Aula Kecamatan Jekulo Jl-Raya Kudus-Pati Km 10 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah dilaksanakan klarifikasi terkait pembakaran liar sampah limbah pabrik di Dukuh Turus RT. 04 RW. 08 Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan penanggung jawab Ibu Jumilah diikuti sekitar 20 orang	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
15.	Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 pukul 10.50 s.d 12.40 WIB di Aula Kecamatan Jekulo Jl-Raya Kudus-Pati Km 10 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah dilaksanakan klarifikasi terkait pembakaran liar sampah limbah pabrik di Dukuh Turus RT. 04 RW. 08 Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan penanggung jawab Ibu Jumilah diikuti sekitar 20 orang	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
16.	Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 pukul 10.00 s.d 12.40 WIB di Jln. Plang Kidul RT. 02 RW. 06 Desa Margorjo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus telah dilaksanakan mediasi penyelesaian keluhan warga terkait adanya bau tidak sedap yang disebabkan oleh tempat penyembelihan dan pembersihan ayam potong yang di mediasi oleh Zainal Arifin, SE (Camat Dawe Kabupaten Kudus) yang dihadiri sekitar 15 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
17.	Pada hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 13.00 telah dilaksanakan Seminar Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS) dengan tema Kesiapan Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 H dengan Mudik Seneng, Balik Ayem” di Pendopo Kudus yang diikuti oleh 111 orang	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
18.	Pada hari Rabu, 26 Maret 2025 pukul 09.00 sd 11.30 WIB, di Kantor Kesbangpol Kab Kudus, berlangsung rakor tindak lanjut dalam upaya fasilitasi permohonan pencatatan pernikahan eks Al Jamaah Al Islamiyah	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
19.	Pada hari Jumat 2 Mei 2025 Rapat Koordinasi Terkait Cipta Kondisi Wilayah dan Penanganan Konflik Sosial terkait adanya penolakan kehadiran Habib Baalawi di Kabupaten Kudus seperti pengajian dan sholawatan. Karena telah dianggap melakukan pembelokkan sejarah NKRI, sejarah para wali, adu domba dan sebagainya.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
20.	Pada hari Senin, 7 April 2025 Prosesi Kupatan Kanjeng Sunan Muria Tahun 1446 H/2025 M Di Taman Ria Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
21.	Pada hari Senin, 7 April 2025 Kegiatan Tradisi Syawalan dan Kirab Kupatan Syawalan 1446 H/2025 M yang di selenggarakan oleh pemerintahan Desa Purworejo dengan ketua panitia Bapak Rumadi yang diikuti sekitar 600 Orang	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
22.	Pada hari Senin, 7 April 2025 Kegiatan Tradisi Kirab Kupatan Desa Kesambi Tahun 2025 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan ketua panitia Bapak Noor Koliq (Ketua Pok Darwis Balong) di ikuti sekitar 150 orang	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
23.	Pada hari Senin, 7 April 2025 Kegiatan kirab Budaya Bulusan dalam rangka tradisi Kupatan atau Syawalan 1446 H/2025 M dengan tema "Kebersamaan membawa berkah" yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Hadipolo sebagai ketua panitia Sdr. Nur Hadi yang dihadiri sekitar 3000 orang	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
24.	Pada hari Sabtu, 12 April 2025 telah dilaksanakan kegiatan Halal Bihalal warga Kudus dengan menghadirkan Konser Deny Caknan dari Ngawi Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Kudus dengan penanggung jawab Drs. Revlisianto Subekti (Sekda Pemkab.Kudus) yang dihadiri sekitar 5.000 penonton	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
25.	Pada hari Minggu, 13 April 2025 kegiatan Halal Bihalal warga Kudus di lanjutkan Pengajian bersama dengan Gus Iqdam dari Blitar Jatim, yang diselenggarakan oleh Pemda Kab. Kudus dengan penanggung jawab Moh.Antono yang diikuti sekitar 5.000 jamaah	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
26.	Pada hari Sabtu, 26 April 2025 Telah dilaksanakan giat Halal Bihalal Keluarga Besar PT. Djarum Kudus Tahun 1446 H / 2025 M dengan tema "Membuka hati untuk petunjuk - NYA, menjalin silaturahmi dalam kebersamaan" di Area parkir Truck PT. Djarum Garasi II Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
27.	Pada hari Sabtu, 26 April 2025 telah dilaksanakan Kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan (PPK) Susila Budhi Dharma (Subud	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
	) Indonesia Komisariat Wilayah V Jateng & DIY Tahun 2025 Di Kabupaten Kudus	
28.	Pada hari Kamis, 15 Mei 2025 Monitoring Aksi Damai Aliansi Masyarakat Desa Kajar Kecamatan Dawe bersama DPW Kawali Jawa Tengah perihal Dugaan Eksploitasi Air Bawah Tanah (ABT) Ilegal yang berada di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus di depan Gedung Kejaksaan Negeri Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
29..	Pada hari Kamis, 12 Juni 2025 Mediasi Antara Komunitas Warung Madura Kudus (KWMK) Dengan Sdr.Yofi Angga Selaku Pemilik Toko Klontong Di Jl.HM Subchan Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus dianggap menyalahi aturan yang dibuat oleh Paguyuban KWMK (Komunitas Warung Madura Kudus) dimana jarak antar warung klontong orang madura di Kudus minimal berjarak 500 meter dengan Warung Klontong Madura lain, dan menurut hitungan KWMK Warung milik Sdr. Yofi Angga hanya berjarak 460 meter dengan Warung milik Anggota Paguyuban KWMK	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
30,	Pada hari Selasa, 17 Juni 2025 telah dilaksanakan audensi paguyuban supir truk eks Pati bertempat Mapolres Kudus, terkait Revisi Pasal 277 UU No.22/2009, agar tanggung jawab penerapan ODOL tidak hanya berada di sopir/modifikasi kendaraan, tetapi juga mencakup pemilik dan pengguna jasa dalam audiensi ini adalah pada tanggal 19 Juni 2025 tetap melakukan menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan kumpul ngopi bareng dengan Satlantas Polisi, demi solidaritas sopir se Nusantara bertempat di Terminal bus Jati Kudus dan Terminal Cargo Jati.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
31.	Pada hari Kamis, 19 Juni 2025 telah dilaksanakan aksi untuk rasa oleh supir Over Dimension Over Loading (ODOL) dan ngopi bareng Kapolres yang mengatas namakan GSJT (Gerakan Sopir Jawa Tengah) Kabupaten Kudus yang diikuti 300 supir. Tuntutan utama para sopir dalam demonstrasi antara lain: Revisi Pasal 277 UU No. 22/2009, agar tanggung jawab penerapan ODOL tidak hanya berada di sopir/modifikasi kendaraan, tetapi juga mencakup pemilik dan pengguna jasa, Penghentian kriminalisasi sopir, terutama dari ancaman pidana yang selama ini dianggap berat, Penetapan tarif minimum logistik, memberikan keadilan bagi sopir kecil agar tidak dibebani biaya tinggi tanpa kompensasi, Perlindungan hukum bagi sopir, termasuk keadilan dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi terhadap ukuran	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
	operator, Pemberantasan premanisme dan pungli, baik dari oknum masyarakat maupun aparat, agar sopir tidak diperas saat operasi jelang atau dalam aksi penertiban ODOL, dan Kesetaraan perlakuan hukum, memastikan perusahaan besar yang melanggar juga ditindak, bukan hanya supir kecil.	
32.	Pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 pukul 20.10 sd 22.35 WIB di Jalan Pantura Kudus - Demak dan Kudus - Pati telah dilaksanakan penguraian oleh Satlantas Polres Kudus dengan dibantu anggota Kodim 0722/Kudus terhadap GSJT (Gerakan Sopir Jawa Tengah) Kab. Kudus yang melakukan pemblokiran jalan pantura sehingga Arus lalu lintas pantura sudah bisa dilalui kendaraan namun kondisi masih padat merayap serta sebagian sopir ODOL berangsur - angsur meninggalkan lokasi pemblokiran di Jalan Pantura tepatnya di lampu Trafic like sebelah Terminal Induk Kudus yang diikuti sekitar 200 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
33.	Pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 pukul 20.10 sd 22.35 WIB di Jalan Pantura Kudus - Demak dan Kudus - Pati telah dilaksanakan penguraian oleh Satlantas Polres Kudus dengan dibantu anggota Kodim 0722/Kudus terhadap GSJT (Gerakan Sopir Jawa Tengah) Kab. Kudus yang melakukan pemblokiran jalan pantura sehingga Arus lalu lintas pantura sudah bisa dilalui kendaraan namun kondisi masih padat merayap serta sebagian sopir ODOL berangsur - angsur meninggalkan lokasi pemblokiran di Jalan Pantura tepatnya di lampu Trafic like sebelah Terminal Induk Kudus yang diikuti sekitar 200 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
34.	Pada hari Selasa, 29 Juli 2025 pukul 13.00 WIB di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Audiensi Gerakan Sopir Jawa Tengah (GSJT) tentang Uji KIR.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
35.	Pada hari Jum'at, 01 Agustus 2025 pukul 08.30 s.d 11.30 WIB di Pendopo Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penanggulangan konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus yang diikuti 130 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
36.	Pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025 pukul 20.00 s.d. 23.00 WIB di Rumah makan Greens Bakery dan Bistro Jl. A. Yani, Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus telah dilaksanakan rapat koordinasi Terkait Menindaklanjuti Pemasangan Benner Yang Dilakukan PWI- LS Kabupaten Kudus yang bertuliskan "Habib bukan cucu Nabi tapi cucuYahudi, kami cucu persiku bukan cinta Habib" diikuti 11 orang	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
37.	Pada hari Minggu, 10 Agustus 2025 pukul 16.30 s.d 17.45 WIB telah dilaksanakan giat silaturahmi dengan Habib Ali Zaenal Abidin Al kaff selaku Keluarga Almarhum Habib Ja'far Al Kaff dan Pimpinan Ponpes Darul Qur'an Nurul Abidin Kudus di Jl. Pangeran Puger Desa Demaan Kec. Kota Kudus.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
38.	Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 pukul 09.30 s.d 13.00 WIB di Hotel @home Kudus Jl. Tanjung No. 14-16 Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus telah dilaksanakan Rakor Tim Pengawasan Orang Asing Kab. Kudus tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jateng Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, dengan tema "Menjaga Stabilitas Wilayah Kab. Kudus Melalui Pengawasan Orang Asing Yang Humanis, Professional dan Mendukung Pertumbuhan Investasi", bertindak selaku penanggung jawab kegiatan Bp. Is Edi Eko Putranto (Kakanwil Jateng Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang) dihadiri sekitar 50 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
39.	Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di Mapolres Kudus telah dilaksanakan kegiatan Aksi Seribu Lilin dan Sholat Ghaib Bersama oleh Mahasiswa Kudus Atas Meninggalnya Affan Kurniawan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Korlap Sdr. Anjas dari PMIL.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
40.	Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 13.00 s.d 15.00 WIB di beberapa sudut Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan pelepasan stiker/ flayer bernada mendiskreditkan pemerintah dan aparat kepolisian yang dilaksanakan oleh Pol PP Kabupaten Kudus dengan di danpingi Kodim 0722/Kudus dan Polres Kudus yang diikuti sekitar 35 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
41.	Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 10.00 s.d 13.00 WIB di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus Jl. Simpang 7 Kudus No. 1 Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan kegiatan Rakor Terbatas Forkopinda Jateng kepada seluruh Forkopinda Kabupaten/Kotamadya seluruh Jawa Tengah melalui Vidio Conference terkait Perkembangan Situasi di beberapa wilayah Jawa Tengah dipimpin langsung oleh Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. (Gubernur Jateng) bersama Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jateng dan Kajati Jateng diikuti sekitar 50 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
42.	Pada hari Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB telah dilaksanakan Elisitasi dengan BEM UMK di Kafe Lembao. Hadir Kesbangpol	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
	dan Ketua HMI atas nama Habib dan Agus Kurniawan.	
43.	Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 20.15 s.d 23.30 WIB di di Cafe Omah Wedangan Enan Jl. Ngembalrejo, Ngelo Karangbener Kec. Bae Kabupaten Kudus telah dilaksanakan rapat pelaksanaan aksi Damai oleh HMI Cabang Kudus yang mengakibatkan Sdr. Affan Kurniawan (Driver Ojek Online) meninggal dunia dengan tema HMI bersama rakyat yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Kudus dengan pimpinan Khabib Maulana (Ketua HMI Cab. Kudus) yang diikuti 12 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
44.	Pada hari Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB Bupati Kudus menggelar patroli malam untuk menjaga kondusifitas wilayah. Hadir Bupati Kudus, Forkopimda, Kesbangpol dan Satpol PP Kab. Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
45.	Pada hari Senin tanggal 1 September 2025 pukul 08.30 s.d 10.45 WIB di Pendopo Kab. Kudus Jl. Simpang 7 No. 1 Desa Demaan Kec. Kota Kab. Kudus telah dilaksanakan kegiatan Deklarasi Kudus Damai yang dilaksanakan oleh Pemda Kab. Kudus dengan penanggungjawab kegiatan Dr. Ars. Samani Intakoris, S.T, M.T. (Bupati Kudus) dengan diikuti sekitar 75 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
46.	Pada hari Senin tanggal 1 September 2025 pukul 16.00 WIB telah dilaksanakan Elisitasi dengan HMI di Kafe Lumintu Rendeng Hadir Kepala Bakesbangpol dan Ketua HMI Cabang Kudus.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
47.	Pada hari Selasa, 02 September 2025 pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan penghapusan coretan di beberapa sudut Kota Kabupaten Kudus yang bernada mendiskreditkan pemerintah dan aparat kepolisian yang di ikuti sekitar 35 orang. Hadir Kesbangpol, Dinas PKPLH, Satpol PP Kab. Kudus dengan didampingi Kodim 0722/Kudus dan Polres Kudus.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
48.	Pada hari Selasa, 02 September 2025 pukul 15.00 s.d 17.30 WIB di Ruang Pendopo Belakang Kabupaten Kudus Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus turut Ds. Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan giat Do'a bersama untuk mewujudkan Kudus aman, tentram dan kondusif di Kudus, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kudus aman, tentram, damai dan kondusif, sebagai Penanggung jawab kegiatan M. Fitriyanto S.STP., M.M (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kudus) diikuti sekitar 150 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
49.	Pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan Penghapusan coretan di beberapa sudut Kota Kabupaten Kudus yang bernada mendiskreditkan pemerintah dan aparat kepolisian yang di ikuti sekitar 35 orang. Hadir Kesbangpol, Dinas PKPLH, Satpol PP Kab. Kudus dengan didampingi Kodim 0722/Kudus dan Polres Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
50.	Pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 11.00 WIB telah dilaksanakan koordinasi dan penerimaan audiensi dengan ojol di ruang rapat Kesbangpol. Hadir Kaban Kesbangpol, Kasubbid ormas, ojol, dan anggota kodim 0722/Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
51.	Pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 15.00 WIB telah dilaksanakan koordinasi dengan Ketua HMI Cabang Kudus atas nama Khabib bertempat di ruang Kaban Kesbangpol perihal rencana aksi damai dan audiensi dengan Bupati besok Kamis 4 September 2025 pukul 13.00 WIB. Hadir Kabid Wasnas dan Ketua HMI Cabang Kudus	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
52.	Pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 20.05 s.d 20.45 WIB di ruang tamu Pendopo Kabupaten Kudus telah dilaksanakan press rilis Bupati Kudus menanggapi rencana aksi demo dari elemen mahasiswa hari Kamis tanggal 4 September 2025 yang diikuti sekitar 25 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
53.	Pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 13.45 s.d 15.25 WIB di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Ds. Demaan Kec. Kota Kabupaten Kudus telah dilaksanakan kegiatan audensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kudus kepada Forkopinda Kabupaten Kudus, terkait adanya aksi simpatisan Koreksi Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia, dengan penanggungjawab kegiatan Sdr. Habib Maulana (Ketua HMI Cabang Kudus) yang diikuti sekitar 50 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
54.	Pada hari Jum'at 5 September 2025 pukul 20.15 s.d 21.45 WIB di Aula gedung DPRD Kabupaten Kudus Jl. R. Agil Kusumadya No. 44 Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah dilaksanakan kegiatan doa bersama dan bantuan sosial Forkopimda Kabupaten Kudus bersama aliansi ojek online Kabupaten Kudus dalam rangka kirim doa 7 hari meninggalnya Alm. Affan Kurniawan (Pengemudi Ojol yang meninggal dunia karena terlindas mobil Rantis Brimob pada saat aksi Unras di Jakarta) yang dilaksanakan oleh aliansi ojek online Kudus dengan penanggungjawab	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
	kegiatan Saiful Rochim yang diikuti sekitar 200 orang.	
55.	Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 22.00 s.d 24.00 WIB di Lapangan Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait rencana Aksi damai oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Kabupaten Kudus pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 di depan Gedung DPRD Kudus yang diikuti sekitar 33 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
56.	Pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 jam 09.25 sd 10.45 Wib bertempat di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kab.Kudus Jl.HM Subchan turut Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait permasalahan lahan parkir di Pasar Bitingan. Selaku penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kadishub Kab.Kudus Catur Sulistiyanto, S.Sos., M.M.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
57.	Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 pukul 18.00 WIB di Desa Prambatan Kidul RT 07 RW 02 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus telah bebas bersyarat Eks Napiter a.n Thoriquddin Alias Abu Rusydan Alias Hamzah Alias Pake Bin Muhammad Falich (Alm) dari Lapas Kelas 1 Semarang Jalan. Raya Semarang - Boja KM 4 Jalan. Rejomulyo I Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan pengawalan Densus Polda Jawa Tengah yang diikuti 6 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
58.	Pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2025 pukul 13.00 s.d 14.30 WIB tempat Rumah Uztad Abu Rusdan Ketua dan Pendiri Jam'iyah Islamiyyah serta Ex Napiter yang saat ini masih berproses pembebasan bersyarat wajib lapor ke Bapas Wil. Pati dan Kejaksaan Negeri Kudus. Kegiatan silaturahmi dan tausiyah bersama exs Jam'iyah Islamiyyah dan ex Napiter Se-Solo Raya, Semarang dan kedua kurang lebih berjumlah 40 orang tokoh 2 Jam'iyah Islamiyyah. Dalam kegiatan tersebut di moderatori oleh Uztad Tamrin, beliau tokoh save Palestina di Kudus.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
59.	Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 pukul 19.40 s.d. 21.10 WIB di TPQ Muyassarul Murottilin Desa Jepangakis RT. 03 RW. 04 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan Rapat pembahasan keresahan warga dengan Aktivitas Anak-anak yang berada di Masjid As-Sunnah Desa Jepangakis.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
60.	ada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 pukul 16.00 s.d 17.55 WIB di Depan Air mancur dan halaman Pendopo Kab. Kudus, telah dilaksanakan kegiatan Ihtijaj dan	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
	Istighotsyah oleh Aliansi Santri Kudus Bersatu untuk boikot media Trans7 terkait atas tayangan Provokatif dan Manipulatif dan Menghina Pesantren, yang dilaksanakan oleh Aliansi Santri Bersatu Kab. Kudus, dengan penanggung jawab Kegiatan Bp. Saefudin (Ketua Himasal /Himpunan Alumni Santri Lirboyo Kab. Kudus) Hp.081390383262 yang diikuti sekitar 200 orang.	
61.	Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 pukul 13.00 s.d 15.30 WIB di depan Pendopo Kabupaten Kudus telah dilaksanakan kegiatan Istighotsah dan Mujahadah Santri dalam rangka mensikapi atas tayangan program expose uncensored Trans 7 dan pemberitaan di media lain yang mendiskriditkan, melecehkan dan menghina Pondok Pesantren yang diselenggarakan oleh Aliansi Santri Membela Kyai (Asmak) Kabupaten Kudus dengan penanggungjawab kegiatan Agus Riyanto (Ketua Asmak Kab. Kudus) yang akan diikuti sekitar 400 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
62.	Pada hari Senin, 20 Oktober 2025 bertempat di Perumahan Alamadya Desa Damaran telah dilaksanakan elisitasi dengan Dimas Aditya DPD Kawali Kabupaten Kudus.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
63.	Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 pukul 15.00 s.d 16.00 WIB telah dilaksanakan Giat Galtas Ormas Kawali Kabupaten Kudus Tempat di Perumahan Alamadya Residence.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
64.	Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 Pukul 09.00 sd 11.30 WIB undangan untuk keterangan saksi terkait Laporan Aliansi Kudus Cinta Damai Kepada Oknum Ormas PWI LS Kabupaten Kudus.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
65.	Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 Pukul 12.30 s.d 13.15 WIB Kegiatan koordinasi dengan Kepala Desa Kandangmas terkait Laporan LSM Pelita Prabu terkait dugaan warga Kandangmas yang mengaku punya lahan yang dibeli untuk waduk Logung hingga sekarang belum dibayar.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
66.	Pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025 pukul 13.45 s.d 16.15 WIB fasilitasi ormas KAWALI dengan perwakilan RPA tabaruk H. Haryanto dan dasa susila tempat di rumah bapak H. Haryanto Desa Gondosari GG. Sawo	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
67.	Pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pukul 10.05 s.d. 13.00 WIB di Ruang PPKO Polres Kudus telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan pengamanan Sepak Bola Liga II antara Persiku Kudus vs PerselaLamonganp dengan penanggungjawab kegiatan Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo, S.I.K., M.Si yang diikuti 50 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
68.	Pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2025 pukul 08.30 s.d 11.30 WIB di ruang rapat kantor Kesbangpol Kab.Kudus telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan Memperingati Hari Wayang Se-dunia.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
69.	Pada hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 20.00 WIB telah dilaksanakan Elisitasi Dengan Lembaga KAWALI dengan hasil Rencana aksi tanggal 20 Nopember 2025 tidak jadi akan tetapi diganti dengan audiensi dengan Dinas PUPR.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
70.	Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 pukul 09.30 s.d 12.00 WIB di Aula Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus telah dilaksanakan kegiatan pendistribusian Bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahun 2025 berupa Beras dan Minyak Goreng yang diselenggarakan oleh Pemkab Kudus yang diikuti sekitar 135 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
71.	Pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 pukul 08.00 s.d 09.00 WIB di halaman Balaidesa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Apel kesiapsiagaan tanggap bencana alam tingkat Kecamatan Undaan tahun 2025 dengan penanggungjawab kegiatan Satria Arif Budianto (Camat Undaan) diikuti sekitar 150 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
72.	Pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 pukul 08.00 s.d 08.30 WIB di Halaman Polsek Bae Jl. Kudus-Colo KM 5 Desa Bae Kec. Bae Kab. Kudus telah dilaksanakan Apel kesiapsiagaan tanggap bencana alam tingkat Kecamatan Bae tahun 2025 dengan penanggungjawab kegiatan Safi'i SH (Camat Bae) yang diikuti sekitar 90 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
73.	Pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 pukul 11.00 s.d. 13.05 WIB di Taman GOR Wergu Wetan Kudus telah dilaksanakan TFG (Tactical Floor Game) dan Apel Persiapan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola Liga 2 Pegadaian antara Persiku Kudus vs Persela Lamongan dengan penanggung jawab kegiatan Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo, S.I.K., M.Si yang diikuti 300 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
74.	Pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 09.15 s.d 11.05 WIB di Pasar Saerah Jl. AKBP R. Agil Kusumadya Nomor 120 B Desa. Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah dilaksanakan sosialisasi pemindahan pedagang sayur pasar Bitingan ke pasar Saerah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dengan penanggungjawab kegiatan Ibu Djati Solechah, S.Sos, MM (Plh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus) yang diikuti sekitar 150 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
75.	Pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 10.00 s.d. 11.50 WIB di Ruang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Lantai II Gedung C Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait dengan Perayaan Natal Umat Kristiani Kudus Tahun 2025 dengan penanggungjawab kegiatan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus (Andreas Wahyu Adi Setiawan, AP) yang dihadiri sekitar 20 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
76.	Pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 pukul 16.30 s.d 19.05 WIB di Wilayah Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Patroli bersama Forkopinda Kabupaten Kudus dalam rangka pengamanan malam Natal diwilayah Kabupaten Kudus tahun 2025.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
77.	Pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 pukul 15.00 WIB di Pendopo Kabupaten Kudus Jl. Simpang Tujuh, Kudus dalam rangka memperingati Hari Raya Natal Tahun 2025, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAGNAS) Kabupaten Kudus menyelenggarakan kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal Umat Kristiani se-Kabupaten Kudus. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan umat Kristiani, meningkatkan keimanan, serta membangun kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Kudus.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
78.	Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sekira pukul 05.13 WIB di Halaman Parkir Resto "21 Hot Plate Peper Rice" Jl.Wahid Hasyim No.72 Turut Kelurahan Panjunan Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terlapor mendatangi tempat kerja dari saksi 1 dan melaporkan bahwa telah dipukul oleh korban bersama teman-temanya di Ruko Agus salim turut Desa Getas Kecamatan Jati Kudus dan saksi 1 bersama saksi 2 datang ke tempat korban berada, saat saksi 1 dan saksi 2 pergi, korban mendatangi tempat kerja saksi 1 (Resto "21 Hot Plate Peper Rice" Jl.Wahid Hasyim No.72 Turut Kelurahan Panjunan Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus) bertemu dengan terlapor dan langsung memukul kepala terlapor saat itu terlapor sudah membawa Senjata Tajam berupa Clurit kemudian diayunkan dan mengenai Korban, adapun luka yang dialami korban.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
79.	Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 Pukul 15.10 s.d. 16.30 WIB di Pendopo Kab. Kudus telah dilaksanakan kegiatan Doa Bersama Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2025 Kudus Aman Kudus Sehat yang dihadiri sekitar 200 orang.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib

No.	Uraian	Penanganan
80.	Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 pukul 16.30 s.d 17.50 WIB di Lapangan Tenis Angga Sasana Krida Pemkab. Kudus Ds. Demaan Kec. Kota Kab. Kudus, telah dilaksanakan Apel Kesiapan Pengamanan Malam Pergantian Tahun Baru 2025 – 2026, dalam Rangka Ops Lilin Candi 2025 Kabupaten Kudus, yang diikuti sekitar 250 Personel.	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
81.	Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 pukul 20.00 WIB di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Giat Zoom Metting Pengamanan Malam Tahun Baru 2026 Forkopimda Kab. Kudus dengan Kapolri bersama seluruh Forkopimda se-Indonesia	Melaksanakan audiensi, kegiatan berjalan aman dan tertib
Jumlah Potensi Konflik Yang Tertangani		81 Potensi

b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 69,14

Berdasarkan Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-42/BNPB/DS-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 hal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah. BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar **92,37** dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar **0,74**. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 122,32% atau **Sangat Tinggi**.

14. *Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup*

Realisasi Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.36
Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(37,60\% \times IKA) + (40,50\% \times IKU) + (21,90\% \times IKTL)$ dengan IKA = Indeks Kualitas Air; IKU = Indeks Kualitas Udara; IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 0.0.08.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun				Target akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPD 2026 (%)
		2024	2025				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	117,81	56,633 Indeks	68,08 indeks	120,21	57,270 Indeks	118,88
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	117.81			120,21		118,88

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian kinerja sasaran tahun 2025
Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 120,21%. Angka tersebut meningkat sebesar 2,40% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2024 sebesar 117,81%.
- Analisis hasil (kinerja) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :
Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 sebesar 120,21%.

Tabel 2.38
Capaian Indikator IKA, IKU dan IKL Tahun 2025

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,330	68,8	142,35%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,700	74,58	93,58%
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	28,310	54,81	193,61%
	IKLH	56,633	68,08	120,21%

- A. Indeks Kualitas Air
- Perlu upaya pemisahan saluran pembuangan air hujan dengan limbah domestik skala kabupaten dengan pembangunan IPAL komunal terpusat agar tidak ada

- limbah domestik yang masuk ke air sungai (Kewenangan Dinas PUPR)
2. Perlunya pembangunan IPAL komunal pada kawasan permukiman (Kewenangan Dinas PUPR)
 3. Perlunya sosialisasi dan pembinaan ke semua pelaku usaha terutama skala UMKM untuk mempunyai IPAL dalam pengelolaan air limbah industri dan domestik. (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM dan Dinas PKPLH)
 4. Perlunya fasilitasi pembangunan Instalasi pengolahan air limbah pada industri skala UMKM (Kewenangan Dinas Nakerinkop dan UKM atau Pemerintah Desa)
 5. Perlunya perbaikan kondisi vegetasi pada daerah hulu sungai dan daerah sempadan sungai (Kewenangan BPDAS-KLHK).
 6. Perlunya sosialisasi kepada petani baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir dalam penggunaan pupuk kimia, agar tidak mencemari air sungai (Kewenangan Dinas Pertanian)
 7. Perlunya pengawasan intensif pada kualitas air limbah yang dibuang oleh pelaku usaha ke sungai sebagai badan air penerima (Kewenangan Dinas PKPLH)
 8. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan pada seluruh Daerah Aliran Sungai (Kewenangan Dinas Kesehatan)
 9. Perlunya penguatan eco enzym pada air sungai secara berkala (Kewenangan Dinas PKPLH)
 10. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat pada Daerah Aliran Sungai agar tidak membuang sampah pada sungai (Dinas PKPLH, Pemdes, Dinas PMD, BBWS Pemali Juwana)
 11. Perlunya memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas air permukaan dan air sungai (Kewenangan Dinas PKPLH)
 12. Perlunya mewujudkan laboratorium lingkungan yang telah ada agar terakreditasi dan teregister di KLHK (Kewenangan Dinas PKPLH)
- B. Indeks Kualitas Udara
1. Perlunya memperbanyak penghijauan turus jalan, (Kewenangan Dinas PKPLH)
 2. Perlunya penambahan ruang terbuka hijau (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
 3. Perlu adanya kawasan bebas rokok (Kewenangan Dinas Kesehatan)

4. Perlunya memperbanyak jalur sepeda (Kewenangan Dinas Perhubungan)
5. Perlunya pengintensifan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha penghasil emisi udara (Kewenangan Dinas PKPLH)
6. Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha sektor industri penghasil emisi udara terutama skala UMKM untuk mengelola sesuai ketentuan yang berlaku (Dinas Nakerinkop dan UKM)
7. memperbanyak jumlah titik sampling uji kualitas udara di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH)

C. Indeks Kualitas Lahan

1. Perlunya penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus (Kewenangan Dinas PKPLH, Pemdes)
2. Perlunya koordinasi ke perusahaan/swasta/masyarakat untuk berperan serta menyediakan RTH publik dalam bentuk perjanjian atau kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
3. Perlunya koordinasi ke Kementerian LHK terkait approve tutupan lahan.

Faktor pendukung :

1. Perubahan metode perhitungan IKLH dari IKLH berbasis indeks pencemaran ke IKLH-INA
2. Kualitas air sungai di hulu sungai masih baik dan hampir mendekati kualitas sungai Kelas II
3. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di sungai sedikit berkurang, dilihat juga dari jumlah sampah yang semakin banyak diangkut di TPA Tanjungrejo
4. Adanya kegiatan bersih sungai yang diadakan rutin hampir sebulan sekali oleh organisasi lembaga masyarakat, didukung pemerintah desa dan dinas/instansi terkait.
5. Kualitas udara di sekitar perusahaan dan permukiman, masih baik.
6. Kualitas lahan bertambah baik dengan adanya program penghijauan dari beberapa pihak

Faktor penghambat :

1. Masyarakat kurang sadar terhadap kebersihan dan sanitasi lingkungan diantaranya dengan adanya banyak yang membuang sampah di sungai

2. Terdapat pembakaran secara terbuka tanpa disertai upaya penegndalian pencemaran udara
3. Penggunaan pupuk kimia buatan pada lahan pertanian terutama pada area sekitar mata air pada hulu sungai
4. Masyarakat melakukan BABs atau mengalirkan air limbah domestik ataupun industri langsung ke sungai tanpa didahului dengan pengolahan air limbah
5. Banyak tanaman penghijauan yang mati, apabila perbedaan musim terlalu ekstrim.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 120,21% atau kategori **Sangat tinggi**.

Secara umum Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan Sangat tinggi (nilai $91\% \leq 100\%$), Tinggi (nilai $76\% \leq 90\%$), Sedang (nilai $66\% \leq 75\%$), Rendah (nilai $51\% \leq 65\%$) dan Sangat Rendang (nilai $\leq 50\%$), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 14 Tujuan/sasaran strategis dimaksud, capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi sebanyak 10 sasaran, sasaran belum rilis dari BPS 2 sasaran, belum keluar LHE dari Kementerian PAN RB 1 sasaran dan 1 indikator dan dari BNPB 1 Indikator serta untuk Indeks Desa Membangun hanya sampai tahun 2024 selanjutnya diganti dengan Indeks Desa.

Berkaitan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagai berikut

Tabel 2.39
Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	100,93	Sangat Tinggi
2.	SDM yang unggul dan berbudaya	107,50	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	102,58	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya	117	Sangat Tinggi
5.	Menurunnya pengangguran	96,90	Sangat Tinggi
6.	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	NA	NA
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa Industri Hasil Tembakau (IHT)	NA	NA

No.	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
8.	Terciptanya iklim Investasi yang kondusif	148,29	Sangat Tinggi
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	122,81	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas Pemerintah	106,96	Sangat Tinggi
11.	Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	NA	NA
12.	Menguatnya keberdayaan masyarakat di Pedesaan dan Perkotaan	188,63	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya kekondusifan wilayah	122,32	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	120,21	Sangat Tinggi

f. Analis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.40
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Pengelolaan Pendidikan	147,372,888,988	140,857,026,493	95.58	4.42
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	124,999,900	74,080,275	59.26	40.74
			Program Pengembangan Kurikulum	120,000,000	93,348,000	77.79	22.21
			Program Pembinaan Perpustakaan	12,510,956,835	11,711,830,077	93.61	6.39
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	590,486,000	407,008,450	68.93	31.07
			Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	8,530,617,364	8,080,238,312	94.72	5.28
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,000,000	100,000,000	100.00	-
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	536,615,600	506,227,638	94.34	5.66
			Program Pengelolaan Permuseuman	3,484,269,901	3,446,716,332	98.92	1.08
			Program Pengembangan Kebudayaan	2,715,182,290	2,665,579,190	98.17	1.83
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98,047,104,100	89,293,573,662	91.07	8.93
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,391,235,500	1,311,772,112	94.29	5.71

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	857,956,800	792,354,820	92.35	7.65
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	533,078,000	463,752,793	87.00	13.00
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	929,093,800	902,985,880	97.19	2.81
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	40,149,400	39,813,300	99.16	0.84
			Program Pengendalian Penduduk	340,271,900	223,194,252	65.59	34.41
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,089,734,400	3,275,910,887	80.10	19.90
2	SDM yang unggul dan berbudaya	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	147,372,888,988	140,857,026,493	95.58	4.42
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	124,999,900	74,080,275	59.26	40.74
			Program Pengembangan Kurikulum	120,000,000	93,348,000	77.79	22.21
			Program Pembinaan Perpustakaan	12,510,956,835	11,711,830,077	93.61	6.39
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	590,486,000	407,008,450	68.93	31.07
			Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	8,530,617,364	8,080,238,312	94.72	5.28
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,000,000	100,000,000	100.00	-
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	536,615,600	506,227,638	94.34	5.66
			Program Pengelolaan Permuseuman	3,484,269,901	3,446,716,332	98.92	1.08
			Program Pengembangan Kebudayaan	2,715,182,290	2,665,579,190	98.17	1.83

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	173,973,931,100	160,422,819,765	92.21	7.79
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,391,235,500	1,311,772,112	94.29	5.71
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	857,956,800	792,354,820	92.35	7.65
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	533,078,000	463,752,793	87.00	13.00
		Angka Stunting	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	929,093,800	902,985,880	97.19	2.81
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	40,149,400	39,813,300	99.16	0.84
			Program Pengendalian Penduduk	340,271,900	223,194,252	65.59	34.41
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,089,734,400	3,275,910,887	80.10	19.90
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	419,907,300	344,635,636	82.07	17.93
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	64,155,509,150	61,573,699,139	95.98	4.02
			Program Rehabilitasi Sosial	1,899,507,900	1,613,400,008	84.94	15.06
			Program Penanganan Bencana	278,447,400	219,589,534	78.86	21.14
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	608,476,700	512,249,706	84.19	15.81
			Program Perlindungan Perempuan	17,955,600	10,092,200	56.21	43.79
			Program Perlindungan Khusus Anak	45,805,000	29,200,410	63.75	36.25

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	53,373,400	40,829,800	76.50	23.50
			Program Pengembangan Perumahan	513,345,900	467,979,047	91.16	8.84
			Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3,394,678,740	2,162,885,437	63.71	36.29
			Program Kawasan Permukiman	797,896,600	554,543,760	69.50	30.50
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	604,320,000	594,329,500	98.35	1.65
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,503,370,900	2,481,981,721	99.15	0.85
			Program Penempatan Tenaga Kerja	272,260,500	249,026,000	91.47	8.53
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,419,831,000	3,225,609,348	94.32	5.68
			Program Hubungan Industrial	76,488,000	64,768,300	84.68	15.32
4	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Mandiri	Program Pemberdayaan Sosial	419,907,300	344,635,636	82.07	17.93
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	64,155,509,150	61,573,699,139	95.98	4.02
			Program Rehabilitasi Sosial	1,899,507,900	1,613,400,008	84.94	15.06
			Program Penanganan Bencana	278,447,400	219,589,534	78.86	21.14
			Program Pengarusutamaan Genderdan Pemberdayaan Perempuan	608,476,700	512,249,706	84.19	15.81
			Program Perlindungan Perempuan	17,955,600	10,092,200	56.21	43.79
			Program Perlindungan Khusus Anak	45,805,000	29,200,410	63.75	36.25

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	53,373,400	40,829,800	76.50	23.50
			Program Pengembangan Perumahan	513,345,900	467,979,047	91.16	8.84
			Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas	3,394,678,740	2,162,885,437	63.71	36.29
			Program Kawasan Permukiman	797,896,600	554,543,760	69.50	30.50
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	604,320,000	594,329,500	98.35	1.65
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	2,503,370,900	2,481,981,721	99.15	0.85
5	Menurunnya pengangguranTingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Penempatan Tenaga Kerja	272,260,500	249,026,000	91.47	8.53
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,419,831,000	3,225,609,348	94.32	5.68
			Program Hubungan Industrial	76,488,000	64,768,300	84.68	15.32
6	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	PDRB Perkapita	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,806,043,000	3,570,453,977	93.81	6.19
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,139,932,100	2,104,445,000	98.34	1.66
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	200,514,800	197,147,300	98.32	1.68
			Program Penyuluhan Pertanian	739,423,000	702,872,759	95.06	4.94
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	37,556,800	35,897,100	95.58	4.42
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	107,318,900	93,090,000	86.74	13.26

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Pemasaran Pariwisata	1,739,067,900	1,708,681,416	98.25	1.75
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5,786,588,061	5,605,460,541	96.87	3.13
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,000,000	68,796,900	98.28	1.72
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4,020,961,000	3,637,720,975	90.47	9.53
			Program Pengembangan Ekspor	150,597,600	139,008,200	92.30	7.70
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	701,733,700	692,930,891	98.75	1.25
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,025,178,000	969,065,373	94.53	5.47
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	634,490,300	599,387,145	94.47	5.53
			Program Pengembangan UMKM	408,626,200	389,276,195	95.26	4.74
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	70,000,000	69,737,765	99.63	0.37
			Program Pelayanan Penanaman Modal	185,233,800	156,316,238	84.39	15.61
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	117,360,600	104,360,190	88.92	11.08
			Program Promosi Penanaman Modal	152,177,000	147,233,100	96.75	3.25
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	50,504,762,272	49,666,103,927	98.34	1.66
			Program Penyelenggaraan Jalan	90,949,640,590	94,756,520,796	104.19	(4.19)
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16,736,365,938	16,133,965,766	96.40	3.60

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	43,492,820,350	42,345,213,595	97.36	2.64
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	463,529,400	451,330,980	97.37	2.63
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	68,169,000	7,101,000	10.42	89.58
			Program Penatagunaan Tanah	553,672,000	407,556,100	73.61	26.39
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa Industri Hasil Tembakau (IHT)	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau (IHT)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,806,043,000	3,570,453,977	93.81	6.19
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,139,932,100	2,104,445,000	98.34	1.66
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	200,514,800	197,147,300	98.32	1.68
			Program Penyuluhan Pertanian	739,423,000	702,872,759	95.06	4.94
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	37,556,800	35,897,100	95.58	4.42
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	107,318,900	93,090,000	86.74	13.26
			Program Pemasaran Pariwisata	1,739,067,900	1,708,681,416	98.25	1.75
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5,786,588,061	5,605,460,541	96.87	3.13
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,000,000	68,796,900	98.28	1.72
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4,020,961,000	3,637,720,975	90.47	9.53
			Program Pengembangan Ekspor	150,597,600	139,008,200	92.30	7.70

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	701,733,700	692,930,891	98.75	1.25
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,025,178,000	969,065,373	94.53	5.47
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	634,490,300	599,387,145	94.47	5.53
			Program Pengembangan UMKM	408,626,200	389,276,195	95.26	4.74
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	70,000,000	69,737,765	99.63	0.37
8	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau (IHT)	Realisasi Investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	185,233,800	156,316,238	84.39	15.61
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	117,360,600	104,360,190	88.92	11.08
			Program Promosi Penanaman Modal	152,177,000	147,233,100	96.75	3.25
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	84,381,700	72,297,499	85.68	14.32
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	50,504,762,272	49,666,103,927	98.34	1.66
			Program Penyelenggaraan Jalan	90,949,640,590	94,756,520,796	104.19	(4.19)
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16,736,365,938	16,133,965,766	96.40	3.60
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	43,492,820,350	42,345,213,595	97.36	2.64
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	463,529,400	451,330,980	97.37	2.63
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	68,169,000	7,101,000	10.42	89.58
			Program Penatagunaan Tanah	553,672,000	407,556,100	73.61	26.39

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
9	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	2,043,323,544	1,640,432,448	80.28	19.72
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	772,473,100	652,285,223	84.44	15.56
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,687,568,028	44,583,592,052	89.73	10.27
			Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1,459,792,600	558,937,060	38.29	61.71
			Program Perekonomian dan Pembangunan	1,794,255,600	1,374,924,596	76.63	23.37
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	598,037,450	308,273,790	51.55	48.45
			Program Kepegawaian Daerah	3,723,021,680	3,051,630,978	81.97	18.03
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,170,487,500	1,776,770,307	81.86	18.14
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	330,845,333,043	305,715,246,964	92.40	7.60
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8,145,596,000	7,330,174,256	89.99	10.01
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	466,983,800	440,374,038	94.30	5.70
			Program Aplikasi Informatika	810,673,800	751,732,073	92.73	7.27
10	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	2,043,323,544	1,640,432,448	80.28	19.72
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	772,473,100	652,285,223	84.44	15.56

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,287,664,462,699	1,188,103,023,899	92.27	7.73
			Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1,459,792,600	558,937,060	38.29	61.71
			Program Perekonomian dan Pembangunan	1,794,255,600	1,374,924,596	76.63	23.37
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	598,037,450	308,273,790	51.55	48.45
			Program Kepegawaian Daerah	3,723,021,680	3,051,630,978	81.97	18.03
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,170,487,500	1,776,770,307	81.86	18.14
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	330,845,333,043	305,715,246,964	92.40	7.60
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8,145,596,000	7,330,174,256	89.99	10.01
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	466,983,800	440,374,038	94.30	5.70
			Program Aplikasi Informatika	810,673,800	751,732,073	92.73	7.27
11	Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	Program Administrasi Pemerintah Desa	4,293,770,084	4,171,530,355	97.15	2.85
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	55,742,000	53,985,498	96.85	3.15
			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	708,266,100	610,702,780	86.23	13.77
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	534,532,180	467,494,082	87.46	12.54

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	979,768,015	951,861,678	97.15	2.85
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	550,816,508	495,875,899	90.03	9.97
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	706,509,200	589,162,033	83.39	16.61
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,218,482,300	885,043,767	72.63	27.37
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran gan Penyelamatan Non Kebakaran	1,016,203,800	999,181,442	98.32	1.68
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	3,324,019,900	3,135,366,699	94.32	5.68
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Sosial Konflik	784,242,500	749,261,344	95.54	4.46
			Program Penanggulangan Bencana	1,292,036,900	1,135,645,859	87.90	12.10
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	975,863,000	406,869,587	41.69	58.31
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	14,897,000	14,485,250	97.24	2.76
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	302,441,800	287,518,600	95.07	4.93
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	2,888,200	2,799,300	96.92	3.08
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	204,632,500	190,649,080	93.17	6.83

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10,012,000	9,971,000	99.59	0.41
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10,532,000	10,085,250	95.76	4.24
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	244,804,500	230,816,928	94.29	5.71
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	117,061,500	114,174,091	97.53	2.47
			Program Pengelolaan Persampahan	14,042,535,925	7,723,440,560	55.00	45.00
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-	-
12	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	Persentase Desa Mandiri	Program Administrasi Pemerintah Desa	4,293,770,084	4,171,530,355	97.15	2.85
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	55,742,000	53,985,498	96.85	3.15
			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	708,266,100	610,702,780	86.23	13.77
		Indeks Pembangunan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	534,532,180	467,494,082	87.46	12.54
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	979,768,015	951,861,678	97.15	2.85
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	550,816,508	495,875,899	90.03	9.97

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	706,509,200	589,162,033	83.39	16.61
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,218,482,300	885,043,767	72.63	27.37
13	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan kekondusifan wilayah	Angka Konflik Sosial	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,218,482,300	885,043,767	72.63	27.37
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,016,203,800	999,181,442	98.32	1.68
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,324,019,900	3,135,366,699	94.32	5.68
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Sosial Konflik	784,242,500	749,261,344	95.54	4.46
		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Program Penanggulangan Bencana	1,292,036,900	1,135,645,859	87.90	12.10
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	975,863,000	406,869,587	41.69	58.31
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	14,897,000	14,485,250	97.24	2.76
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	302,441,800	287,518,600	95.07	4.93
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	2,888,200	2,799,300	96.92	3.08

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Efisiensi (%)
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	204,632,500	190,649,080	93.17	6.83
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10,012,000	9,971,000	99.59	0.41
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10,532,000	10,085,250	95.76	4.24
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	244,804,500	230,816,928	94.29	5.71
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	117,061,500	114,174,091	97.53	2.47
			Program Pengelolaan Persampahan	14,042,535,925	7,723,440,560	55.00	45.00
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-	-

PENGHARGAAN YANG DIRAIH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO
1.	22 Februari 2025	Pemecahan Rekor MURI Pagelaran Tari Kretek dengan Peserta Terbanyak	Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)	
2.	28 April 2025	- TOP Pembina BUMD 2025 Bupati Kudus - TOP CEO BUMD 2025 atas nama Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda), TOP BUMD 2025 4 Stars atas nama PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)	Majalah TopBusiness bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), sejumlah asosiasi bisnis nasional, serta didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri RI	
3.	5 Mei 2025	Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat "Pelayanan Prima"	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi	
4.	5 Juni 2025	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024	BPK RI	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO
5.	23 Juli 2025	“Pemimpin Pemberdaya Generasi Muda” dalam Detik Jateng–Jogja Award 2025	Detikcom	
6.	17 September 2025	Lomba TMMD Tingkat Nasional dan Karya Jurnalistik TMMD ke-125 Tahun 2025.	TNI Angkatan Darat (TNI AD)	
7.	26 September 2025	Pemenang Favorit Penjaringan Inovasi Masyarakat (PIM) 2025	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jateng	
8.	7 November 2025	Satria Brand Award (SBA) 2025 oleh Suara Merdeka Network		
9.	12 November 2025	Insentif Fiskal Rp6 miliar untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kudus	Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO
10.	28 November 2025	Apresiasi PARIWARA Antikorupsi & ACFFEST 2025 kategori Media On Ground Activation	KPK RI	
11.	10 Desember 2025	Innovative Government Award (IGA) 2025	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	
12.	18 Desember 2025	Piagam Penghargaan sebagai Bunda PAUD PAUD Peduli	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya sering muncul pertanyaan terkait adanya kegiatan yang bersumber dari APBN berupa Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 tidak menerima alokasi Tugas Pembantuan APBN maupun APBD Provinsi (NIHIL), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2025

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
- NIHIL -											

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pemenuhan SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.282)	1 Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7– 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (126.906)	1 Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (2.074)	1 Tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi SPM Urusan Pendidikan

	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.282)	1 Tahun	100% (27.527)
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (126.906)	1 Tahun	99,75 % (126.594)
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/ atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (2.074)	1 Tahun	90,31% (1.873)

Pada Tahun 2025, capaian layanan Pendidikan Anak Usia Dini untuk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD mencapai 100%. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 95,99%.

Capaian layanan Pendidikan Dasar untuk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada Tahun 2025 mencapai 99,78 % meningkat dari capaian Tahun 2024 yang berada di angka 99,29%.

Sedangkan capaian layanan Pendidikan Kesetaraan pada usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2025 mencapai 90,31%. Capaian ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 65,54 %.

Secara garis besar capaian SPM bidang Pendidikan mengalami kenaikan yang signifikan, namun demikian perlu menjadi catatan bahwa masih terdapat 312 siswa usia pendidikan dasar yang belum terlayani, dan 201 orang yang usia pendidikan kesetaraan yang belum terlayani.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 202 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS UTAMA					97.34 %	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					100 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	95	5.00	95 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	27282	27527	+245	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	81	90	+9	100 %	
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	92	92	0	100 %	
2 .	Pendidikan Dasar					99.76 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD	Persentase	100	99	1	99 %	
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP	Persentase	100	95	5	95 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	79.80 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	126.906	126.594	312	99.75 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	19.98 %	

	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.89 %	
	SD (2025)					100 %	
	1. Kemampuan literasi	Nilai	86	86	0	100 %	
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	86	86	0	100 %	
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	78	78	0	100 %	
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75	75	0	100 %	
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62	62	0	100 %	
	SMP (2025)					99.78 %	
	1. Kemampuan literasi	Nilai	89	88	0	98.88 %	
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	84	84	0	100 %	
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	73	73	0	100 %	
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72	72	0	100 %	
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59	59	0	100%	
3.	Pendidikan Kesetaraan					92.25 %	
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
		Persentase	100	65	35.00	65.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	72.25 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	2074	1873	201	90.31 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	65	65	0.0000	100.00 %	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS UTAMA					97.34 %	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2025 adalah 97,34% kategori **Tuntas Utama**, Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 yang hanya mencapai 84,50 % kategori Tuntas Madya. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Kudus tetap harus meningkatkan kinerjanya mengingat masih terdapat 312 siswa usia pendidikan dasar yang belum terlayani, dan 201 orang yang usia pendidikan kesetaraan yang belum terlayani.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan.

Tabel 4.4
Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan
Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	-	14.832.956.300,-	-
2	Pendidikan Sekolah Dasar	-	14.782.639.100,-	-
3	Pendidikan SMP		3.546.466.400,-	-
3	Pendidikan Kesetaraan	-	124.999.900,-	-
4	Jumlah		33.287.061.700,-	-

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan total mencapai Rp. 33.287.061.700,-

4.1.5 Dukungan Personil

Adapun dukungan personil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan diantaranya PAUD 2.750 org, pendidikan dasar 9.031 orang, dan Pendidikan Kesetaraan sebanyak 409 org.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan, ditemukan beberapa kendala permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan, terdapat kendala permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Masih adanya Anak Tidak Sekolah, penyebab utama diantaranya Faktor Ekonomi, Faktor Kesehatan, Faktor Sosial dan Bullying
- Masih terdapat orang tua/ wali murid yang belum memahami pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini;
- Hasil skor literasi, numerasi dan karakter hasil dari sampling Asesment Nasional sehingga tdk mengukur semua siswa sekolah;
- Masih ada anak usia sekolah yg berada di pondok namun tidak bersekolah formal/non formal.

b) Solusi

- penguatan pendataan dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait, satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, serta unsur masyarakat.
- optimalisasi bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan penyediaan mekanisme pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah
- Pemerintah daerah mendorong peran aktif satuan PAUD, kader masyarakat, dan pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan penyuluhan, kampanye sadar PAUD, serta dilakukan penguatan akses dan kualitas layanan PAUD agar lebih terjangkau, inklusif, dan menarik bagi masyarakat
- Melakukan penguatan pemantauan mutu pendidikan melalui instrumen evaluasi internal sekolah, pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai data diagnostik, serta pengembangan asesmen daerah yang bersifat pendukung
- koordinasi dan sinergi dengan pengelola pondok pesantren serta instansi terkait guna mendorong partisipasi anak usia sekolah dalam pendidikan formal atau nonformal.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmonohadi, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Millitus;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Target Capain SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (11.462)	1 Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (11.462)	1 Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (11.362)	1 Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (56.948)	1 Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (172.598)	1 Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia prduktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (572.447)	1 Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (103.315)	1 Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (232.426)	1 Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (18.032)	1 Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.173)	1 Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberculosi yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (12.869)	1 Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (16.876)	1 tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (11.462)	1 Tahun	100 % (11.880)
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (11.462)	1 Tahun	100 % (11.462)
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (11.362)	1 Tahun	99,34 % (11.362)
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (56.948)	1 Tahun	100 % (56.948)
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (172.598)	1 Tahun	100 % (172.598)
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia prduktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (572.447)	1 Tahun	100 % (572.498)
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (103.315)	1 Tahun	100 % (103.402)
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (232.426)	1 Tahun	100 % (232.426)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (18.032)	1 Tahun	100 % (18.032)
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.173)	1 Tahun	100 % (2.173)
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberculosi yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (12.869)	1 Tahun	100 % (22.378)
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (16.876)	1 tahun	100 % (17.429)

Bersadarkan tabel target dan realisasi capaian SPM bidang kesehatan di atas, sebagian besar layanan SPM Bidang kesehatan di Kabupaten Kudus tahun 2025 telah terlayani 100% atau Tuntas Paripurna.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total capaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KESEHATAN					100%	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	11462	11880	+418	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	

	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	11462	11880	+418	100%	
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	11462	11880	+418	100%	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	11462	11880	+418	100%	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	11462	11880	+418	100%	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	11462	11880	+418	100%	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	11462	11880	+418	100%	
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	11462	11880	+418	100%	
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	11462	11880	+418	100%	
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11462	11880	+418	100%	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	11462	11880	+418	100%	
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	987	987	0	100%	
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	23	23	0	100%	
	13. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	887	887	0	100%	
	14. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2321	2321	0	100%	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	659	659	0	100%	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	63	63	0	100%	
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	6754	6754	0	100%	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%	80.00 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	11462	11462	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%	20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Formulir partograf	Formulir	11.462	11.462	0	100%	

	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	11.462	11.462	0	100%	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11.462	11.462	0	100%	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	11.462	11.462	0	100%	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	23	23	0	100%	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	887	887	0	100%	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	659	659	0	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	63	63	0	100%	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	11.362	11.362	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	11.362	11.362	0	100%	
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	11.362	11.362	0	100%	
	3. Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	11.362	11.362	0	100%	
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	11.362	11.362	0	100%	
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	11.362	11.362	0	100%	
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11.362	11.362	0	100%	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	11.362	11.362	0	100%	
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	15	15	0	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	887	887	0	100%	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	659	659	0	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	24	24	0	100%	
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100%	
	14. Kader Kesehatan	Orang	7.202	7.202	0	100%	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80 %	

	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
			56.948	56.948	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	56.948	56.948	0	100%	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	56.948	56.948	0	100%	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	56.948	56.948	0	100%	
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	56.948	56.948	0	100%	
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	56.948	56.948	0	100%	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	56.948	56.948	0	100%	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	56.948	56.948	0	100%	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	56.948	56.948	0	100%	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - HIB	Vaksin	56.948	56.948	0	100%	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	56.948	56.948	0	100%	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	56.948	56.948	0	100%	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	56.948	56.948	0	100%	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	56.948	56.948	0	100%	
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	56.948	56.948	0	100%	
	15. Formula terapi gizi buruk	Paket	20	20	0	100%	
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	431	431	0	100%	
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	887	887	0	100%	
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100%	
	20. Guru PAUD	Orang	80	80	0	100%	
	21. Kader kesehatan	Orang	7.202	7.202	0	100%	
	5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	172.598	172.598	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/pesantren)	Form/Buku	172.598	172.598	0	100%	

	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	172.598	172.598	0	100%	
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	172.598	172.598	0	100%	
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	172.598	172.598	0	100%	
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	172.598	172.598	0	100%	
	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	172.598	172.598	0	100%	
	7. Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	20	20	0	100%	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	172.598	172.598	0	100%	
	9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	172.598	172.598	0	100%	
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	172.598	172.598	0	100%	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	111	111	0	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	887	887	0	100%	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100%	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	659	659	0	100%	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	70	70	0	100%	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	80	80	0	100%	
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/ dokter kecil/peer conselor	Orang	72.02	7.202	0	100%	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap: Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	572.447	572.498	+51	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	

	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	572.447	572.498	+51	100%	
	2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	52	52	0	100%	
	3. Alat : Tensimeter	Unit	37	37	0	100%	
	4. Alat : Glukometer	Unit	81	81	0	100%	
	5. Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	27	27	0	100%	
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	572.447	572.498	+51	100%	
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	572.447	572.498	+51	100%	
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	572.447	572.498	+51	100%	
	9. Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	20	20	0	100%	
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	572.447	572.498	+51	100%	
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	120	120	0	100%	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	40	40	0	100%	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	40	40	0	100%	
	c. Vasektomi set	Unit	40	40	0	100%	
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	572.447	572.447	0	100%	
	13. Vaksin Tetanus Differi (Td)	Ampul/Vial	572.447	572.447	0	100%	
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	431	431	0	100%	
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	887	887	0	100%	
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100%	
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	70	70	0	100%	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7.202	7.202	0	100%	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	103.315	103.402	+87	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat	Paket	40	40	0	100%	

	ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter						
2.	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	103.315	103.402	+87	100%	
3.	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	40	40	0	100%	
4.	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	103.315	103.402	+87	100%	
5.	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	103.315	103.402	+87	100%	
6.	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	103.315	103.402	+87	100%	
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	103.315	103.402	+87	100%	
8.	Tenaga medis : Dokter	Orang	431	431	0	100%	
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	824	824	0	100%	
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100%	
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	70	70	0	100%	
13.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	80	80	0	100%	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	232.426	232.426	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	232.426	232.426	0	100%	
2.	Obat Hipertensi	Paket	232.426	232.426	0	100%	
3.	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	37	37	0	100%	
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	232.426	232.426	0	100%	
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	232.426	232.426	0	100%	
6.	Tenaga medis : Dokter	Orang	431	431	0	100%	
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	887	887	0	100%	
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100%	

	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	24	24	0	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	659	659	0	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	70	70	0	100%	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	18.032	18.032	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	18.032	18.032	0	100%	
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	40	40	0	100%	
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	18.032	18.032	0	100%	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	18.032	18.032	0	100%	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	18.032	18.032	0	100%	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	431	431	0	100%	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	887	887	0	100%	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	659	659	0	100%	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	70	70	0	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	63	63	0	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	180	180	0	100%	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Berat		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	2173	.2.173	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	

	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	2.173	2.173	0	100%	
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Paket	2.173	2.173	0	100%	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	2.173	2.173	0	100%	
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	2.173	2.173	0	100%	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	2.173	2.173	0	100%	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	431	431	0	100%	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	8	8	0	100%	
	8. Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100%	
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	20	20	0	100%	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	12.869	22.378	+9509	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12.869	22.378	+9509	100%	
	2. Reagen Zn TB	Kit	12.869	22.378	+9509	100%	
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	12.869	22.378	+9509	100%	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	12.869	22.378	+9509	100%	
	5. Katrid tes cepat molekuler	Tes	12.869	22.378	+9509	100%	
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	12.869	22.378	+9509	100%	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	12.869	22.378	+9509	100%	
	8. Tuberkulin	Vial	12.869	22.378	+9509	100%	
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	6	6	0	100%	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	659	659	0	100%	

	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	70	70	0	100%	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	180	180	0	100%	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	71	71	0	100%	
	15. Kader Kesehatan	Orang	7.202	7.202	0	100%	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	16.867	17.429	+562	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16.867	17.429	+562	100%	
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	16.867	17.429	+562	100%	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	16.867	17.429	+562	100%	
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	16.867	17.429	+562	100%	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	10	10	0	100%	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	887	887	0	100%	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.321	2.321	0	100%	
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	180	180	0	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	70	70	0	100%	
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	22	22	0	100%	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KESEHATAN					100% (Tuntas Paripurna)	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2025 adalah 100% kategori Tuntas Paripurna. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian dari tahun 2024 sebesar 99,15% masuk dalam Kategori Tuntas Utama. Peningkatan ini menunjukkan kerja keras dan kerja cerdas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan penerapan Standar pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Kesehatan.

Tabel 4.8
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan
Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	2,172,289,500	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	-	133,000,000	-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	-	123,000,000	-
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	-	714,000,000	-
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	-	829,400,000	-
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	421,484,000	-
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	36,836,500	-
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	-	204,330,000	-
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes militus	-	23,020,000	-
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	165,359,000	-
11.	Pelayanan Kesehatan Pada terduga TBC	-	494,125,600	-
12.	Pelayanan Kesehatan Orang resiko HIV	-	245,195,800	-
	Total Anggaran	-	5,562,040,400	

4.2.5 Dukungan Personil

Adapun sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah) adalah sebagai berikut:

No	Indikator SDM	Jumlah
1.	Dokter Spesialis Kandungan	23
2.	Dokter Spesialis Anak	15
3.	Dokter Umum	431
4.	Dokter Gigi	111
5.	Dokter Spesialis Paru	6
6.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	10
7.	Perawat	2.321
8.	Bidan	887
9.	Tenaga Farmasi	659
10.	Ahli Gizi	63
11.	Tenaga Promosi Kesehatan	24
12.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	70
13.	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik	180
14.	Tenaga Ahli Bidang Radiografer	71
15.	Tenaga Kesehatan Bidang Kesehatan Jiwa	8
16.	Tenaga lain terlatih bidang Kesehatanm Jiwa	20
17.	Tenaga Profesional	1
18.	Kader kesehatan	7.202
19.	Kader Lansia	80
20.	Guru PAUD	80
	Non Kesehatan pendukung	22
	Jumlah	12.269

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala permasalahan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan layanan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kudus, antara lain :

1. Berpindah pindah domisili sangat tinggi dalam kurun waktu dari 6 bulan
2. Tingkat kepatuhan orang tua atau pengasuh dalam membawa balita ke fasilitas pelayanan kesehatan atau posyandu secara rutin masih rendah,
3. Rendahnya partisipasi lansia dan keluarga untuk datang ke posyandu lansia atau puskesmas.

Sedangkan solusi yang dilakukan dalam upaya peningkatan layanan SPM Urusan Kesehatan diantaranya adalah :

1. Penguatan kolaborasi program ILP dan CKG
2. Penguatan data serta sistem pencatatan dan pelaporan
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan layanan ILP dan CKG yang menunjang capaian SPM kesehatan
4. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi
5. Upaya promosi masif dan berkolaborasi dengan pihak external (Kecamatan atau Desa)

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air lmbah domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target SPM pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.9
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (874.796 orang)	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (874.796 orang)	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.10
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (874.796 orang)	Setiap tahun	100 % (874.796 orang)
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (874.796 orang)	Setiap Tahun	100% 874.796 orang)

Capaian layanan SPM Kabupaten Kudus tahun 2025 terkait pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari untuk Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok sebanyak 874.796 orang dari jumlah keseluruhan sebesar 874.796 orang (100 %). Capaian layanan Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 sebanyak 874.796 orang dari jumlah keseluruhan sebesar 874.796 oran (100%). Hal ini

menunjukkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melayani dan mencukupi kebutuhan terkait akses air minum dan air limbah masyarakat di Kabupaten Kudus.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ Indeks Pencapaian (IP) SPM

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDAMH PEKERJAAN UMUM					98.33 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					99.76 %	
	Jumlah Penerima Layanan Dasar S.D. Kondisi Saat Ini (Rekapitulasi)		Target Yang Harus dilayani	Capaian yang Terlayani	Selisih		
	*tidak masuk dalam hitungan	Orang	874796	874796	0		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%	80 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	874796	874796	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					20%	19.76 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.81 %	
	JARINGAN PERPIPAAN					97.63 %	
	Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	89674	87548	2,126	97.63 %	
	Kualitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	89674	87548	2,126	97.63 %	

	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					96.89 %	
			Rekap Target	Rekap Capaian	Selisih		
	Jumlah Penerima Layanan Dasar S.D. Kondisi Saat Ini (Rekapitulasi) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	874796	874796	0		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	874796	874796	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				20%	16.89 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84.44 %	
	KUANTITAS SPALD					100.00 %	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	218716	218716	0	100.00 %	
	KUALITAS SPALD					68.88 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	218716	218716	0	100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot	Rumah Tangga	12709	1022	11,687	8.04 %	

	secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota						
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	53787	53036	751	98.60 %	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					98.33 % Tuntas Utama	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2025 sebesar 98,33% kategori Tuntas Utama. Hal ini merupakan penurunan capaian dari tahun 2024 yang mencapai 100% Kategori Tuntas Paripurna. Penurunan ini terutama pada mutu layanan SPALD-S dimana hanya bisa menjangkau 1.022 rumah tangga dari 12.709 target rumah tangga yang terlayani, sehingga masih ada 11.687 rumah tangga yang belum terlayani. Hal ini akan menjadi perhatian utama pada penerapan SPM bidang pekerjaan umum tahun 2026.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, oleh Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar di bidang tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan mutu layanan.

Adapun alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten
Kudus Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	-	604.320.000	196,000,000 (CSR)
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional	-	2,503,370,900	4.414.749.500 (CSR)
	Jumlah		3.107.690.900	4.610.749.500

4.3.5 Dukungan Personil

Sedangkan dukungan personil untuk pelaksanaan dasar di bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 16 orang personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pekerjaan Umum terdapat kendala permasalahan diantaranya adalah pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, beberapa wilayah di Kabupaten Kudus didapati memiliki Kondisi Air Tanah Berasa atau Payau. Sedangkan pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik, pencapaian aman belum maksimal dikarenakan belum operasionalnya IPLT yang sebelumnya tidak berfungsi.

Sedangkan salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, penyediaan air pada daerah dengan kondisi air tanah payau dapat dijangkau dengan pemenuhan melalui jaringan perpipaan oleh Perumda Tirta Muria (PDAM). Sedangkan pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik, pencapaian aman direncanakan dapat ditingkatkan dengan pengoperasian IPLT.

4.4 Urusan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13
Target SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100% (264)	1 Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100% (0) Tidak ada program relokasi	1 Tahun

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.14
Realisasi SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100% (264)	1 Tahun	100% (264)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100% (0) Tidak ada program relokasi	1 Tahun	100% (0) Tidak ada program relokasi

Sebagaimana pada tabel di atas, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus terdiri atas 2 jenis pelayanan dasar, yaitu layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Capaian layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2025 telah optimal, mencapai 100%. Dengan demikian layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten sudah baik.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100%	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100%	
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.						
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat						
	Terjadi (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80%	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	Jumlah Yang Harus Dilayani 264	Jumlah Yang Terlayani 264	Yang Belum Terlayani 0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				20%	20%	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	66	66	0	100%	
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0		
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0		
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100%	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						

	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80 %	
A. Jumlah Yang Harus Dilayani :			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	Orang		0	0	0	10 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				100%	100%	
B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi			Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terpenuhi	100%	
1 . Format Tahapan			Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100%	
1.PENDATAAN						100%	
FORM 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni BAGI KORBAN BENCANA						100%	
FORM 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana						100%	
FORM 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana						100%	
FORM 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah						100%	
FORM 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota						100%	
FORM 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabpaten/Kota (<10 HA)						100%	
FORM 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota						100%	
2.PERHITUNGAN						100%	
FORM 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana						100%	
FORM 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota :						100%	
FORM 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :						100%	

	FORM 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					100%	
	3.PERENCANAAN					100%	
	FORM 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota					100%	
	FORM 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota :					100%	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2025 adalah 100 % masuk dalam Kategori **Tuntas Paripurna**. Hal ini mencerminkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupten Kudus sudah mencapai kerja optimal dalam pemenuhan layanan dasar perumahan rakyat di Kabupaten Kudus.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran Pemenuhan
SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kudus Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)			Jumlah Personil
		APBN	APBD	Sumber lain	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	-	19.706.600,-	-	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	-	-	-	
	Jumlah		19.706.600,-		

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung 147 personil.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat permasalahan diantaranya dalam proses usulan perbaikan rumah tidak layak huni, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni Proses pendataan warga terkena bencana tidak real time sehingga harus melalui birokrasi permintaan data. Adapun upaya-upaya yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten kudus adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga setiap perubahan akan segera terpantau dan dilaporkan secara dini dan mengusulkan untuk menambah Formasi ASN baik kuantitas maupun kualitas (kompetensi) di bidang teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kesehatan

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.17
Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100% (400)	1 Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (59.174)	1 Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (59.174)	1 Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (30.000)	1 Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (76)	1 Tahun

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.18
Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (400)	1 Tahun	100% (400)
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (59.174)	1 Tahun	100% (59.174)
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (59.174)	1 Tahun	100% (59.174)
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (30.000)	1 Tahun	100% (30.000)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (76)	1 Tahun	100% (76)

Target dan realisasi layanan pemenuhan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel di atas terdiri atas 5 jenis pelayanan dasar, yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran.

Pada tahun 2025, capaian 5 Layanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus sudah optimal, yakni masing-masing Layanan Dasar telah mencapai 99,69% kategori Tuntas Utama. Hal tersebut mengindikasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang Trantibumlinmas sudah dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk layanan terkait kebencanaan.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.19
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Trantibum Linmas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total capaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS						99.69%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100%	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80%	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%	
		Orang	400	405	+5		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	20 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	

	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	109	122	+13	100%	
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/ penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	12	12	0	100%	
Data Dukung : 3319-20250416085126SOP Satpol PP.pdf Status : Approved							
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/ SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)	orang	18	2923	-2905	100%	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100%	
Data Dukung : 3319-20250415092458SK. SP DAMPAK PENEGAKAN PERDA.pdf Status : Approved							
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	100%	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	100%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						100%	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%	
		Orang	59174	59174	0		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	20%	

	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) YANG Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100%	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalakan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100%	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100%	
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	100%	
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					100 %	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	50	50	0	100%	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	100	100	0	100%	
	c. Tersedianya Narasumber/ Fasilitator (sesuai dg kebutuhan)	orang	10	10	0	100%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	500	500	0	100%	
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					100 %	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3	3	0	100%	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	3	3	0	100%	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	7	7	0	100%	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100%	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	30000	30000	0	100%	
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik					100 %	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	120	120	0	100%	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	0	100%	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100%	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100%	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100%	
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%	80 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	59174	59174	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					20%	20 %

	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	100%	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	0	100 %	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	1	1	0	100 %	
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	orang	1	1	0	100 %	
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100 %	
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	0	100 %	
	2. Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)		0	0	0	100 %	
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	0	100 %	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	4	4	0	100 %	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12	0	100 %	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	0	100 %	
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	100 %	
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					100%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	50	50	0	100 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	0	100 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100 %	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100 %	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100 %	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	0	100 %	
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					100%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	492	492	0	100 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	16	16	0	100 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	4	4	0	100 %	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	16	16	0	100 %	

	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	492	492	0	100 %	
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100 %	
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)					100 %	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100 %	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100 %	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	0	100 %	
	2) Gladi Lapang					100%	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100 %	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100 %	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	550	550	0	100 %	
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100 %	
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100 %	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100 %	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4	4	0	100 %	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100 %	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100 %	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	0	100 %	
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					100 %	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100 %	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100 %	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100 %	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100 %	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					100 %	

	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100 %	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100 %	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat					100 %	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100 %	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	20	20	0	100 %	
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100 %	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	50	50	0	100 %	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	200	200	0	100 %	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	100	100	0	100 %	
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	0	100 %	
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100 %	
Download SK Yang Telah Di Upload 3319-20251230092756SK Siaga Darurat Hidrometeorologi.pdf							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80 %	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%	
		Orang	30000	30000	0		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	20 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1. Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100 %	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100 %	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	50	50	0	100 %	
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	0	100 %	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	20	20	0	100 %	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	0	100 %	

	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	0	100 %	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	3	0	100 %	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	3	0	100 %	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	0	100 %	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100 %	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100 %	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						99.06 %	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					99.06 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
A.	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %	
		Orang	76	180	+104		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	19.06 %	
B.	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95.28 %	
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	60	43	17	71.67 %	
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	0	100 %	
	Data Dukung : 3319-20250416072813SOP (Pelayanan Pemadam Kebakaran).pdf Status : Approved						
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	286	286	0	100 %	
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	Orang	1	1	0	100 %	
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	60	60	0	100 %	
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	0	0	0	100 %	
CAPAIAN SPM TRANTIBUMLINMAS						99.69% (Tuntas Utama)	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencapaian (IP) SPM Trantibum linmas Kabupaten Kudus tahun 2025 adalah 99,69% dengan kategori Tuntas Utama. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 99,30 %. Hal ini mencerminkan bahwa Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kudus sudah mencapai kerja optimal dalam pemenuhan layanan dasar perumahan rakyat di Kabupaten Kudus. Adapun capaian terendah adalah pada capaian pelayanan Pemadam Kebakaran dimana masih terdapat 17 dari 60 kejadian yang waktu tanggap responnya lebih dari 15 menit.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang ini, diantaranya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.20
Alokasi Anggaran Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	-	1.218.482.300	-
2	Penanggulangan Kebencanaan	-	1.873.922.900	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	-	1.012.803.800	-
	Jumlah		4.108.609.900	

4.5.5 Dukungan Personil

Sedangkan dukungan personil untuk pelaksanaan dasar di bidang Trantibumlinmas :

- Personil Satpol PP = 58 Orang (terdiri dari 25 Orang personil trantib.
- Personil Damkar 33 Orang
- personil Satlinmas 4.244 orang, dan
- Personil BPBD153 Orang (terdiri dari 21 ASN, 22 non ASN dan 110 relawan)

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menghambat dalam penyelenggaraan pelayanan SPM bidang Trantibumlinmas diantaranya ;

1. Bencana merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga. akan tetapi bencana dapat diantisipasi dengan memaksimalkan pencegahan

2. Pemenuhan sarana dan prasarana belum sepenuhnya optimal.
3. Keterbatasan peningkatan kapasitas personel pemadam kebakaran, dan Satpol PP
4. Pemenuhan sarana dan prasarana belum sepenuhnya optimal.
5. Masih adanya response time layanan pemadam kebakaran yang melebihi waktu yang ditentukan yaitu 15 menit.

Sedangkan langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain

1. Pada setiap musim hujan seringkali siaga bencana banjir, dan telah dilakukan mitigasi, dengan cara melakukan normalisasi daerah aliran Subgai di daerah hulu.
2. Telah dilakukan koordinasi dan sinergitas antara BPBD Kabupaten Kudus, BBWS, PU Kabupaten Kudus mengingat Karena DAS tersebut merupakan wilayah kerja BBWS,
3. Mendorong dan memfasilitasi personil Satpol PP untuk mengikuti pelatihan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas.
4. Terkait respon time di atas 15 menit, Damkar melakukan koordinasi dengan Tim Pemadam Kebakaran pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus untuk penanganan tanggap kebakaran di Kabupaten Kudus.
5. Melakukan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan layanan SPM Bidang Trantibumlinmas.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Sosial di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.21
Pencapaian SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025 %	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (450)	1 Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (40)	1 Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	umlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (306)	1 Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (92)	1 Tahun
5.	Linjamsos pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana	Jml linjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	100 % (500)	1 Tahun

4.6.3 Realisasi

Tabel 4.22
Pencapaian SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (450)	1 Tahun	100 % (450)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (40)	1 Tahun	100 % (40)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	umlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (306)	1 Tahun	100 % (306)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (92)	1 Tahun	100 % (92)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
5.	Linjamsos pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana	Jml linjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	100 % (500)	1 Tahun	100 % (500)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Sosial terdiri dari 5 layanan dasar, yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota.

Capaian 5 layanan dasar Urusan Sosial di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sudah optimal, yakni masing-masing layanan dasar telah mencapai 100% (Kategori Tuntas Paripurna). Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Perangkat Daerah terkait dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Capaian ini perlu dipertahankan sebagai motivasi untuk pencapaian pada periode berikutnya.

Selain jumlah penerima target layanan terdapat penghitungan mutu yang harus dipenuhi. Adapun capaian layanan dan mutu pada masing-masing jenis layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel indeks capaian SPM.

➤ **Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial**

Indeks Capaian SPM merupakan penghitungan antara prosentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20 % dan prosentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80%. Adapun Indeks pencapaian SPM bidang pekerjaan umum Kabupaten Kudus tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.23
Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TAS PARIPURNA					100%	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani	Orang	450	450	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20%	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	400	400	0.00	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	400	400	0.00	100%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	294	294	0.00	100%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	50	50	0.00	100%	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	125	125	0.00	100%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	10	0.00	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	0.00	100%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	0.00	100%	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0.00	100%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	0.00	100%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0.00	100%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0.00	100%	
	13. Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %	
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	40	40	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Layanan data dan pengaduan	orang	40	40	0.00	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	40	40	0.00	100%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	5	5	0.00	100%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	5	5	0.00	100%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	2	2	0.00	100%	

	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0.00	100%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	5	5	0.00	100%	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0.00	100%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	0.00	100%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0.00	100%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0.00	100%	
	12. Layanan rujukan	Orang	2	2	0.00	100%	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	306	306	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	306	306	0.00	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	306	306	0.00	100%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	224	224	0.00	100%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	50	50	0.00	100%	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	10	10	0.00	100%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	20	20	0.00	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0.00	100%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	5	5	0.00	100%	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0.00	100%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	0.00	100%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0.00	100%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0.00	100%	
	13. Layanan rujukan	Orang	3	3	0.00	100%	

4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %	
		Orang	92	92	0		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	92	92	0.00	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	92	92	0.00	100%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	10	10	0.00	100%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	50	50	0.00	100%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	20	20	0.00	100%	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	0.00	100%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	10	10	0.00	100%	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	0.00	100%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	0.00	100%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0.00	100%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0.00	100%	
	12. Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100%	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80%	
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani (Tidak Terjadi Bencana (100% dg catatan melakukan 3 tahapan)) :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Orang	500	500	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20%	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	1. Penyediaan permakanan	Orang	500	500	0.00	100%	
	2. Penyediaan sandang	Orang	100	100	0.00	100%	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	50	50	0.00	100%	

	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	100	100	0.00	100%	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	100	100	0.00	100%	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TAS PARIPURNA					100%	

Pada Tahun 2025, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Kudus telah mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan tuntas paripurna. Seluruh jenis layanan dasar pada urusan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan standar, target, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak dasar masyarakat penerima layanan dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan sosial yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, didukung oleh perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Pelaksanaan layanan SPM Bidang Sosial juga didukung oleh ketersediaan data sasaran yang akurat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta penguatan peran perangkat daerah terkait

4.6.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial.

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti		477.469.800	221.000.000 (CSR)
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti		-	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		-	-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana		262.263.400	
	Jumlah		739.733.200	221.000.000

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam mencapai pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial adalah :

- 5 orang (Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 orang Kepala Bidang/Koordinator, 2 Kepala Seksi/SubKoor, 4 orang staf;
- 2 orang pekerja sosial;
- 6 orang satgas PGOT;
- 9 orang TKSK.
- 23 orang Taruna Siaga Bencana

Dukungan personil ini tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan dan banyaknya pengguna Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang harus dilayani

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sos P3A P2KB Kabupaten Kudus selaku pengampu penerapan SPM urusan sosial adalah :

1. Kurangnya personil / PNS yang harus melaksanakan tupoksi bidang Sosial.
2. Minimnya Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana berasal dari APBD Berupa Logistik penampungan;
3. Minimnya Alokasi anggaran untuk jaminan sosial bagi penyandang cacat terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis;
4. Perlunya pendataan sasaran SPM Sosial yaitu : penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan ketunaan lainnya.

Adapun solusi yang dilaksanakan yaitu :

1. Adanya penambahan personil/ PNS karena banyaknya tupoksi yang harus dilaksanakan oleh bidang, yang seharusnya diampu oleh dinas tersendiri sehingga pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa maksimal.
2. Adanya target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di daerah (Perbup) sehingga mempermudah pencapaian pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Adanya program dan kegiatan yang dimasukkan dalam Renja, RKPD, dan RPJMD sehingga tercapai target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial.

4.7 Program dan Kegiatan

Dalam upaya penyelenggaraan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah, Pada Tahun Anggaran 2025 lalu Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran Program dan Kegiatan guna pencapaian pelayanan dasar, meliputi :

a. **Urusan Pendidikan**

Dalam rangka penerapan SPM bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan satu Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.25
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
					(Rupiah)	ANGGARAN (Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Anggaran SPM Bidang Pendidikan				33,287,061,700	29,264,061,492	87.91 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			14,832,956,300	13,164,459,600	88.75 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	50,000,000	47,975,000	95.95 %
		2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	950,000,000	950,000,000	100. %
Kekhususan PAUD							
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	595,000,000	595,000,000	100. %
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	360,000,000	310,000,000	86.11 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	12,497,956,300	10,928,067,800	87.44 %
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	380,000,000	333,416,800	87.74 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)			14,782,639,100	13,127,214,246	88.80 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	130,000,000	77,641,000	59.72 %
		2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	193,000,000	191,758,090	99.36 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	8,552,334,900	8,155,943,406	95.37 %
Literasi, Numerasi, Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusifitas							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	207,928,000	205,273,750	98.72 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	5,280,509,200	4,198,531,000	79.51 %
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	50,000,000	49,550,000	99.10 %
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	25,000,000	24,550,000	98.20 %

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
					(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	15,000,000	13,650,000	91.00 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	30,000,000	29,500,000	98.33 %
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	298,867,000	180,817,000	60.50 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)			3,546,466,400	2,898,307,071	81.72 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	716,025,000	710,604,979	99.24 %
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	360,000,000	349,200,000	97.00 %
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	88,242,000	72,849,290	82.56 %
Literasi, Numerasi, Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusifitas							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	228,000,000	220,360,002	96.65 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,914,199,400	1,402,319,700	73.26 %
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	20,000,000	19,400,000	97.00 %
		4	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	25,000,000	24,550,000	98.20 %
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	10,000,000	9,700,000	97.00 %
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	175,000,000	80,583,100	46.05 %
		7	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	10,000,000	8,740,000	87.40 %
	4	Pendidikan Kesenjangan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan			124,999,900	74,080,575	59.26 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	Dokumen	100,000,000	53,558,000	53.56 %
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesenjangan	Laporan	24,999,900	20,522,575	82.09 %

b. **Urusan Kesehatan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melaksanakan satu program yakni Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang terbagi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, yang terbagi dalam 12 (dua belas) sub-kegiatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.

Tabel 4.26
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		%
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. KUDUS				5,562,040,400	5,209,138,210	93.66 %
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				5,562,040,400	5,209,138,210	93.66 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5,562,040,400	5,209,138,210	93.66 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	2,172,289,500	2,095,624,521	96.47 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	133,000,000	118,990,250	89.47 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	123,000,000	90,395,700	73.49 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	714,000,000	595,612,220	83.42 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	829,400,000	797,863,901	96.20 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	421,484,000	398,117,569	94.46 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	36,836,500	35,352,300	95.97 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	204,330,000	196,000,000	95.92 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	23,020,000	20,000,000	86.88 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	165,359,000	164,934,000	99.74 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	494,125,600	458,587,349	92.81 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	245,195,800	237,660,400	96.93 %

c. **Urusan Pekerjaan Umum**

Dalam rangka penerapan SPM pada Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan terkait dengan pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum. Selaian APBD Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga memperoleh bantuan dana CSR dari Djarum Foundation. Adapun secara rinci diterangka pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.27
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. KUDUS				7,718,440,400	7,676,468,521	99.46 %
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				604,320,000	594,534,500	98.38 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			604,320,000	594,534,500	98.38 %
		1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	<u>400,000,000</u>	<u>395,586,000</u>	98.90 %
		2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	<u>100,000,000</u>	<u>97,979,000</u>	97.98 %
		3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	<u>104,320,000</u>	<u>100,969,500</u>	96.79 %
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				2,503,370,900	2,471,184,521	98.71 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,503,370,900	2,471,184,521	98.71 %
		1	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	<u>1,849,962,800</u>	<u>1,825,194,300</u>	98.66 %
		2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	<u>653,408,100</u>	<u>645,990,221</u>	98.86 %
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DJARUM FOUNDATION KUDUS (Sanitasi)		4,414,749,500	4,414,749,500	100.00 %
		2.	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DJARUM FOUNDATION KUDUS (Air Minum)		196,000,000	196,000,000	100.00 %

d. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan pelayanan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas PKPLH melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Sub Kegiatan Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota. Data sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.28
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. KUDUS				19,706,600	17,983,865	91.26 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				19,706,600	17,983,865	91.26 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Reh.abilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten			4,106,600	2,983,865	72.66 %
		1	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	375,000	0	0%
		2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3,731,600	2,983,865	79.96 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten			15,600,000	15,000,000	96.15 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	15,000,000	15,000,000	100.00 %
		2	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	600,000	0	0%
	JUMLAH PROGRAM				19,706,600	17,983,865	91.26 %

e. Urusan Trantibumlinmas

Penyelenggaraan pelayanan SPM pada Urusan Trantibumlinmas oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk penyelenggaraan Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban, dan Bencana Kebakaran, serta Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk layanan Sub Urusan Bencana. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.29
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. KUDUS				4,108,609,000	3,584,059,294	87.23 %
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)				1,218,482,300	885,043,767	72.63 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			258,598,800	240,633,397	93.05 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kab/ Kota	Dokumen	11,565,400	10,203,496	88.22 %

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	13,346,800	11,722,250	87.83 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	17,262,100	14,838,500	85.96 %
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1,408,800	1,292,985	91.78 %
		5	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1,334,000	1,233,407	92.46 %
		6	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	197,279,100	188,018,191	95.31 %
		7	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	5,462,800	5,260,200	96.29 %
		8	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	2,743,800	0	0%
		9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	8,196,000	8,064,368	98.39 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			900,620,500	587,837,870	65.27 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	27,037,000	18,416,601	68.12 %
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	860,353,500	560,301,069	65.12 %
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	13,230,000	9,120,200	68.94 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			59,263,000	56,572,500	95.46 %
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	59,263,000	56,572,500	95.46 %
2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)				1,873,922,900	1,699,834,085	90.71 %
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			164,641,000	157,623,946	95.74 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	35,966,000	33,297,335	92.58 %

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	128,675,000	124,326,611	96.62 %
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,159,778,000	1,121,063,943	96.66 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	87,070,000	82,804,149	95.10 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	122,190,000	117,935,000	96.52 %
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	115,471,000	113,770,328	98.53 %
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	104,795,000	102,800,000	98.10 %
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	65,290,000	64,024,600	98.06 %
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	65,290,000	64,024,600	98.06 %
		7	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	24,683,000	20,826,335	84.38 %
		8	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	33,705,000	32,994,305	97.89 %
		9	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	24,688,000	21,771,000	88.18 %
		10	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	87,070,000	82,804,149	95.10 %
		11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	87,070,000	82,804,149	95.10 %
		12	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kab/ kota	Unit	104,795,000	102,800,000	98.10 %
		13	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Kawasan	122,190,000	117,935,000	96.52 %
		14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	115,471,000	113,770,328	98.53 %
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			477,054,000	366,192,496	76.76 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	1,040,000	950	91.35 %
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	108,000,000	72,719,996	67.33 %
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	69,838,000	57,842,000	82.82 %
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	295,636,000	232,430,500	78.62 %

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	1,040,000	850	81.73 %
		6	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	1,500,000	1,400,000	93.33 %
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			72,449,900	54,953,700	75.85 %
		1	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	38,111,900	28,994,000	76.08 %
		2	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	34,338,000	25,959,700	75.60 %
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)				1,016,203,800	999,181,442	98.32 %
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,012,803,800	995,781,442	98.32 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	54,659,800	54,107,242	98.99 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	958,144,000	941,674,200	98.28 %
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			3,400,000	3,400,000	100.00 %
		1	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	3,400,000	3,400,000	100.00 %

f. URUSAN SOSIAL

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada Urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial P3A P2KB melaksanakan 1 (satu) program yang terbagi menjadi 2 (dua) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub-Kegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.30
Program Dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. KUDUS				739,733,200	659,728,872	89.18 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				739,733,200	659,728,872	89.18 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			477,469,800	455,162,338	95.33 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	50,600,000	46,325,850	
		2	Penyediaan sandang	Orang	30,600,000	29,288,998	
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	212,611,000	207,589,550	
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	9,746,200	8,749,500	
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	4,023,400	3,470,400	

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	5,672,900	5,264,600	
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	7,937,000	5,619,500	
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2,765,800	2,028,300	
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	139,613,200	133,832,240	
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	3,288,300	3,030,600	
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5,014,000	4,364,800	
		12	Pemberian layanan rujukan	Dok	5,598,000	5,598,000	
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			262,263,400	204,566,534	78.00 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	180,560,400	146,823,000	81.32 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	49,000,000	30,634,994	62.52 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	26,170,000	23,658,540	90.40 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	6,533,000	3,450,000	52.81 %
	JUMLAH PROGRAM				739,733,200	659,728,872	89.18 %

BAB V

PENUTUP

Capaian penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dilaporkan secara lengkap dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini. LPPD juga menyampaikan laporan mencakup akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja *outcome* yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh Urusan Wajib Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2025.

Secara umum seluruh kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, LPPD ini dapat menjadi bahan dan materi bagi Pemerintah untuk memberikan evaluasi kebijakan yang bersifat konstruktif dan pembinaan bagi peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

Sedangkan dalam implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya melaksanakan secara maksimal, dan diharapkan target yang dicapai senantiasa meningkat pada masa-masa mendatang.

LPPD juga memuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat Kabupaten Kudus dalam pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya pada Tahun 2025. Dari LPPD ini dapat didapatkan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	27527	27889	98,7019972	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	125263	125658	99,6856547	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	2193	3050	71,9016393	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	1715	2284	75,0875657	%
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	2959	3659	80,8690899	%
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	3	11462	0,0261734	%
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	245885	245885	100	%
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	18013	18013	100	%
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2278	2278	100	%
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	22711	22711	100	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11762	11762	100	%
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	1954	52342	3,7331397	%
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11462	11462	100	%
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11462	11462	100	%
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11362	11362	100	%
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	46480	46480	100	%
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	126551	126551	100	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	578830	578830	100	%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	103420	103420	100	%
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	9326,94	10295,4	90,5932747	%
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	314	314	100	%
1.c.2	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	539221	580417	92,9023443	%
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	870909	883194	98,6090259	%
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	244970	247770	98,8699197	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	610,16	610,16	100	%
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	1	100	%
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	239	239	100	%
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	5	5	100	%
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	19	19	100	%
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1	1	100	%
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	59,29	57,27	103,5271521	%
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	699	1144	61,1013986	%
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	12	12	100	%
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3	3	100	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	115	115	100	%
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	25	25	100	%
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1000	1000	100	%
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	347	347	100	%
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	43	60	71,6666667	%
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	450	450	100	%
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	40	40	100	-
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	306	306	100	-
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	92	92	100	-
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	1054	1054	100	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	89135	96600	92,2722567	-
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	67	67	100	%
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	407	451	90,2439024	%
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	30143	30143	100	%
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	12	12	100	%
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	10	10	100	%
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	46,55	63,8	72,9623824	%
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	7509352	9321007	80,5637417	%
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	404591314	447440000	90,4235906	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1	6	16,6666667	%
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	26	30	86,6666667	%
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	99922,18	160756,59	62,1574394	%
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	237540	237571	99,9869513	%
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	196215	223696	87,715024	%
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	%
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	653545	657029	99,4697342	%
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	79535	79535	100	%
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	351225	429095	81,8525035	%
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	10539	15472	68,1165977	%
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	1	1	100	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	1	1	100	%
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	25	25	100	%
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	1,93	2,1	91,9047619	%
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	87803	126970	69,1525557	%
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	4,11	13,75	29,8909091	%
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	-	0,71	-	0,71	Rasio
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,56	-	0,56	Rasio
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0	29	-	%
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	61	61	100	%
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	16	19	84,2105263	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	606511	606511	100	%
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	1,17313E+12	1,34513E+12	-12,7873181	%
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	730	730	100	%
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	1652420,2	1423925,32	16,0468303	%
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	1652420,21	1000000	165,242021	%
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	120	120	100	%
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	160499	201083	79,8172894	-
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	14	377	3,7135279	%
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	29	29	100	%
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	4151	4497	92,3059818	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	687	918	74,8366013	%
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	244	245	99,5918367	%
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	3566441	3231087	10,3789839	%
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	57,59	-	57,59	Nilai
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	24,65	-	24,65	Nilai
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	25,7	-	25,7	%
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	2770,03	2770	100,001083	%
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	31,74	-	31,74	Kg / Kap / Tahun
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	5736020000	1,65242E+12	0,3471284	%
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	105	183	-42,6229508	%
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	3621663	4213282	-14,0417613	%
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	199041	180601	10,2103532	%
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	286639,43	206168,84	39,0314026	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	16179015	15771994	2,5806566	%
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	10863	11819	91,9113292	%
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	10087	10823	93,1996674	%
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	99,25	-	99,25	%
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	337	4419	7,6261598	%
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	4419	4390	0,6605923	%
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	5,2035E+11	1,04037E+12	50,0159854	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	%
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7,63257E+11	2,64265E+12	28,8822586	%
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	7,2664E+11	2,47942E+12	29,3068	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	1,52879E+12	2,45572E+12	62,2543134	%
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	9,10103E+11	2,32285E+12	39,1804931	%
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1097	1967	55,7702084	%
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	78	78	100	%
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	4	-	4	Nilai
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	5	-	5	Nilai
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	4	-	4	Nilai

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	886	923	95,9913326	%
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40	-	40	Poin
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	24,36	-	24,36	Poin
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	22,5	-	22,5	Poin
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	12	12	100	%
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	97,01	-	97,01	Nilai